

Wilaela, Doktor Ilmu Sejarah lulusan Universitas Padjadjaran Bandung ini sehari-hari adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau; aktif menulis tentang sejarah dan studi perempuan dan gender. Sejumlah karyanya dalam bentuk biografi tokoh perempuan Riau. Di antaranya adalah Prosopografi Dekan Perempuan UIN Suska Riau (2005), "Encik Hasnah: Menekak Budaya" dan "Chadijah Ali: Menanam tuk Dituai Esok" (dalam Mutiara yang Terjaring, 2006); "Linda Agum Gumelar" dan "Lasijah Soetanto" (dalam Ketika Negara Memberi Amanah, 2012). Karya lainnya: Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2010); Perempuan dalam Budaya Melayu (2011), Sejarah Pendidikan Perempuan Riau Era Kemerdekaan (2014), Khazanah Riau (2014); Haji Eng Inspiring Person dari Babel (2015). No Telp/HP (08127653754), E-mail: wilaela@yahoo.com.

Nur Aisyah Zulkifli, dosen tetap Bahasa Inggris pada Fakultas Tarbiyah UIN sejak Suska Riau sejak tahun 2007. Selain itu ia mengajar juga di perguruan tinggi lain di Pekanbaru. Aktif menulis buku dan jurnal terutama dalam bidang ilmunya dan rajin mengikuti kegiatan pemberdayaan kompetensi. No Telp/HP (085364929193), E-mail: n.aisyahzulkifli@yahoo.co.id

KhaidirAlimin, sehari-hari bekerja di Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau. Lulusan Magister Ilmu Administrasi Unpad Bandung ini gemar melakukan kegiatan penelitian, terutama yang terkait dengan pekerjaannya dan kompetensinya sebagai ahli di bidang Ilmu Perpustakaan. Penelitiannya antara lain Identifikasi dan Transmedia Manuskrip tentang Kesultanan Siak di Belanda (2013) dan Kontroversi Aya Sofia (2014). No Telp/HP (081276878977) dan E-Mail: khaidir55@yahoo.com. ***



Dr. Wilaela, M.Ag

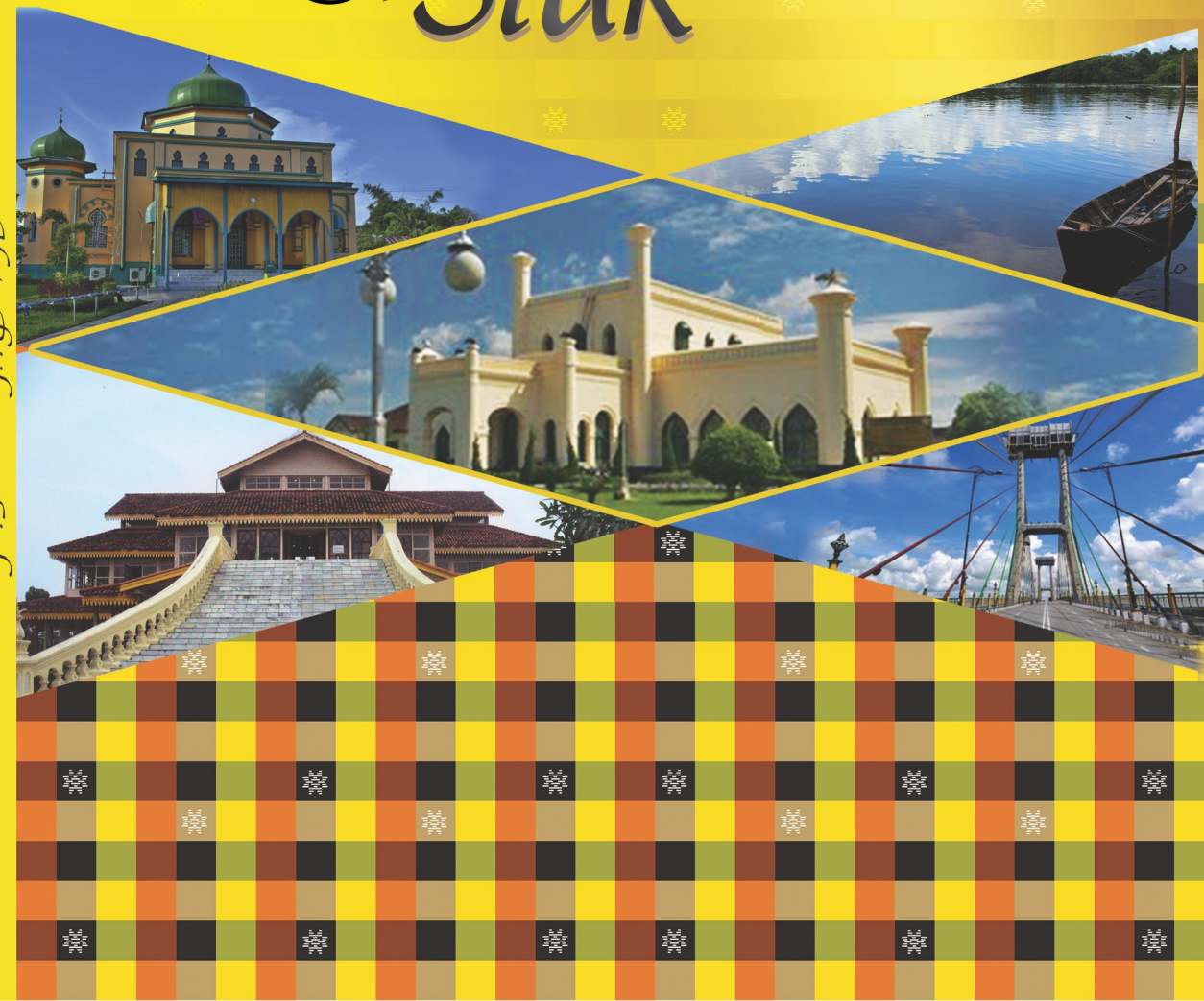
Nur Aisyah Zulkifli, M.Pd

Khaidir Alimin, S.Ag, SS, M.Si

Dr. Wilaela, M.Ag, dkk

Het Rijk van Siak

Het Rijk van Siak



Het Rijk van Siak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

PASAL 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Wilaela, M.Ag
Nur Aisyah Zulkifli, M.Pd
Khaidir Alimin, S.Ag, SS, M.Si

Het Rijk van Siak

Het Rijk van Siak

Hak Cipta @ Dr. Wileala, M.Ag, Nur Aisya Zulkifli, M.Pd, Khaidir Alimin,
S.Ag, SS, M.Si

Editor : Dr. Wileala, M.Ag

Penulis: - Dr. Wileala, M.Ag

- Nur Aisya Zulkifli, M.Pd

- Khaidir Alimin, S.Ag, SS, M.Si

Tata Letak/Cover: Andik April/Dewi

Percetakan: CV Mulia Indah Kemala

ISBN: 978-602-1096-93-2

Cetakan Pertama, Februari 2016

Penerbit:

Asa Riau (CV. Asa Riau)

Anggota IKAPI

Jl. Kapas No 16 Rejosari,

Kode Pos 28281 Pekanbaru - Riau

e-mail: asa.riau@yahoo.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Dilarang memperbanyak Karya Tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.*

Sekapur Sirih

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang berkat rahmat dan hidayah-Nya, laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam atas junjungan alam, Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia ke alam yang pengetahuan.

Penerbitan ini dalam upaya menyediakan dan menyebarkan sebanyak mungkin sumber sejarah Riau, khususnya Kerajaan Siak. Proses awalnya telah dimulai dengan kegiatan heuristik atau penelusuran sumber. Harapan awalnya adalah akan ditemukan sejumlah sumber pada abad ke-19 yang memuat keadaan Kerajaan Siak. Namun, karena berbagai kondisi tidak teratasi, yaitu bencana asap, maka kegiatan heuristik menjadi tidak maksimal. Walhasil, kami mengandalkan satu naskah kolonial untuk dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Kegiatan penterjemahan dapat berjalan lancar karena bantuan Dr. Harto Juwono M. Hum dari Universitas Indonesia. Beliaulah yang telah membantu jauh-jauh sebelumnya sehingga penyusunannya menjadi lebih muda. Sudah sepatutnya terima kasih kami sampaikan. Dalam hal ini, terima kasih juga untuk bantuan editing naskah kepada Nadia Ayu Amalina, S.S. Dalam upaya diseminasi sumber sejarah Kerajaan Siak, disamping alihbahasa, juga dilakukan alih media dari cetak yang menggunakan kertas ke bentuk digital yang bisa diakses melalui komputer di Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau atau melalui website kampus madani ini. Penerbitan ini juga merupakan bagian dari upaya diseminasi tersebut, baik dalam versi cetak buku ini maupun *e-book* atau hasil cetakan yang dionlinekan.

Sebagaimana disebutkan tadi, penyusunan buku ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan heuristik sumber sejarah Riau khususnya Kerajaan Siak. Ini berlangsung dalam kondisi luar

biasa, karena di Riau khususnya tengah dilanda bencana asap. Semula direncanakan untuk menyusun hasil heuristik dalam bentuk direktori. Namun, karena hampir-hampir tiga bulan kami terisolasi _bandara kerap kali tutup daripada buka, kampus beberapa kali libur darurat asap mengikuti libur sekolah, membuat model direktori menjadi tidak mungkin. Setelah melalui berbagi pertimbangan, akhirnya dirumuskan model alternatif, yaitu seperti yang tersaji dalam buku ini. Untuk segala keterbatasan dan kekurangan tersebut, kami mohon maaf dan semoga pada masa yang akan datang dapat dikembangkan oleh para pemerhati sejarah Kerajaan Siak

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penerbitan buku ini. Kepada Bapak Rektor dan wakil-wakilnya yang mendukung untuk kegiatan penelitiannya melalui surat keputusan. Kepada Dr. Helmiati, M.Ag selaku narasumber seminar awal; terima kasih untuk sarannya yang mempertimbangkan waktu dan kondisi bencana asap, agar penelitian tersebut dapat dilangsungkan. Kepada Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag, selaku narasumber seminar kedua untuk saran masukannya sehingga kami menambahkan subbagian tentang deskripsi naskah *Nota Omtrent Het Rijk van Siak* karya H.A Hijmans van Anrooij. Terima kasih kepada Ketua LPPM selaku penyelenggara kegiatan penelitian tersebut. Tentu saja kepada tim saya, Nur Aisyah Zulkifli, M.Pd untuk bantuan pelaporan penelitian dan Khaidir Alimin, S.Ag, SS, M.Si untuk versi digital buku. Semoga upaya kita ini dapat membawa manfaat bagi khazanah sejarah lokal khususnya sejarah Kerajaan Siak, amin.***

Pekanbaru, Februari 2016.

Wilaela

Daftar Isi

| | |
|---|----------------|
| Sekapur Sirih | v |
| Daftar Isi | vii |
| Bagian Pertama : Seputar “Nota Omtret Het Rijk Van Siak” | 1 |
| Bagian Kedua: Paparan Sejarah Het Rijk van Siak | 15 |
| Tinjauan Sejarah | 15 |
| Pembagian Wilayah | 35 |
| Unsur-Unsur Penduduk | 54 |
| Tapung | 87 |
| Tanah Putih, Bangka dan Kubu | 100 |
| Bagian Ketiga: Penutup | 113 |
| Tentang Penulis | 114 |

BAGIAN PERTAMA:

SEPUTAR “NOTA OMTRENT HET RIJK VAN SIAK” KARYA H.A. HIJMANS VAN ANROOIJ

Kajian tentang Kerajaan Siak telah banyak dilakukan, tidak hanya untuk keperluan akademis, tetapi juga untuk keperluan pengangkatan Sultan Syarif Kasim II sebagai pahlawan nasional, untuk pariwisata, ikon sarana publik, dan lain-lain. Kajian-kajian tersebut telah membedah Kerajaan Siak dari berbagai aspek, seperti sejarah, hukum Islam dan peradilan, pendidikan, politik dan pemerintahan, riwayat hidup, budaya, patriotisme, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan kesadaran sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk berbagai pendekatan teori ilmu sosial yang digunakan dalam kajian sejarah, maka tinjauan kembali kepada sejarah yang telah ditulis pada masa lalu menjadi sebuah keniscayaan. Dikatakan demikian karena, dengan penemuan data dan fakta baru yang dilengkapi dengan pendekatan baru, maka pemahaman baru tentang sejarah dapat dihasilkan. Walaupun sejarah faktual hanya sekali terjadi, tidak akan terulang kembali dan oleh karena itu ia unik; tetapi, sejarah sebagai kisah dapat ditulis berulang-ulang sehingga ia menghasilkan keumuman atau generalisasi. Dalam hal ini, sejarah sebagai kisah atau catatan merupakan sejarah sebagai ilmu, dimana nilai-nilai sejarah yang edukatif, rekreatif, dan inspiratif dipelajari untuk kemaslahatan pada masa kini dan mendatang.

Terkait dengan itu, studi tentang sumber sejarah menjadi penting sebagai langkah awal sebelum peneliti sejarah melakukan interpretasi. Sumber sejarah Kerajaan Siak diyakini cukup banyak dan sebagian besar telah diketahui. Akan tetapi, sejarah Kerajaan

Siak masih memiliki cacat-cacat fakta dan lubang-lubang interpretasi. Salah satu penyebab cacat fakta adalah karena ketiadaan sumber primer. Bahkan disayangkan, cacat atau lubang-lubang interpretasi itu terjadi karena kelangkaan sumber. Padahal interpretasi ibarat semen dan fakta batu batanya. Seseorang tidak akan dapat menjadikannya bangunan tanpa melekatkan semen tersebut dengan batu bata. Seseorang tidak akan dapat menyusun sejarah tanpa melekatkan interpretasi dengan faktas atau data yang diperolehnya.

Contoh paling nyata tentang kekosongan sumber adalah tentang keberadaan *Hollandsch Inlandsch School* (HIS) di Siak Sri Indrapura dan *Gouvernement Inlandsch School* di berbagai daerah di dalam wilayah Kerajaan Siak. Kekosongan juga terasa pada sejarah Sultanah Latifah School dan Madrasah Annisa. Keduanya adalah sekolah khusus perempuan. Belakangan, Wilaela (2012), berhasil menemukan dokumen penting terkait dengan pendirian kedua sekolah tersebut, sehingga sejarah kedua sekolah khusus perempuan yang dipandang pertama di Riau itu menjadi jelas.

Jikapun ada sumber, maka informasinya menimbulkan keraguan dan bahkan terdapat kerancuan. Misalnya, *Gouvernement Inlandsch School*, atau Sekolah Melayu Kelas Dua ini sering disamakan atau dicampuraduk pengertiannya dengan *Volksschool* atau Sekolah Desa, padahal keduanya jelas berbeda. Kajian seperti ini terdapat dalam karya-karya tentang Kerajaan Siak, termasuk karya-karya ilmiah-akademis. Kekeliruan ini bertahan bahkan menjadi banyak dan merata karena penulis-penulis berikutnya tinggal mengutip dan mengikuti saja tanpa melakukan kritik sumber.

Oleh karena itu, penting untuk menelusuri sumber sejarah tentang Kerajaan Siak. Penting juga sumber yang ditemui itu dapat dipublikasikan secara luas. Alih bahasa dari asal ke dalam Bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya publikasi agar peneliti atau pemerhati Sejarah Kerajaan Siak mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang isi sumber. Penerbitan buku ini diharapkan dapat menambah khazanah perbendaharaan sumber kajian tentang Islam dan Tamaddun Melayu.

Sumber kolonial tentang Kerajaan Siak adalah sumber sejarah Kerajaan Siak yang berasal dari catatan kolonial Belanda pada

masanya. Selama ini dalam penulisan sejarah Kerajaan Siak tidak memanfaatkan sumber kolonial secara maksimal. Hal ini terjadi karena sumber kolonial tidak mudah diperoleh dan yang ada sulit dimanfaatkan oleh penulis sejarah karena kendala bahasa.

Bentuk atau kategori sumber sejarah terdapat dalam bentuk tertulis dan tercetak. Sumber tersebut tersebar di berbagai perpustakaan dan penyimpanan. Antara lain ada di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional di Jakarta. Ada juga yang menjadi koleksi eksklusif di KITLV dan Universiteit Bibliotheek Universitas Leiden di Leiden. Ada juga yang tersimpan di National Archief di de Hague. Umumnya untuk dokumen pemerintah kolonial telah dialihkan dari cetak menjadi microfilm atau micropece. Sumber sejarah Kerajaan Siak juga terdapat dalam koleksi pribadi sejumlah tokoh masyarakat di Riau.

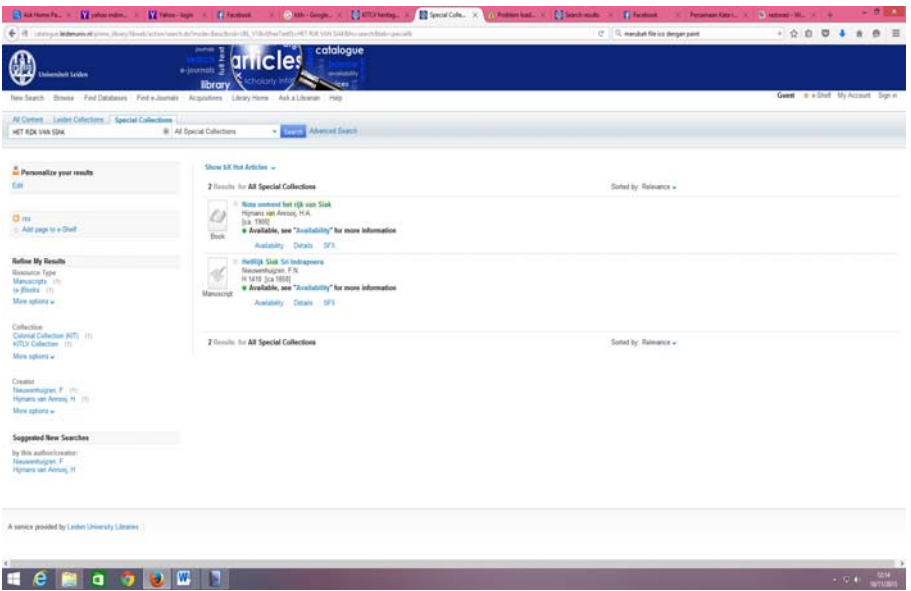
Kajian dan publikasi tentang Kerajaan Siak telah banyak dilakukan dengan berbagai aspek. Tetapi, khusus tentang kajian sejarah Kerajaan Siak memiliki sejumlah kelemahan dalam pemanfaatan sumber. Ini tidak berarti bahwa kajian terdahulu tidak bermakna. Semua kajian terdahulu telah memberi warna bagi studi sejarah Kerajaan Siak. Namun, khazanah tersebut lambat laun akan berkurang makna dan fungsinya jika kegiatan penggalian sumber dan studi terkini tidak dilanjutkan. Adagium "sejarah terbaik adalah sejarah masa kini" menunjukkan bahwa sejarah perlu ditulis ulang untuk menangkap esensi zaman. Oleh karena itu, sejarah tentang Kerajaan Siak yang ditulis pada masa kolonial akan berbeda dengan sejarah Kerajaan Siak yang ditulis pada era kemerdekaan Sama halnya sejarah Kerajaan Siak yang ditulis pada era Orde Baru akan berbeda dengan sejarah kerajaan tersebut yang ditulis pada masa reformasi dan otonomi daerah.

Di antara sekian banyak literatur tentang Kerajaan Siak, kami mengambil satu saja untuk dicantumkan di sini, yaitu *Nota Omtrent Het Rijk van Siak* karya H.A. Hijmans van Anrooij (1885). Karya ini bukanlah karya yang belum pernah sama sekali dikutip dan dirujuk oleh penulis tentang Kerajaan Siak.¹ Informasi yang terdapat di

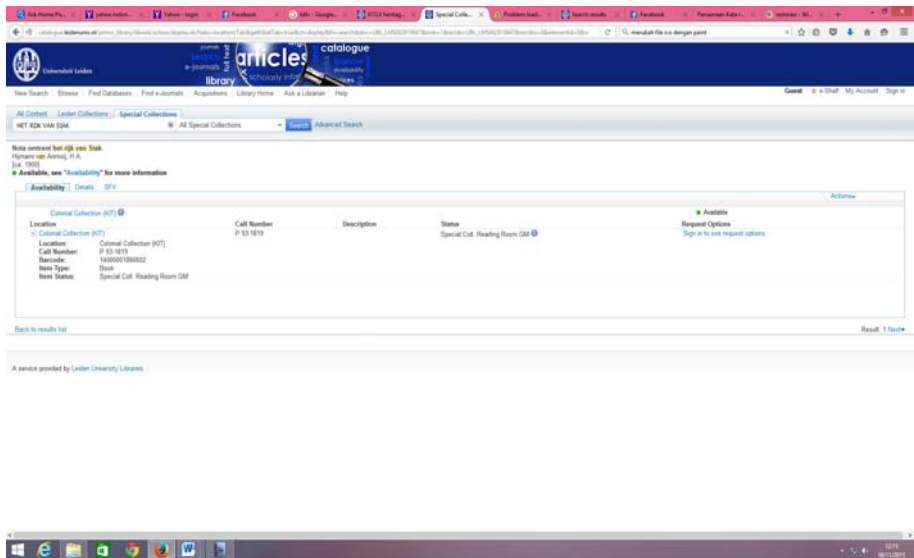
¹Buku berjudul *Sejarah Riau* dengan editor Mukhtar Lutfi dan kawan-kawan. Terbit pertama kali oleh Setwilda Tingkat I Provinsi Riau pada tahun 1977 dan direproduksi tahun

dalam het Rijk van Siak ini sangat berharga. Namun sayangnya buku ini tidak menjadi buku wajib bagi setiap penulisan sejarah Kerajaan Siak. Mungkin diantara penyebabnya adalah bahwa orang kesulitan mendapatkan sumber dan atau sulit memahami sumber karena ditulis dalam bahasa Belanda abad ke-19.

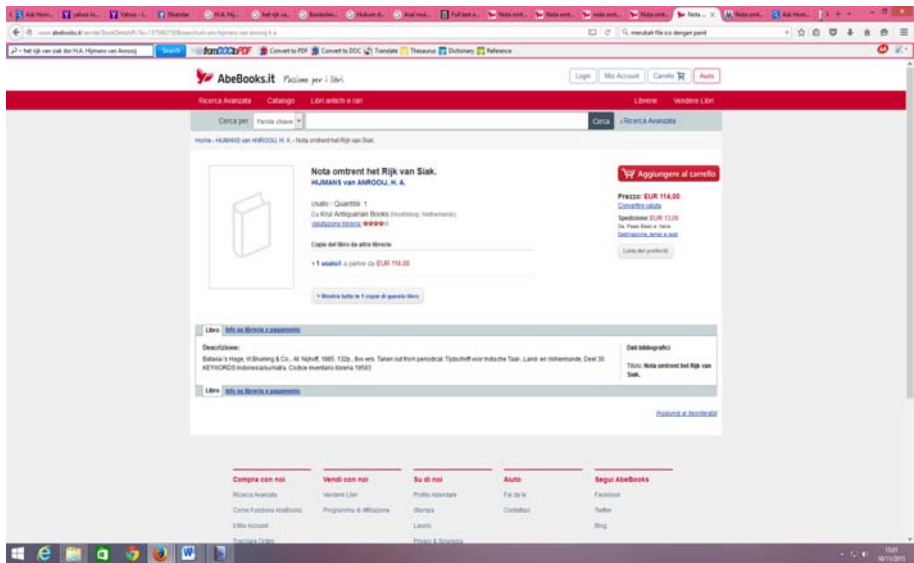
Nota Omtrent hert Rijk van Siak adalah sumber sejarah tentang Kerajaan Siak yang dikategorikan sumber kolonial pada abad ke-19. Sumber ini ditemukan dalam bentuk copy. Sumber ini terdapat di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional dan KITLV di Jakarta dan di Leiden. Sumber yang berasal dari Universitas Leiden Belanda tercatat secara online dengan identitas call number (P 93-1819), status (special collection, reading room); location (colonial collection); dan item type (book).



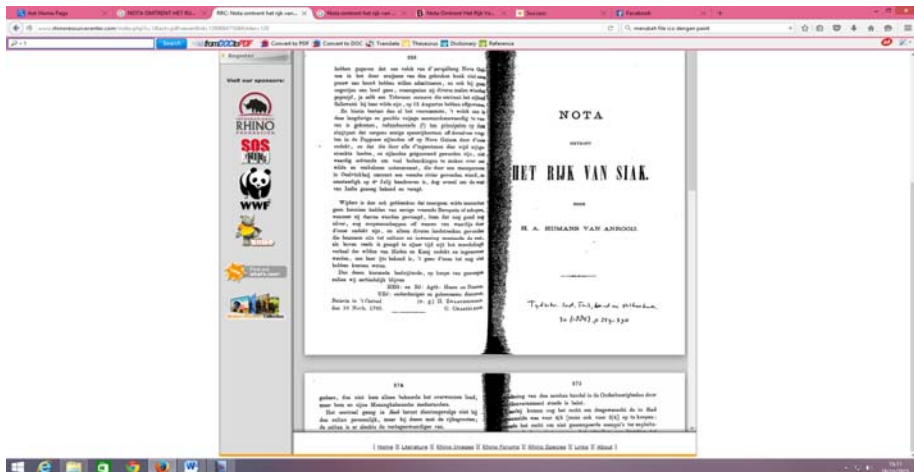
1999. Sesuai dengan judulnya, buku ini berisi paparan tentang sejarah Riau sejak zaman prasejarah, zaman kerajaan-kerajaan Melayu, masa kolonialisme Barat, kebangkitan nasional, revolusi kemerdekaan, pemulihan kedaulatan, dan Riau sebagai provinsi yang masih meliputi Provinsi Kepulauan Riau. Untuk bagian Kerajaan Siak, buku Sejarah Riau telah menjadikan het Rijk van Siak sebagai rujukan utama.



Sumber tersebut dapat juga diakses AbeBooks.it sebagai berikut.



Tampilan dari hasil pencarian dari AbeBook.it sebagaimana tertera di bawah dalam keadaan tidak bersih dan setiap halaman terdapat bukti copy.



Nota Omtrent Het Rijk van Siak karya H.A Hijmans van Anrooij dalam versi copy dari cetak yang dipublikasi melalui *TBG*, XXX, tahun 1885 juga terdapat dalam koleksi pribadi. Salah satunya adalah koleksi O.K Nizami Jamil. Menurut penuturan O.K. Nizami Jamil yang mantan Kakanwil Dikbud era Gubernur Riau Soeripto ini, copy *Het Rijk van Siak* yang menjadi koleksinya berasal dari tokoh masyarakat Pekanbaru, Kaim Said.

Desiminasi melalui penerjemahan dan publikasinya dilakukan agar sumber dalam bahasa Belanda tersebut bisa mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Tidak semua orang mudah memahami suatu teks dalam bahasa Belanda, walaupun ada mesin translater *Google*. Oleh karena itu alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia menjadi perlu. Dalam konteks alih bahasa ini, kami mendapat bantuan penting Dr. Harto Juwono, M.Si dari Universitas Indonesia.

Nota Omtrent Het Rijk van Siak atau catatan tentang Kerajaan Siak adalah karya H.A. Hijmans van Anrooij. Buku ini dicetak dan diterbitkan melalui *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land, en Volkenkunde (TBG)*, XXX, tahun 1885.

Buku ini merupakan karya terbaik dan penting serta menjadi sumber primer dan sumber utama untuk sejarah Kerajaan Siak pada abad ke-19. Hijmans van Anrooij menjadi saksi sezaman untuk sejumlah paparan dan informasi yang disampaikannya. Karya ini telah

menjadi rujukan berbagai karya tentang Kerajaan Siak yang datang belakangan. Ada yang bersifat umum dan populer seperti *Sejarah Riau*, ada juga yang bersifat ilmiah akademis, seperti disertasi karya Amir Luthfi (1990) dan Wilaela (2012). Van Anrooij memaparkan berbagai aspek tentang Kerajaan Siak dengan menggunakan sumber sebelumnya dari Residen E. Netscher. Bahkan ia tak segan-segan menggunakan sumber tradisional, seperti hikayat-hikayat dan legenda setempat.

Untuk kutipan legenda, van Anrooij cukup berhati-hati. Kisah musang cabu, misalnya, ia seakan-akan memberi peringatan kepada kita bahwa sekalipun ia paparkan tentang binatang tersebut berikut batu berharga yang terdapat di dalam anggota tubuhnya, tetapi van Anrooij mengakui belum pernah bertemu dengan orang yang pernah menyaksikan musang cabu itu. Pembaca dapat mengambil kesimpulan sendiri bahwa untuk kredibilitas kisah tersebut perlu penelitian lebih lanjut. Sebagai catatan, pengambilan sumber kepada kisah-kisah dalam hikayat atau legenda sebagaimana yang dilakukan van Anrooij tersebut bukanlah hal yang “tabu” dalam sebuah laporan. Van Anrooij mengambil kisah absurd Sultan Mahmud Syah dan Engku Pong Putri Laksamana yang kemudian melahirkan Raja Kecil pendiri Kerajaan Siak. Kisah ini tentu bersumber dari hikayat. Adapun pengambilan sumber untuk legenda, antara lain tatkala van Anrooij bercerita tentang hewan larangan yang menjadi hak milik Sultan Siak dan apabila ditemukan oleh penduduk, maka harus diserahkan sebagai upeti kepada sultan.

Masih terkait dengan penggunaan sumber, van Anrooij mengakui bahwa ia tidak bisa menelusuri literatur-literatur yang terkait langsung dengan penduduk Siak. Bahkan sumber yang bisa ia telusuri hanya merupakan rangkuman dari beberapa pernyataan pihak lain yang disusun di Siak, yang kemudian dikaitkan dengan pernyataan lain serta dianalisis. Banyak hal masih harus dijelaskan dan memerlukan pembuktian. Dengan kata lain, apa yang dipaparkannya memerlukan perbaikan dan penambahan. Van Anrooij menyatakan bahwa faktor kondisi Siak yang tidak kondusif saat itu, antara lain belum terlindunginya hak-hak penduduk dengan pemerintahan yang buruk dan sewenang-wenang di satu sisi,

dan diwarnai dengan penderitaan di sisi lain mengarah pada percampuran unsur-unsur baik dan buruk, sah atau tidak, yang hampir tidak bisa dibedakan.

Van Anrooij juga mengandalkan hasil observasi langsung dan laporan dari pemerintah Belanda selain E. Netscher. Yang menarik adalah, ia juga berani memasukkan cerita rakyat atau *rerasan* yang dia sendiri belum pernah bertemu dengan saksi mata. Kelebihan dari karyanya adalah ia menjadi sumber sejarah kategori primer untuk Kerajaan Siak dalam berbagai aspek, antara lain tentang kewilayahan atau pembagian tanah di Kerajaan Siak dan kependudukan berikut hak dan kewajiban penduduk yang mengikuti pembagian tanah. Ada juga pemaparan tentang Tanah Putih, Bangko dan Kubu serta Tapung. Nota van Anrooij ini merupakan hasil penelitian awal tentang kondisi zaman pada tahun 1885.

Isi Nota van Anrooij dapat dibagi menjadi tiga bagian: (1) tentang sejarah Kerajaan Siak; (2) Pembagian Wilayah Kerajaan Siak; (3) Unsur-Unsur Penduduk Siak; (4) Tapung, Tanah Putih, Bangko dan Kubu. Semua bagian ia uraikan dengan panjang lebar dan lengkap yang ia sandarkan kepada laporan E. Netscher.

Van Anrooij memulai *Nota Omtrent Het Rijk van Siak* dari tinjauan sejarah Kerajaan Siak yang tidak terlepas dari Kerajaan Gasib (abad ke-14-15). Kerajaan Gasib memiliki wilayah hingga Tapung Kanan sampai ke Bukit Suliki dan Bukit Langa hingga sampai perbatasan Kerajaan Minangkabau. Namun untuk daerah pantai, tidak dapat dipastikan sejauh mana batas kekuasaan Gasib. Van Anrooij mengakui bahwa tidak banyak sumber sejarah masa lalu Siak yang dapat diketahui, bahkan sumber legenda pun langka.

Selanjutnya dikisahkan bahwa Kerajaan Gasib ditaklukkan dan dihancurkan oleh Aceh karena bantuan dari pengkhianatan keturunan orang Pandan. Sebagian dari orang Pandan tinggal di Sungai Mandau. Sementara sebelumnya mereka termasuk *pertalangan* antara Sungai Siak dan Sungai Kampar, di mana juga masih ada kelompok lain yang menetap di sana.

Adat yang berlaku sejak Kerajaan Gasib adalah adat kemenakan dimana pewarisan dilakukan menurut garis keturunan perempuan. Garis laki-laki merupakan adat baru yang didatangkan

dari Johor. Setelah penguasaan raja Gasip oleh orang-orang Aceh, daerah Gasib dihancurkan dan ditinggalkan begitu saja. Kemudian pengaruh Johor masuk ke Siak dan hanya sampai di Sungai Kuala Mandau. Seorang syahbandar (abad ke-17) diangkat oleh raja Johor di Sabah Aur, mewakili raja Johor untuk memungut cukai. Daerahnya terbentang di sepanjang kedua aliran sungai itu, di sebelah kanannya Sungai Buntan dan sebelah kirinya Sungai Mandau. Adat kamanakan digantikan dengan adat yang diwariskan menurut garis laki-laki. Dinasti Johor diusir dari Siak oleh Raja Kecil pada tahun 1717 dan berdirilah Kerajaan Siak pada 1723. Raja Kecil adalah keturunan Raja Johor Sultan Mahmud dengan selirnya Ence Apong, putri Laksamana. Untuk informasi lebih lanjut tentang Kerajaan Siak pada masa awal, Anrooij menawarkan untuk merujuk kepada laporan E. Netscher dalam karyanya yang berjudul "Orang-orang Belanda di Siak dan Johor" (dimuat dalam VBG, jilid XXXV).

Dalam laporan Netscher, nasib Raja Kecil diuraikan panjang lebar sampai dia menduduki tahta Siak. Namun Anrooij tidak berpanjang lebar sekalipun ia tetap merujuk E. Netscher tentang sejarah awal Kerajaan Siak. Van Anrooij juga merujuk ke Hikayat Melayu atau Hikayat Bugis tentang Raja kecil dan hubungan Johor dengan Siak. Kisah tentang Raja-raja Siak dipaparkan secara kronologis dan masih mengutip Netscher. Dari kisah Anrooij inilah menjadi rujukan kisah Kerajaan Siak dalam *Sejarah Riau* yang disusun oleh Suwardi MS dan kawan-kawan dan diterbitkan sejak tahun 1977 oleh Sekwilda Propinsi Riau. Dapat dikatakan bahwa Residen E. Netscher berjasa dalam menyambung tali sejarah Kerajaan Siak dengan Johor dan jasanya diperjelas oleh van Anrooij dalam *Het Rijk van Siak*.

Hijmans van Anrooij juga menjelaskan status penduduk, baik pribumi maupun pendatang atau penduduk yang datang belakangan dari berbagai tempat. Setelah penegakan kekuasaan Pemerintah Belanda di Siak, ribuan orang meninggalkan tanah asalnya dan mengungsi baik ke seberang di Malaka maupun ke Pulau Bengkalis.

Sumber daya alam yang menjadi penghasilan utama yang diterima oleh Sultan Siak dipaparkan Van Anrooij dengan rinci tapi penuh penasaran. Beberapa di antaranya ia paparkan bahkan

sekalipun belum pernah ia saksikan secara langsung atau bertemu dengan saksi. Kekayaan milik sultan adalah: cukai ekspor-impor di sepanjang berbagai aliran sungai di kerajaannya, pajak atas perikanan trubuk, cukai pengangkutan untuk orang asing yang lewat, debet candu dan garam serta pemborongannya, kerja wajib, penyetoran wajib, pungutan uang dan perdagangan *serahan* di beberapa bagian daerah Siak, tetapi terutama di sebelah barat. Empat penghasilan pertama itu diambil alih oleh pemerintah dengan ganti rugi, sementara pelaksanaan perdagangan *serahan* di daerah taklukkan dicegah oleh pemerintah, hak untuk membeli lilin sebanyak $\frac{4}{5}$ (kadang-kadang juga $\frac{3}{4}$) yang dikumpulkan di Siak. Begitu juga ada hak untuk menyerahkan eksploitasi sungai-sungai yang tidak bertujuan kepada pihak ketiga; pemberian ijin untuk menebang kayu dari hutan yang tidak dikelola; seperti juga penyerahan petak-petak tanah liar kepada perusahaan industri untuk dieksplorasi.

Barang larangan atau larangan raja termasuk komoditi yang hanya merupakan hak milik raja dan dikumpulkan oleh orang-orang untuk diserahkan kepada raja, bukan bersifat penghasilan, melainkan sebagai upeti, yaitu gading gajah, cula badak, guliga, gaharu merupa, cula tupei, taring napoh dan musang cabu serta kamper. Deskripsi tentang barang larangan tersebut dijelaskan van Anrooij dengan baik.

Berikutnya adalah gambaran sultan yang menjadi wali di kerajaannya, sebagaimana juga yang terjadi dengan sultan-sultan lain di wilayah masing-masing. Jadi bila Sultan Siak menjadi wali, di sana dia menjadi raja daerahnya. Tetapi sultan tidak memegang perwalian itu sendiri melainkan wewenangnyanya diserahkan kepada para imam dan khatib dari berbagai mesjid (*wilayat*). Mesjid ditemukan di Siak, Pekanbaru, Bukitbatu, Buru Bakul, Sekat Bakau, di kampung-kampung di pulau Bengkalis, di Merbau Tebing Tinggi, Tanah Putih, Kubu dan Bangko. Setiap mesjid memiliki penghasilannya sendiri. Pajak bagi keagamaan mencakup perawatan sebuah bangunan yang sangat primitif, yang disebut *mesigit*, sementara hasilnya digunakan untuk membayar para petugas agama ini.

Hujmans van Anrooij menguraikan kondisi dalam negeri di Siak, antara lain adanya perbudakan dan status anak semang. Perbudakan lenyap sebagai akibat pengaruh pemerintah kolonial Belanda yang melarang perdagangan budak dalam Traktat Siak tahun 1858. Jumlah budak yang dilaporkan Van Anrooij tidak lebih dari 30 orang. Semuanya berasal dari Batak atau Siam dan merupakan keturunan dari budak-budak yang diangkut sebelumnya. Budak-budak lama telah hilang, digantikan dengan anak semang. Deskripsi anak semang juga dikisahkan tidak sedikit di dalam Nota ini.

Dalam bab II dari Nota tersebut, Van Anrooij menceritakan tentang pembagian wilayah Kerajaan Siak. Ketika berbicara tentang Kerajaan Siak dalam aspek wilayah, van Anrooij mengaku ada yang membingungkannya. Hal ini terjadi karena sebagian orang menyatakan bahwa wilayah Kerajaan Siak hingga Panei, sementara yang lain menganggap wilayah Siak tidak termasuk daerah Tanah Putih, Kubu dan Bangko, Tapung Pekanbaru dan Mandau. Yang terakhir ini menurut Van Anrooij tidak benar. Ia menjelaskan alasan-alasan bahwa sultan Siak memang berdaulat di daerah-daerah itu. Adapun tanah Siak yang sebenarnya menurut van Anrooij adalah bisa terdiri atas: daerah 4 penghulu Siak, Mandau hilir, daerah *batin* Melayu di sepanjang Sungai Siak serta *batin* Prawang; *Pertalangan*, Tiga *luhak* (lurah), Tiga Kampung, Teratak Buluh, Daerah Penghulu Domei (Laksamana Bukit Batu), Daerah *batin* di sepanjang pantai di selatan muara Sungai Siak, daerah Suku Sakei di Mandau Hulu, Daerah yang ditinggalkan atau tidak dihuni, dan pulau-pulau.

Dalam sub unsur-unsur penduduk Siak, van Anrooij memaparkan kondisi penduduk Siak pada saat itu yang terdiri atas berbagai bagian. Pembagian masyarakat terkait dengan daerah asal dan dengan posisi sosial. Status orang Minang cukup tinggi di Kerajaan Siak. Sebelum kedatangan Raja Kecil di Siak, ada banyak orang Minangkabau tinggal di sana. Para penghulu ini ada yang tinggal di Senapelan (kemudian disebut Pekanbaru). Banyak orang Johor yang bermukim di Siak setelah kerajaan ini diletakkan di bawah perlindungan raja Johor. Mereka lebih banyak bercampur dengan penduduk Siak daripada dengan orang Minangkabau, yang menduduki posisi khusus.

Kerajaan Siak dikuasai oleh Raja Kecil di Johor, terutama atas bantuan orang-orang Minangkabau yang banyak tinggal di sana, dan dengan demikian wajar bila orang Minangkabau memiliki hak atas pampasan perang. Tetapi mereka tidak memperoleh tanah. Tanah dikuasai penduduk yang telah menggarapnya sebelum kedatangan Raja Kecil. Raja Kecil tidak hanya percaya bahwa orang-orang pedalaman yang tinggal di Siak tetap berada di bawah pimpinan mereka sendiri, yang terlepas dari kekuasaan raja tetapi para kepala adat ini bersama raja dianggap sebagai mewakili kekuasaan. Jika raja merupakan wujud dari kerajaan, mereka menjadi tiang kerajaan (sebagai tiang yang menopang bangunan kerajaan). Di luar kerajaan mereka tidak berarti apapun, tetapi sebaliknya kerajaan ini tidak bisa ada tanpa mereka.

Van Anrooij juga menganalisis bahwa sekalipun kondisi warga keturunan Minangkabau di Siak lebih baik dari masyarakat lainnya, tetapi mereka bukan orang Siak. Para kepala adat sadar bahwa mereka bukan raja, namun hubungan para kepala adat dengan kawula mereka bersifat patriakal. Kawula mereka juga bukan hamba atau rakyat seperti yang dilakukan Sultan, melainkan anak buahnya. Sebaliknya raja Siak berasal dari daerah lain. Mereka tidak berasal dari kalangan penduduk setempat dan harus menaklukkannya. Kawula mereka bukan rekan sesama suku melainkan taklukkannya. Jarak yang memisahkan raja Melayu dari kawulanya ini sebagai akibatnya di sini sangat besar, dan ini terjadi ketika Said menduduki tahta Siak. Penjelasan ini cukup memadai untuk menunjukkan bahwa di Siak ada dua kategori orang yang saling berbeda: kawula Sultan langsung dan warga keturunan Minangkabau atau anak empat suku.

Tapung menurut Van Anrooij tidak termasuk daerah Siak asli. Tapung adalah taklukan Siak seperti juga disebutkan dalam traktat tahun 1858. Tapung *beraja ka Siak, bertuwan ke Kota Intan*. Menurut konsep ini, raja Kota Intan di Tapung memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada Sultan Siak. Pada kenyataannya, kondisi ganda ini tidak begitu menyulitkan karena baik Kota Intan maupun Siak tidak menarik keuntungan dari Tapung.

Dalam Nota ini van Anrooij telah menyebutkan bahwa daerah Tanah Putih, Bangko dan Kubu bukan merupakan bagian dari Siak, tetapi sejak Raja Alam putra sulung Raja Kecil, daerah-daerah ini tunduk kepadanya yang juga memiliki keunikan bahwa mereka mengganggu Sultan Siak sebagai raja setempat.

Ini berlangsung sampai Said Ali pada tahun 1791 menduduki tahta Siak lewat kudeta. Raja yang paling energik yang dimiliki oleh Siak ini berusaha mempertahankan ketenangan di daerahnya dan menindas daerah taklukkan di sebelah barat dengan kekuatan senjata Siak. Pada ekspedisinya, dia juga menaklukkan Tanah Putih dan menegaskan pengaruhnya di sana; dia tampil sebagai Sultan Siak. Bagi Said Ali ada alasan memadai untuk tampil di muara sungai Rokan, dengan cara yang paling utuh mendapatkan penghormatan dari kawula penduduk di Tanah Putih, Kubu dan Bangko. Sejak saat ini Siak menjadi penguasa daerah taklukkannya, yang selalu dianggap sebagai apanage Sultan sendiri, yang bisa menerima penghasilan dari sana atau menyerahkan kepada anggota keluarganya.

Penduduk Tanah Putih, Bangko dan Kubu pada umumnya tidak sejahtera, dan sangat miskin. Perkiraan Van Anrooij ini sebagai akibat sedikitnya energi penduduk. Raja memang menjadi wali di tiga daerah tersebut sebagai simbol dari martabat raja. Tetapi, Raja menyerahkan wewenang *wilayat* kepada imam dan katib di mesjid.

Penduduk Tanah Putih dibagi dalam empat suku yaitu Melayu Besar, Melayu tengah, Mesah dan Batu Hampar. Setiap suku memiliki seorang datuk sebagai pimpinannya, dan kembali dibedakan sebagai *induk*, yang memimpin sebuah *tungkat*. Tiga suku pertama disebut memiliki *utan tanah*; Batu Hampar tidak memilikinya. Mungkin suku ini pada mulanya terdiri atas kaum pendatang. Sebagai akibatnya mereka tidak memiliki *pancong alas* maupun *hasil tanah*. Sebaliknya mereka harus membayarnya kepada suku-suku lain, apabila mereka mengumpulkan hasil hutan atau membuka ladang.

Penduduk Bangko seluruhnya terdiri atas sebuah suku, yang merupakan keturunan Aceh. Tipe Aceh masih tampak di sejumlah warga Bangko. Kepala Bangko adalah seorang datuk, yang dalam

pemerintahannya dibantu oleh 6 orang *tongkat*. Penduduk memenuhi kebutuhannya terutama dengan membuka tanah ladang dan menangkap udang, yang dijumpai dalam jumlah besar di pantai daerah itu.

Sayangnya Nota ini tidak menggambarkan keadaan pendidikan di Kerajaan Siak pada waktu itu. Van Anrooij melewati laporan sosial-budaya seperti pendidikan karena memang pendidikan (modern) belum diperkenalkan di Siak pada waktu. Pendidikan modern diperkenalkan pemerintah Belanda di Kerajaan Siak pada awal abad ke-20, yaitu dalam bentuk *volkschool*, *de tweede school*, *Hollands Inlandsch School* sebagai sekolah kelas satu untuk anak-anak bumi putera dari kelas menengah ke atas. Namun, bagaimana gambaran kedudukan kadhi dan kedudukan imam masjid dipaparkan dengan baik. Sehingga, kita dapat membayangkan bagaimana seorang imam masjid merupakan wakil sultan Siak yang profesional karena memiliki gaji atau pendapatan.

Nota Omtrent Het Rijk van Siak karya H.A. Hijmans van Anrooij (1885) adalah salah satu sumber sejarah Kerajaan Siak yang sangat berharga dalam penyusunan sejarah Kerajaan Siak pada abad ke-19. Tim penyusun *Sejarah Riau* telah menggunakannya sebagai referensi penuh untuk bagian Kerajaan Siak. Namun, tidak semua karya ilmiah telah menggunakan secara langsung *Nota Omtrent Het Rijk van Siak* sebagai sumber penulisan. Umumnya mereka menukil ke *Sejarah Riau*. Dalam penyusunan Notanya, van Anrooij sendiri banyak mengandalkan laporan-laporan dari Residen E. Netscher sambil ia mengeluh tentang keterbatasan sumber dari “luar” Siak Keterbatasan sumber tersebut membuat van Anrooij mengandalkan laporan E. Netscher dan menyandarkan laporannya kepada sumber tradisional seperti hikayat-hikayat dan legenda. Sumber *volklоре* seperti *rerasan* atau cerita rakyat setempat dan hasil observasi langsung juga dimasukkan sebagai sumber karyanya.

Untuk memudahkan berbagai pihak dalam mendalami karya van Anrooij tersebut, telah dilakukan alihbahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia yang merupakan maksud dari penerbitan ini. Semoga bermanfaat adanya, amin.***

BAGIAN KEDUA

NOTA TENTANG KERAJAAN SIAK

I

Tinjauan Sejarah

Tentang sumber sejarah masa lalu Siak tidak banyak yang diketahui, bahkan termasuk juga dalam legenda. Orang hanya mengetahui bahwa pada abad XIV atau XV, apa yang disebut Siak sekarang ini tidak semuanya berada di bawah kekuasaan raja Gasip. Raja-raja bermukim di tepi Sungai Gasip, anak sungai pertama yang mengalir dari aliran kanan Kuala Mandau untuk bergabung dengan Sungai Siak.

Kerajaan Gasip pasti sangat berkuasa saat itu. Ini bukan hanya terbukti dari sisa-sisa peninggalan kraton yang terletak di dalam hutan dekat Sungai Gasip, meskipun telah berlalu berabad-abad dan (menurut legenda rakyat) beberapa benda yang dahulu dimiliki oleh raja-raja seperti senjata, nampian dan sebagainya kini bisa terlihat mengapung di sungai ini. Yang lebih penting lagi, *Bandahara* Batu Gajah memiliki sebuah sarung keris yang mahal dan dari Tandun (keduanya di Tapung Kiri Hulu) masih ada sebuah perisai di mana mereka semua mengetahui bahwa pada masa lalu benda-benda ini dihadiahkan oleh para leluhur mereka oleh raja Gasip sebagai tanda kebesarannya.

Para warga Tapung Kanan juga masih memiliki sebuah kisah. Menurut kisah itu, Tapung Kanan juga pernah berada di bawah kekuasaan Gasip. Dari situ orang bisa memutuskan bahwa raja-raja Gasip menjalankan kekuasaan sampai Bukit Seligi dan Bukit Langa, hingga sampai perbatasan Kerajaan Minangkabau lama. Sejauh mana kekuasaan itu terbentang hingga pantai tidak bisa dipastikan, tetapi mungkin sampai muara Sungai Siak juga dikuasainya karena tidak

mungkin bila mereka membangun tempat tinggal di pinggiran daerah kekuasaan dan sungai Gasip tidak jauh letaknya dari laut.

Selanjutnya secara historis bisa dipastikan bahwa Kerajaan Gasip ditaklukkan dan dihancurkan oleh Aceh. Tetapi Aceh yang berkuasa hanya mampu menang karena pengkhianatan, {ini menjadi} bukti bahwa selama masa ini Gasip masih menjadi kekuatan besar. Orang-orang Aceh menurut legenda tidak berani mendekati tempat kedudukan raja-raja Gasip di sepanjang sungai dan wajib menarik diri. Jalan ditunjukkan oleh beberapa orang Pandan yang menjadi taklukkan raja Gasip, sehingga orang-orang Aceh bisa mencapai tujuannya lewat darat. Tetapi setibanya di jalan ini, mereka harus menyeberangi sungai (atau melayarinya), yang juga mereka lakukan, dan sungai ini sejak itu sampai sekarang disebut Sungai Buwatan.

Dari banyaknya kelokan sungai itu dan dari banyaknya air yang dialirkannya, bisa disimpulkan bahwa sungai itu tidak digali tetapi dibuat agar bisa dilayari oleh orang-orang Aceh. Jelas apapun keterangannya menurut legenda rakyat, keturunan orang Pandan yang melakukan pengkhianatan terhadap rajanya tidak boleh tinggal di sekitar Sungai Gasip, tanpa menemukan kematian mendadak ditelan oleh ombak, suatu nasib yang juga dialami oleh setiap orang Aceh.

Kisah pengkhianatan orang Pandan ini pasti memiliki muatan sejarah. Dengan demikian suatu kenyataan bisa dijelaskan bahwa sekarang ini sebagian dari orang Pandan tinggal di Sungai Mandau, sementara sebelumnya mereka termasuk *pertalangan* antara Sungai Siak dan Sungai Kampar, di mana juga masih ada sebagian lain yang tinggal. Orang Pandan yang tinggal di Sungai Mandau adalah keturunan mereka yang telah mengkhianati raja Gasip dengan membantu orang Aceh. Selama pemerintahan raja-raja Gasip, di kerajaannya adat kemanakan telah berlaku. Ini adalah adat yang melestarikan keluarga lewat garis keturunan perempuan, dan hak-hak keluarga jatuh sebagai warisan dari paman kepada anak saudaranya.

Akan salah bila menduga bahwa di Siak pada mulanya sejak serbuan Raja Kecil dan pasukan bantuan Minangkabau, adat ini diterapkan olehnya dan pada mulanya pewarisan dilakukan menurut

garis keturunan pria. Ini juga tidak benar. Hanya sejauh pengaruh Johor berlaku, yaitu di daerah Empat Penghulu Siak sekarang ini atau sampai ke Kuala Mandau, orang menemukan garis keturunan ini secara lurus dan dengan demikian merupakan sesuatu hal baru yang didatangkan dari Johor. Sangat menarik bila kaum pendatang Minangkabau yang tinggal di sini menerapkan adat lama mereka dan menggantikan adat Johor.

Pewarisan dalam garis lurus di Siak sekarang ini hanya diikuti oleh penduduk yang merupakan keturunan Johor, atau di bawah kekuasaan kerajaan itu, serta oleh kaum pendatang Minangkabau sementara penduduk asli Siak seperti pada masa raja-raja Gasip masih menganut adat kemanakan. Setelah penguasaan raja Gasip oleh orang-orang Aceh, kedudukan raja-raja ini dihancurkan dan keturunannya yang masih selamat dari perang itu dibawa serta ke Aceh. Setelah itu (mungkin tidak lama kemudian, tetapi mungkin juga jauh setelah peristiwa itu) daerah ini dihancurkan dan ditinggalkan begitu saja.

Sampai sekarang tidak ada usaha yang berhasil melacak asal-usul Siak dari raja-raja Gasip lama; mungkin nama itu masih tetap hidup di Aceh. Setelah daerah ini ditinggalkan oleh orang-orang Aceh, raja-raja Johor menguasai muara Sungai Siak, sementara tampaknya daerah pedalaman membentuk suatu persekutuan tanpa raja, seperti konfederasi Tapung yang sejak lama ada dan lebih banyak daerah di pedalaman Sumatra yang ikut serta (seperti V Kota). Dari berkas-berkas dalam arsip tua Malaka yang dikumpulkan oleh Residen Riau E. Netscher, terbukti bahwa pengaruh Johor hanya sampai di Sungai Kuala Mandau.

Apa yang kemudian terjadi juga di pedalaman? Persoalan utamanya bukan memiliki hutan luas yang tak bertuan, melainkan jalur perdagangan utama ke daerah Minangkabau di mana cukai bisa dipungut dan musuh yang berbahaya dapat muncul dalam jalur perjalanan ke Johor. Seorang syahbandar diangkat oleh raja Johor di Sabah Aur, dimana di daerah taklukan ini syahbandar mewakili raja harus memungut cukai. Dahulu seorang raja boneka Johor (mungkin seorang pangeran Johor) tinggal di Buntan. Pada pertengahan kedua abad XVII daerah itu diperintah oleh syahbandar tersebut. Daerah ini

terbentang di sepanjang kedua aliran sungai itu, di sebelah kanannya Sungai Buntan dan sebelah kirinya Sungai Mandau.

Pengaruh Johor sebaliknya pasti kuat karena jelas hanya dari sanalah di daerah yang dikuasai Johor, adat kamanakan digantikan dengan adat yang diwariskan menurut garis laki-laki. Dinasti Johor diusir dari Siak oleh Raja Kecil pada tahun 1717. Bagaimana semua ini bisa terjadi, kita bisa menemukan tulisan panjang dari sumber-sumber sejarah yang dibuat oleh Tuan E. Netscher dalam karyanya yang berjudul “Orang-orang Belanda di Siak dan Johor” (dimuat dalam VBG, jilid XXXV). Beberapa catatan sejarah di sini sebaliknya dimuat untuk lebih memahami apa yang kemudian disampaikan tentang kondisi di Siak. Pada awal abad XVII Siak masih tunduk kepada Johor. Tampak bahwa sekitar masa ini, Siak tidak lagi banyak artinya, setidaknya pada tahun 1662 tidak ada pangeran Johor lagi yang memiliki apanage di tanah ini, tetapi {hanya} diperintah oleh seorang syahbandar, jadi oleh seorang aparat.

Pada akhir abad XVII Sultan Mahmud, yang tampaknya sudah sakit-sakitan menjadi Raja Johor. Konon dia menolak perempuan, tetapi sebaliknya pada malam hari berhubungan dengan hantu perempuan. Salah satu abdi perempuannya (tidak bisa dikatakan sebagai selirnya) bernama Ence Apong, putri Laksamana, diminta memuaskan nafsu raja secara diam-diam, namun Ence Apong hanya mau membersihkan tempat tidur raja saja. Pada suatu pagi, tatkala sedang bekerja, Ence Apong menemukan bekas-bekas hawa nafsu (air mani) Sultan Mahmud, dan karena patuh kepada perintah, Ence Apong menyembunyikan apa yang dijumpainya dengan akibat tidak lama setelah itu dia hamil.

Tetapi Sultan Mahmud tidak mau menerima kelahiran anaknya yang gaib itu. Istri salah seorang bangsawannya, yaitu Magar Sri Rama, yang sedang hamil tua diperintahkannya untuk dibedah perutnya sebagai hukuman bahwa wanita itu tidak melakukan perlawanan terhadap *mangkapit* yang dipersembahkan bagi raja. Suaminya, yang memberitahu Bendahara Sri Maharaja (yang menjadi raja setelah kematian Sultan Mahmud yang disumpahi oleh Magar Sri Rama) menduduki tahta, menikam raja. Sultan Mahmud dipikul (*dijulang*) di atas pundak salah satu abdinya untuk

dibawa ke mesjid. Dari situlah dalam Hikayat Melayu, dia disebut *Marhum Mangkat Dijulang* (meninggal ketika sedang dipikul).

Laksamana memikirkan nasib cucunya, anak Sultan Mahmud yang tidak merasa aman berada di dekat raja baru itu, segera membawanya pergi dan menyerahkannya kepada Raja Negara, penguasa Singapura yang sebaliknya kembali menyerahkan anak itu kepada Raja Moar. Dari situ dia dikenal dengan nama Tuan Bujang. Oleh seorang pedagang Minangkabau yang bernama Nakhoda Malim, dia dibawa ke Palembang di mana dia mengawini putri Dipati Batu Kucing, yang disebut Ence Kecil atau Jenamal. Setelah melahirkan seorang putra, dalam sejarah dikenal sebagai Raja Alam, dia bersama pedagang itu berangkat ke istana raja Pagaruyung, di mana dia tampaknya disambut baik dan menerima gelar Yang Dipertuan Raja Kecil.

Raja Pagaruyung membantu Raja Kecil dalam maksudnya untuk menguasai tahta ayahnya, dan memberinya perintah juga kepada semua orang Minangkabau yang tinggal di Siak dan Johor agar membantunya, yang perintahnya dipahatkan pada sebuah lempengan tembaga, sementara dari setiap *luhak* (daerah) Agam (Pasisir), Tanah Datar dan Lima Puluh seorang bangsawan diperintahkan untuk mengumpulkan dan membawa kawula *luhak*-nya. Tampak bahwa Raja Kecil di pedalaman Siak tidak menemui banyak perlawanan. Penduduk yang tinggal di sana (keturunan Minangkabau) lebih banyak tunduk kepada seorang raja yang dibantu oleh Pagaruyung untuk melawan Johor daripada raja asing yang berusaha memungut cukai di kuala.

Setibanya di Sabah Aur, syahbandar Johor di sana menolak mengijinkan Raja Kecil dan pengikutnya lewat, apabila mereka tidak membayar pajak kepala yang harus disetorkan oleh setiap orang yang berlalu. Tampaknya Raja Kecil saat itu tidak memiliki uang, setidaknya terjadi perdebatan tentang pembayaran yang diminta antara dirinya dan syahbandar, di mana Raja Kecil atas dasar keturunannya menolak untuk membayar uang lewat itu. Tetapi ini tidak membantu, dan dia terpaksa membayar. Saat itu dia memotong seutar tali uncangnya yang terbuat dari emas, yang diserahkan kepada syahbandar sebagai bukti pembayaran dengan ancaman

bahwa apabila dirinya (Raja Kecil) menjadi raja di Siak dan Johor, dia akan meminum darah syahbandar itu (*uncang* adalah sejenis kantung kecil untuk menyimpan sirih, tembakau dan lain-lain). Kisah ini, yang tidak disebutkan oleh Netscher, bisa menjelaskan bahwa di Siak, kebiasaan ini sekarang tidak lagi berperan.

Dalam laporan Netscher, nasib Raja Kecil diuraikan panjang lebar sampai dia menduduki tahta Siak. Dalam tulisan ini hanya cukup disebutkan bahwa dia pada mulanya berhasil menduduki tahta Johor pada tahun 1717. Setelah itu dia menikah dengan Tengku Tengah, putri sulung Sultan yang diturunkan olehnya, tetapi yang diceraikannya demi adiknya Tengku Kemariah, yang biasanya dikenal dengan nama Mak Bongsu, kemudian sebagai Tengku Poan. Tengku Tengah kemudian menikah dengan seorang pelaut Bugis Daeng Parani dan membujuk saudara tertuanya Raja Suleiman agar bersama suaminya menurunkan Raja Kecil dari tahta. Setelah itu dia akan menjadi Yang Dipertuan Besar dan Daeng Parani diangkat menjadi Yang Dipertuan Muda.

Setelah banyak konflik dan kerusakan, Raja Kecil diusir dari Johor dan Riau dan akhirnya dia harus mengungsi ke Siak di mana dia berusaha bertahan dan tinggal di Buntan. Istrinya Tengku Kemariah juga harus ditinggalkan sehingga jatuh ke tangan musuh di Riau. Di sana wanita itu melahirkan seorang putra yang diberi nama Raja Buwang, yang kemuddian dikenal sebagai Sultan Mohamad. Raja Kecil beberapa saat setelah itu mendapatkan kembali istri dan putranya, setelah ia berhasil menebus istrinya melalui perebutan yang nekad dari tangan lawannya, seperti yang dikisahkan oleh Hikayat Melayu atau Hikayat Bugis, sesuai dengan kesepakatan ketika Raja Kecil mengucapkan janji bahwa dia tidak akan mengganggu lagi Raja Suleiman dari Johor.

Setelah beberapa saat Johor dan Siak bisa hidup saling berdampingan, masing-masing berada di bawah dinastinya sendiri. Setelah Raja Kecil menduduki tahta Siak, dia melaksanakan sumpah yang diucapkannya untuk meminum darah Syahbandar Sabah Aur. Dia memerintahkan syahbandar itu ditangkap dan menyuruh dia dibunuh untuk bisa diminum darahnya. Oleh sekelompok sahabat syahbandar dan dari lingkungan raja, hukuman tersebut diubah

sehingga syahbandar tetap selamat dan Raja Kecil bisa memenuhi sumpahnya. Dia membuat luka kecil di jarinya dan setelah itu menggunakan sedikit darah yang menetes dari luka tersebut tetapi juga menetapkan bahwa syahbandar itu dipecat dari jabatannya dan penduduk yang tunduk kepadanya menjadi persembahan bagi Raja Kecil dan kepada setiap orang penggantinya harus menyerahkan 16 orang budak. Adat yang disebut *pungut-pungutan* ini sekarang masih ada dan akan diuraikan kemudian.

Di sini tidak perlu menyampaikan lagi pandangan Tuan Netscher, bahwa Raja Kecil yang menaklukkan Siak tidak mungkin putra Ence Apong dan hanya seorang petualang yang mujur, yang telah mengakui dirinya sebagai putra Sultan Mahmud. Putra Ence Apong baru dilahirkan setelah Sultan Mahmud wafat, sementara Raja Kecil pada tahun 1717 telah menguasai Johor (jadi dalam usia 17 atau 18 tahun), terutama setelah menikah di Palembang dan menjadi seorang ayah. Setelah itu, seperti yang terbukti, cukup lama Raja Kecil tinggal di istana Pagaruyung untuk bisa mendapatkan dukungan dari raja di sana. Selanjutnya Raja Kecil yang meninggal pada tahun 1745 saat itu adalah seorang pria yang sangat tua.

Tuan Netscher menduga bahwa Raja Kecil adalah orang yang sama seperti Raja Hitam, seorang Minangkabau yang diusir dari Siak pada tahun 1685. Setelah kematian Raja Kecil, kedua putranya saling menggantikan dua kali, yaitu Raja Alam dan Sultan Mohamad (Marhum Buantan dan Mempura), sampai setelah pembunuhan yang terkenal di Pulau Guntung pada tahun 1759 (suatu tindak kejahatan yang mungkin lebih banyak disebabkan oleh ambisi Kompeni), Raja Alam pada tahun 1761 dengan bantuan Kompeni untuk ketiga kalinya menjadi Sultan, setelah Raja Ismail (putra Sultan Mohamad) yang menggantikan ayahnya setelah kematiannya pada tahun 1760, diusir.

Raja Ismail melarikan diri ke Pelalawan, di mana dia dikejar oleh Said Usman, menantu Raja Alam, yang memiliki banyak pengaruh atas perkara Siak. Akhirnya Said Usman berhasil mengusir Raja Ismail dari Pelalawan yang pada kesempatan tersebut menjadi daerah taklukkan Siak dan kemudian diserahkan sebagai apanage kepada putra Said Usman, Said Abdurrahman. Keturunan

Abdurrahman masih menguasai tahta Pelalawan. Raja Alam tetap memerintah dan meninggal di Senapelan (Pekanbaru sekarang) pada tahun 1765-1766 dan digantikan oleh putranya Mohamad Ali. Segera setelah dia naik tahta di Siak, Kompeni membangun pangkalan baru di Pulau Guntung, yang kembali dibangun setelah dibongkar pada tahun 1759, setelah Raja Mohamad dihukum karena penghianatannya dan Raja Alam didudukkan di atas tahta menggantikannya.

Sultan Ismail yang diusir oleh Raja Alam pada mulanya menemukan sumber pendapatan dari perompakan, sampai dia diangkat menjadi Sultan Siak pada tahun 1776, setelah tiga tahun sebelumnya gagal melancarkan serangan. Tetapi dia baru berhasil mendepak Mohamad Ali dari tahta Siak pada tahun 1779. Raja yang tersingkir itu tetap tinggal di negara tersebut dan bergelar Raja Muda, yang tidak menutup kemungkinan bahwa dia hanya seorang tawanan. Orang mengisahkan bahwa karena sakit jiwa, ia diasingkan dan sangat menderita karenanya. Dia meninggal di Senapelan pada tahun 1791. Raja Ismail wafat pada tahun 1781 (Marhum Mangkat di Balai) dan digantikan oleh putranya Sultan Yahya, yang masih sangat muda di bawah perwalian dari bekas sultan dan kini menjadi raja muda, Mohamad Ali. Hubungan dengan Kompeni belakangan ini {pada masa itu} sangat merosot, yang bisa lebih dijelaskan lagi.

Pemerintahan Sultan Yahya sangat dipersulit oleh gangguan kemenakan dan iparnya Said Ali, putra Said Osman, yang berakhir dengan penggulingan Sultan Yahya dari tahta Siak dan Said Ali mengangkat dirinya {sebagai sultan}. Sultan Yahya melarikan diri melalui Kampar ke Trengganu di mana dia wafat di Dungen, karenanya dikenal sebagai *Marhum mangkat di Dungen*. Sultan Said Ali adalah seorang yang rajin dan kata orang juga seorang raja yang adil, yang telah membawa Siak pada pertumbuhannya dan daerah taklukannya di sebelah barat yang ditundukkan oleh ayahnya di bawah kekuasaan Siak, menghormati kekuasaannya.

Dia menjadi pendiri Kota Tinggi yang ada di Siak, dahulu sebuah benteng kuat dan kini menjadi kompleks kuburan raja. Dia sendiri dikuburkan di sana pada tahun 1821 dan disebut *Marhum Kota Tinggi*. Said Ali bukan sultan sampai kematiannya, tetapi

menyerahkan pemerintahan atas Siak pada tahun 1810 atau 1811 kepada putranya yang dikenal sebagai Sultan Ibrahim. Pelalawan dia serahkan kepada kemenakannya Tengku Hasim, putra saudara Said Ali, Abdurrahman, yang telah berkuasa sebelumnya. Sementara Tebing Tinggi bersama pulau-pulau sekitarnya diserahkan kepada saudaranya yang lain, Said Achmad, yang lebih dikenal sebagai Tengku Busu, atau juga disebut Tengku Panglima Besar Tebing Tinggi.

Sultan Ibrahim tidak lama setelah kematian ayahnya menjadi sakit jiwa, yang mengakibatkan kemenakan dan iparnya, Tengku Mohamad, yang merupakan putra Tengku Busu dan menikah dengan saudari Sultan, Tengku Mandah, bersepakat dengan Tengku Hasim (yang bertindak sebagai Tengku Besar Pelalawan menjadi raja muda Siak), menyatakan Sultan Ibrahim turun tahta pada tahun 1827. Sementara melalui intrik-intrik istana diusahakan agar selain salah satu putra Sultan Ibrahim yang dianggap paling berhak untuk itu, putra sulung Tengku Mohamad yaitu Tengku Ismail diangkat menjadi raja Siak. Tetapi dia masih seorang anak dan terlalu muda, ketika pada kesempatan ini dia dibawa ke dalam ruang pertemuan. Saat itu usianya kira-kira baru 7-8 tahun. Ayahnya Tengku Mohamad, biasanya disebut *Marhum Besar*, menjalankan pemerintahan bagi putranya dan baru menyerahkan kepadanya ketika berusia kira-kira 20 tahun, jadi tahun 1840.

Pemerintahan Tengku Ismail tidak ditandai dengan pertumbuhan kerajaan ini dan daerah (yang semula telah ditaklukkan) Said Ali dan Tengku Mohamad (Marhum Besar) yang mulai tumbuh juga mengalami kemunduran lagi. Ini bukan hanya merupakan akibat dari sifat-sifat dan kecakapan yang kurang pada Tengku Ismail, tetapi terutama juga karena banyak sengketa intern yang melanda dinasti itu (dan penduduknya). Terutama pemberontakan Tengku Uda atau Yamtuwan Raja di Laut, ipar Tengku Ismail. Ini sangat melemahkan Kerajaan Siak, dan hanya tinggal tunggu waktu bila Tengku Uda ingin merebut tahta Siak. Tetapi dia dihalangi oleh iparnya, Tengku Putra yang kini menjadi Mangkubumi Siak (kata orang, ia sangat egois).

Daerah taklukkan di sebelah barat seperti yang diduga memanfaatkan kondisi ini untuk melepaskan diri dari kekuasaan Siak, apa yang tidak sulit dilakukan oleh mereka. Tengku Ismail saat itu bekerjasama dengan petualang Inggris Wilson, yang bersedia membantu Tengku Ismail dalam memadamkan kerusuhan di pedalaman dan mengembalikan daerah taklukkan di bawah Siak. Peristiwa selanjutnya di sini tidak ditulis. Cukup disebutkan saja bahwa Wilson segera mengalami konflik dengan Sultan sehingga tidak banyak yang diperoleh ketika Wilson akan mencoba mengusir seluruh dinasti itu dari Siak.

Dengan tujuan berunding, Tengku Ismail mengirimkan saudaranya Tengku Panglima Perang Besar ke Riau dengan maksud meminta bantuan pemerintah untuk mempertahankan kerajaannya, setelah permohonan demikian ditolak oleh penguasa Inggris di Singapura atas dasar Traktat tahun 1824. Pemerintah Belanda (yang sejak lama ingin menegaskan pengaruhnya di Siak) memberikan bantuan yang diminta dan mengusir Wilson di luar batas-batas negara itu. Setelah itu oleh Tuan Nieuwenhuijzen dan Tobias sebagai utusan pemerintah Hindia Belanda, dengan persetujuan lebih lanjut dari Gubernur Jenderal, bersama Sultan dan para bangsawan Siak dibuatlah sebuah traktat pada tanggal 1 Februari 1858, yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal dan di mana Sultan menyerahkan kerajaannya kepada pemerintah, yang menjamin hak-haknya atas daerah taklukkannya.

Dari sejarah terakhir Siak, di sini masih bisa disebutkan bahwa Tengku Ismail pada tahun 1864 karena sakit jiwa diturunkan dan digantikan oleh saudara mudanya Tengku Syarif Kasim, Sultan sekarang ini yang saat itu menjadi perdana menteri. Putra sulungnya Tengku Putra, dahulu Raja Muda, karena tidak patuh dipecat dari jabatannya dan dibuang, sementara Tengku Panglima Perang Besar telah meninggal. Tengku Putra atas permohonan saudaranya yaitu Sultan sekarang ini setelah kenaikan tahtanya menerima pengampunan dan kini menduduki jabatan sebagai Mangkubumi.

Dari gambaran sejarah singkat di atas, yang diperlukan untuk memahami kondisi sekarang ini di Siak, terbukti bahwa baik keluarga raja dan para pengikutnya maupun IV Suku semuanya

adalah bukan penduduk asli sehingga tidak ada hak milik tanah yang diserahkan kepada mereka. Ketika Raja Kecil menguasai Siak sebagai Sultan Johor, tanah dikuasai oleh penduduk pribumi dan dia tetap tunduk. Semua pelanggaran yang terjadi atas hak milik itu dengan demikian bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Contohnya juga bisa diketahui dalam sejarah Siak, tatkala penduduk pribumi bangkit melawan pelanggaran demikian.

Setelah Pemerintah Belanda mengukuhkan kedudukannya di Siak, perlawanan demikian tidak pernah terjadi. Penduduk tetap berada di bawah pemerintahan Sultan {sementara para pejabat pemerintah karena sifat posisinya tidak begitu berpengaruh pada kehidupan orang pribumi} untuk bisa melindungi hak-hak penduduk. Suatu akibat dari kondisi ini adalah bahwa pengajuan keberatan kepada aparat pemerintah sering sia-sia, tetapi tindakan berbahaya akan muncul bagi pengadunya karena toh dia (menghadapi apa yang terjadi akibat keluhannya) setelah itu kembali diserahkan kepada wewenang kepala adatnya, yang biasanya akan menuntut pembayaran berat darinya.

Satu-satunya yang masih tersisa pada penduduk ketika mereka tidak mau tunduk kepada rezim yang keras ini adalah meninggalkan daerah. Banyak orang memilih alternatif ini dan menurut kata-kata orang di Siak, sejak penegakan kekuasaan kita {Pemerintah Belanda} di sana, ribuan orang meninggalkan tanah asalnya dan mengungsi baik ke seberang di Malaka maupun ke Pulau Bengkalis. Dari sini terbukti bahwa penduduk pribumi tidak memiliki kecurigaan terhadap pemerintah atau para pejabatnya. Oleh beberapa tokoh berpengaruh di Siak jaminan diberikan bahwa apabila pemerintah lebih banyak terlibat dalam pemerintahan tradisional, sebagian besar mereka yang mengungsi akan kembali ke kampung halamannya.

Sultan sendiri seperti dahulu tidak pernah menggunakan tenaganya untuk mempertahankan posisinya, baik di dalam maupun di luar, ketika mengetahui bahwa pemerintah telah ada di sana untuk membantunya jika diperlukan, sehingga dia kini tidak lagi perlu memperhatikan kawulanya yang kurang beruntung seperti dahulu. Sungguh mengherankan bahwa dari posisi yang menguntungkan ini

tidak ada penyalahgunaan kekuasaan kecuali apa yang sampai sekarang terjadi. Tampaknya orang sangat sering menekankan kekuasaan raja di sebuah negara Melayu Islam dan menunjuknya sebagai seorang despot tak terbatas, berkuasa mutlak atas kehidupan, kematian dan atas harta benda kawulanya, secara rutin melakukan perjalanan menghibur diri dan jarang diarahkan oleh pikiran yang sehat.

Kenyataannya jelas seorang despot demikian tidak mungkin lagi bertahan. Raja Melayu harus harus menghormati aturan-aturan yang membatasi kekuasaannya. Telah jelas bahwa tergantung pada pribadi raja dan pengaruh lingkungannya lah kemana dia akan melangkah. Penyebab dari semua penderitaan yang kadang-kadang menyebar ke seluruh wilayah Melayu terletak di sini. Tidak ada lembaga adat yang teratur dan bagaimana cara melaksanakannya. Sultan Siak sebagai raja telah memegang pemerintahan atas negaranya baik dalam arti duniawi maupun batin. Tetapi dia bukan hanya memerintah kawulanya secara langsung. IV Suku berada di bawah para kepala adatnya sendiri, yang memegang suatu otonomi dan masih tetap dipertahankan.

Ini merupakan akibat dari cara bagaimana Siak tetap menjadi kekuasaan Raja Kecil dan para penggantinya. Dia bukan hanya merampok kerajaan ini tetapi bersama para pengikutnya yang diberikan kepadanya oleh raja Pagaruyung, telah berubat banyak bukan hanya demi keuntungannya atas tanah yang ditaklukkan ini tetapi juga dengan rekan-rekannya dari Minangkabau. Kekuasaan pusat yang terletak di Siak sebagai akibatnya bukan berada di bawah sultan pribadi melainkan di bawah Sultan bersama para bangsawannya; sultan hanya menjadi wakil.

Aturan-aturan yang menyangkut kerajaan ini (seperti misalnya pelepasan hak-hak kedaulatan atas sebagian dari daerah itu) karenanya perlu dibuat oleh Sultan bersama para bangsawannya, jika ingin dianggap sah. Apa yang dinikmati oleh para *datuk* dari IV Suku melalui hasil tanah ini (apa yang lebih sedikit di Siak) tidak bisa dianggap sebagai gaji; ini merupakan andil yang sah mereka terima. Sultan yang dibantu oleh Mangkubumi (dulu raja muda) sebagai utusan dan wakilnya dalam pemerintahan, telah mengeruk sebagian

besar andil pendapatan negara, sementara dia masih tetap memiliki beberapa hak istimewa yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai raja (termasuk *barang larangan* atau *larangan raja*); suatu prinsip yang berlaku bukan hanya di Timur, tetapi juga berlaku di semua kerajaan di Barat (meskipun bentuknya berbeda).

Penghasilan utama yang diterima oleh Sultan Siak adalah: cukai ekspor-impor di sepanjang berbagai aliran sungai di kerajaannya, pajak atas perikanan trubuk, cukai pengangkutan untuk orang asing yang lewat, debet candu dan garam serta pendorongannya, kerja wajib, penyeteroran wajib, pungutan uang dan perdagangan *serahan* di beberapa bagian daerah Siak, tetapi terutama di sebelah barat. Empat penghasilan pertama itu diambil alih oleh pemerintah dengan ganti rugi, sementara pelaksanaan perdagangan *serahan* di daerah taklukan dicegah oleh pemerintah. Pada saat itu masih ada hak untuk membeli lilin sebanyak $\frac{4}{5}$ (kadang-kadang juga $\frac{3}{4}$) yang dikumpulkan di Siak. Begitu juga ada hak untuk menyerahkan eksploitasi sungai-sungai yang tidak bertuan kepada pihak ketiga; pemberian ijin untuk menebang kayu dari hutan yang tidak dikelola; seperti juga penyerahan petak-petak tanah liar kepada perusahaan industri untuk dieksploitasi.

Tetapi penghasilan terakhir ini disertai dengan pengakuan hak-hak penduduk terkait dan ganti ruginya. Barang larangan atau larangan raja termasuk komoditi yang hanya merupakan hak milik raja dan dikumpulkan oleh orang-orang untuk diserahkan kepada raja, bukan bersifat penghasilan, melainkan sebagai upeti. Meskipun masih memiliki nilai, sebelumnya barang-barang itu dianggap lebih sebagai tambahan daripada yang utama. Ini adalah gading gajah, cula badak, *guliga*, *gaharu merupa*, *cula tupei*, *taring napoh* dan *musang cabu* serta juga pada ketinggian tertentu kamper (tetapi ini terpisah dengan yang lain).

Dari setiap gajah jantan yang ditemukan, salah satu gadingnya harus diserahkan kepada raja sementara gading lain menjadi hak pemburu atau penemunya. Jika Sultan juga menghendaki gading kedua, dia perlu membayarnya menurut harga pasar. Kadang-kadang dia memberikan kepada pemburu sebuah persalinan atau seperangkat pakaian baru bagi gading pertama. Di

Siak gading dijual dengan harga berbeda-beda, menurut asal-usul dan besar atau kecilnya gading. Jika sepasang gading berbobot 1 pikul atau lebih, maka pikul ini dibayar seharga \$250. Jika gading ini tidak melebihi setengah pikul, maka per pikulnya dibayar \$150. Bagi gading berukuran kecil, \$ 1 untuk per kati dibayarkan.

Setiap cula badak yang ditemukan juga harus dipersembahkan kepada Sultan. Penemunya akan mendapatkan sebuah persalinan. Cula itu menjadi obat yang sangat dicari dan dikatakan terutama sangat manjur menyembuhkan luka-luka dan gigitan ular. Sebuah cula badak rata-rata bisa mewakili nilai antara \$20 – 60. Yang paling langka adalah cula putih di mana harganya dibeli oleh orang Cina sampai \$100 per potong. Orang menduga bahwa badak-badak di Jawa dan terutama di Sumatra sangat berbeda, yaitu tidak memiliki dua cula dan tidak pernah lebih dari satu. Tetapi tentang kulitnya yang berharga penulis tidak yakin. Meskipun jarang, badak juga bisa dijumpai dengan dua tanduk di Siak (keterangan ini sulit dipercayai). Mungkin bobotnya sama seperti dengan kemandulan kuda hutan di Sumatra).

Yang dimaksud *guliga* atau batu permata adalah semacam batu yang halus, yang kini terdapat dalam tubuh beberapa ekor hewan. Dikatakan bahwa batuan demikian bisa ditemukan pada tubuh beruang, kera, ular, babi hutan dan hewan-hewan lain. *Guliga*, yang di Siak termasuk dalam jenis *larangan raja*, merupakan jenis batu yang terutama ditemukan di Mandau Hulu. Suku Sakei merupakan satu-satunya suku yang mengumpulkan jenis batuan ini, yang sebagian disetorkan kepada Sultan sebagai pajak, sebagian lagi sebagai *barang larangan*. Menurut teori semua *guliga* yang mereka temukan harus diserahkan kepada Sultan, tetapi pada kenyataannya sejumlah besar batu ini dijual secara diam-diam kepada para pedagang Melayu atau Cina atau ditukar dengan komoditi dagang lainnya. *Guliga* menurut besarnya bisa mencapai harga dari \$40 sampai \$600. Nilai batu *guliga* ini tidak sebanding dengan beratnya, tetapi nilainya akan lebih cepat naik daripada bobotnya, seperti menghitung harga batu permata.

Apabila sebuah *guliga* mencapai 1 ringgit (8 mayam), maka dia dibayar \$600 dan jika *guliga* hanya berbobot 3 mayam, maka

orang hanya mau membayar \$100. Bagi *guliga* yang sangat besar dibayarkan dengan harga tinggi. Sultan Siak memiliki contoh *guliga* yang bernilai \$900. Batu *guliga* ini diyakini memiliki kekuatan gaib untuk melindungi dada dan tubuh, tetapi nilai yang besar terutama karena kenyataannya mengandung aphrodisiacum kuat, yang di dalam saku bisa melekat atau digunakan sebagai larutan yang sangat halus.

Gaharu merupa adalah sejenis kayu gaharu yang bentuknya tidak teratur, yaitu berbentuk hewan apakah burung, anjing, kucing atau yang lain. Penulis tidak pernah melihat *gaharu merupa* ini. Tidak terbukti bahwa di Siak jenis kayu itu bisa ditemukan. Kekuatan yang diberikan pada *gaharu merupa* adalah bahwa ini merupakan induk dari kayu gaharu, semacam ruh. Ketika membawa senjata masuk hutan, orang pasti akan menemukan banyak kayu gaharu. Kayu gaharu ini bukan kayu sebuah pohon yang disebut gaharu, melainkan disebut kayu yang terbentuk karena proses kimiawi dari pohon karas, yang karena usianya tumbuh di dalam hutan.

Tetapi tidak semua pohon karas yang mati mengandung kayu gaharu, namun bisa ditemukan pohon yang kadang-kadang menghasilkan dua pikul atau lebih. Perlu latihan untuk mengetahui apakah sebuah pohon ini mengandung kayu yang harum atau tidak. Orang-orang yang memiliki ketrampilan demikian (juga orang menemukannya ketika mencari timah, kamper) disebut pawang (dengan demikian orang teringat pada pembuat minyak Amerika dalam mencari sumber minyak bumi). Kayu gaharu dibayar menurut kualitasnya dengan \$0,50 sampai \$2 per kati.

Cula tupei adalah *penis* tupai yang keras. Diceritakan tatkala tupei dilanda nafsu dan tidak berhasil menemukan betinanya untuk menyalurkan nafsunya, tupai berusaha menancapkan penisnya di pohon kelapa atau bambu. Tetapi setelah itu tidak mungkin bagian tubuh itu ditariknya kembali, dengan akibat hewan itu mati dan penisnya melekat pada benda di sekitarnya. Apakah ini mungkin, tergantung kepada para pengamat untuk menilainya. Tetapi yang nyata adalah bahwa cula itu ada. Dikatakan bahwa cula ini mengandung aphrodisiacum sangat kuat dan orang menduga bahwa pemakainya akan sangat terangsang.

Taring *napoh* adalah bola mata hewan *napoh* yang berbentuk cincin, besarnya antara pelanduk dan kijang, sejenis hewan yang hanya dijumpai di Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya. Taring ini dibentuk seperti cincin, yang membuat pemakainya kebal, dan yang disebut oleh orang Melayu dengan istilah *pelias*. Benda itu sangat jarang ditemukan. *Pelias* lainnya, tetapi yang bukan barang larangan, adalah *semambu sonsang* (sebuah *semambu*, di mana beberapa tumbuhan memiliki kelainan dengan model pertumbuhan alami), dan *buntat tumbuh niur* (inti pohon kelapa yang tumbuh).

Musang cabu adalah sejenis musang putih yang apabila ditemukan harus diserahkan kepada Sultan. Hewan ini tampaknya tidak memiliki sifat bermanfaat lain kecuali kelangkaannya, suatu kelangkaan yang begitu hebat sehingga penulis tidak pernah menemui seseorang yang pernah melihatnya. Kamper sejauh ini termasuk barang larangan, sehingga tidak seorangpun mengumpulkan produk itu tanpa ijin khusus dari Sultan, yang tidak akan memberikan ijin sebelum dia yakin bahwa jasa-jasa seorang pawang yang baik dimanfaatkan, mengingat hanya orang tertentu dari luar yang bisa melihat pohon yang mengandung kamper.

Upah pawang ini tidak bisa ditentukan tetapi pada setiap kesempatan juga diberikan sesuai keinginan Sultan. Dalam pengumpulan kamper ini orang mengenal kebiasaan tertentu. Setiap saat Mereka yang pergi mencari kamper, mereka tidak mandi. Pada saat ini mereka akan menggunakan bahasa khusus (bahasa kamper), yang tidak menyerupai bahasa Melayu (bandingkan dengan apa yang diketahui bagi orang Batak di tempat lain). Para pengumpulnya akan masuk hutan sampai pawang menyebutkan bertemu hantu kapur (wanita) dalam mimpinya yang menunjukkan arah kepadanya di mana banyak kamper ditemukan. Jika terjadi bahwa pawang berhubungan dengan ruh itu dalam mimpinya, maka ini akan menjanjikan panen yang berlimpah. Dalam pengumpulan lilin di Siak juga beberapa kebiasaan muncul.

Sialang (pohon lilin) biasanya tergolong hasil hutan yang ditemukan asalkan tumbuh di utan tanah milik suku. Jika seseorang menemukan pohon lilin di dalam hutan yang dikuasai oleh suku lain, maka dia bisa mengambil seluruh pohon itu selama hidupnya sesuai

pilihannya. Setelah itu pohon tersebut akan diserahkan kepada kepala (penghulu atau *batin*) yang termasuk menguasai utan tanah ini. Jika lilin dikumpulkan dari sebuah pohon, maka dia harus membagi tiga: 1/3 untuk pemilik pohon, 1/3 untuk orang yang memanjat pohon dan 1/3 untuk mereka yang menjaga di bawah pohon dan menangkap lilin itu. Dua aktivitas ini sangat berbahaya; memanjat di sepanjang batang yang licin dari pohon *sialang* dengan sarana peniti yang disematkan, dan mereka yang berjaga di bawahnya (yang bersaing) dari harimau dan beruang yang kata orang sering datang untuk mengambil madu dari pohon itu.

Jenis-jenis pohon berikut ini biasanya dihuni oleh lebah termasuk *sialang*; di sekitar pantai ada juga pohon pulei, kempas, kayu arah dan babi kurus, sementara ke pedalaman di sana ditemukan rengas manuk dan cempedak ayar. Selain lebah biasa, di Siak masih ada lebah jenis lain yang sarangnya tidak bergantung di ranting pohon melainkan berada di dalam lobang dan membuat sebuah lobang. Jenis lebah ini disebut *neruna*. Adat tentang pengumpulan lilin seperti diuraikan di atas tidak berlaku bagi lilin yang dihasilkan oleh *neruna*. Setiap orang yang akan berburu tidak akan diikat dengan formalitas.

Di atas telah disampaikan bahwa Sultan bukan hanya penyatu tertinggi kedudukan duniawi tetapi juga akherat di wilayahnya. Dengan demikian dia menjadi wali di kerajaannya, seperti juga yang terjadi dengan raja Islam lain di wilayahnya. Jadi bila Sultan Siak menjadi wali, di sana dia menjadi raja daerahnya. Bila orang lain menjadi wali, maka dia tidak lagi menjadi raja. Sultan Siak kini menjadi wali di seluruh Siak, dengan pulau-pulau yang terletak di dekatnya, selain di Tanah Putih, Bangko dan Kubu, serta di Tanjung, Sipare-pare dan Pagurawan. Dia tidak berada di daerah Tapung juga tidak berada di daerah taklukannya sebelah barat dari Panei sampai Tamiang.

Tetapi sultan tidak memegang perwalian itu sendiri melainkan wewenangnyanya diserahkan kepada para imam dan khatib dari berbagai mesjid (*wilayat*). Mesjid ditemukan di Siak, Pekanbaru, Bukitbatu, Buru Bakul, Sekat Bakau, di kampung-kampung di pulau Bengkalis, di Merbau Tebing Tinggi, Tanah Putih, Kubu dan Bangko.

Siak sebagai akibatnya dibagi menurut daerah keagamaan ini. Setiap mesjid memiliki penghasilannya sendiri. Pajak bagi keagamaan mencakup perawatan sebuah bangunan yang sangat primitif, yang disebut *mesigit*, sementara hasilnya digunakan untuk membayar para petugas agama ini.

Apa yang dikumpulkan di mesjid di satu sisi sepanjang aliran hulu sungai menjadi hak imam, dan apa yang dipungut di sisi lain diserahkan kepada khatib. Pajak untuk agama yang dipungut di Siak disebut zakat dan fitrah. Zakat dipungut atas padi dan uang dari semua orang Melayu. Untuk padi, zakat hanya berjumlah 10% dari setiap ladangnya yang menghasilkan lebih dari 400 gantang, tetapi tampaknya pemungutan ini dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga orang Melayu kadang-kadang menyetorkan 20% dari tanaman padinya sebagai zakat. Sementara bertentangan dengan aturan-aturan dalam Islam, pajak ini sering dipungut dengan kekerasan. Begitu juga berbeda dengan aturan-aturan yang sama, di Siak, orang-orang yang tinggal di dekat mesjid diancam dengan hukuman apabila tidak mengikuti shalat Jumat.

Tentang uang dan barang mewah (dengan perkecualian perhiasan perempuan) setiap tahun 2 ½% dibebankan sebagai zakat, dibayarkan dalam bulan puasa. Fitrah (zakat badan) harus disetorkan oleh setiap orang yang hidup, besar atau kecil dan berjumlah satu gantang Bagdad (3 cupak) beras per kepala, untuk dibayarkan pada bulan puasa. Jika tidak ada padi yang dipanen dan jika tidak memiliki beras, wajib pajak harus membeli beras yang diperlukan untuk membayar zakat fitrah. Jika zakat dipungut, fitrah harus diserahkan kepada imam atau khatib di mesjid.

Sebelum menguraikan kondisi dalam negeri di Siak, di sini perlu dicatat berikut ini tentang perbudakan yang masih ada di daerah ini serta status anak semang. Perbudakan masih ada, tetapi telah lenyap sama sekali sebagai akibat pengaruh pemerintah yang melarang perdagangan budak dalam traktat tahun 1858. Jumlah budak yang diberitakan sekarang ini tidak lebih dari 30 orang. Semuanya berasal dari Batak atau Siam dan merupakan keturunan dari budak-budak yang diangkut sebelumnya.

Budak-budak lama telah hilang, apakah melalui penebusan atau sebagai akibat pembebasan oleh majikan mereka, di samping juga dijual kepada orang lain (asalkan tidak diwariskan) menjadi anak semang. Uang penebusan yang dibayarkan bagi budak wanita muda dewasa adalah \$60 dan untuk budak pria muda dewasa \$40, sementara untuk yang lain akan dibayar lebih sedikit, seperti yang disepakati oleh pihak-pihak itu. Budak-budak di sini seperti di tempat lain di mana hukum Islam diberlakukan, tidak mengalami nasib menderita.

Yang agak berbeda adalah status anak semang. Jika budak masih dihargai karena mereka mewakili modal yang besar, yang akan hilang apabila diperlakukan secara buruk; namun dengan anak semang hal itu tidak diperlukan dan orang mencoba mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dari mereka, karena toh biasanya tidak ada hutang yang bisa dilunasi, tanpa adanya jaminan dari debitur yang diberikan baginya apabila dia meninggal atau melarikan diri sebagai anak semang, sehingga modal ini tidak beresiko.

Sementara itu hutang yang dibuat oleh seseorang tidak akan menjadikan status anak semang turun temurun. Hanya kondisinya akan berubah pada ahli waris, ketika mereka dinyatakan pertanggungjawab untuk melunasi hutang itu di depan pimpinan adat (datuk, penghulu). Biasanya seseorang tidak akan sukarela menjadi anak semang untuk hutang di bawah \$ 20 dan kemudian tidak akan terpaksa kecuali melalui sebuah vonis. Jika seseorang terlibat dalam status anak semang ini, maka penagihnya harus menyediakan penampungan, makanan dan pakaian baginya dan keluarganya, sementara bagi pekerjaan yang dilakukan hutang setiap bulan dikurangi dengan f 1 per tenaga siap kerja.

Pengurangan tidak dilakukan apabila penagihnya adalah seorang datuk atau kepala adat lain; dalam kasus ini hutang sepenuhnya bisa dibayar dalam bentuk uang atau barang. Untuk ini anak semang diperintahkan untuk membuka ladang misalnya bagi majikannya, yang sebagian hasilnya dimiliki sendiri dan sebagian akan disetorkan kepada majikannya. Apa yang tidak dia perlukan dari andilnya, dia bisa gunakan untuk melunasi hutang. Status anak

semang di Siak ini telah mencapai jumlah yang menakutkan, dan sebagai akibat kondisi perekonomian yang tidak sehat, situasi anak semang semakin buruk. Lebih dari 1/3 penduduk Siak berstatus anak semang. Sejauh mana penafsiran ini mendekati kebenaran, belum bisa diselidiki.

Setelah sketsa umum singkat di atas, kini dicoba untuk memberikan suatu gambaran tentang :

1. pembagian tanah Siak berserta hak milik dan hak serta kewajiban yang muncul dari situ;
2. unsur-unsur penduduk dan kewajiban mereka atas tanah.

Setelah itu masih ada sesuatu yang perlu disampaikan tentang daerah Tanah Putih, Bangko dan Kubu seperti juga tentang Tapung. Sementara itu ditegaskan bahwa nota ini hanya merupakan percobaan pertama untuk menggambarkan kondisi sekarang dan untuk mencoba menyelidiki di sana-sini berbagai penyebab kondisi ini muncul.

Literatur tidak bisa ditelusuri dan penjelasannya juga hanya merupakan rangkuman dari beberapa pernyataan yang dibuat di Siak sendiri, yang jika ada alasan bisa saling dikaitkan. Banyak hal masih harus digambarkan dan mungkin kemudian akan membuktikan bahwa di sana-sini masih diperlukan perbaikan dan penambahan. Akhirnya masih perlu disampaikan (dan ini tidak cukup terlihat) bahwa kondisi ketika di sini suatu gambaran disampaikan, ditemukan di sebuah daerah yang belum lama terjadi di antara orang-orang semi-beradab, di mana tidak ada adat yang digambarkan sehingga hak-hak penduduk belum dilindungi. Kondisi tradisional dengan pemerintahan yang buruk dan sewenang-wenang di satu sisi, dan diwarnai dengan penderitaan di sisi lain mengarah pada percampuran unsur-unsur baik dan buruk, sah atau tidak, yang hampir tidak bisa dibedakan, dan pasti masih diperlukan banyak waktu dan kajian sebelum teka-teki yang dimuat dalam kata Siak bisa dipecahkan.

II

Pembagian Wilayah

Tentang nama Siak, pada umumnya jarang bisa dijelaskan. Dari situ bisa menjadi alasan bagi kesalahpahaman. Ketika orang menyebut Siak, maka biasanya ini adalah daerah taklukkan Kerajaan Siak sebelah barat, yaitu dari Panei di timur sampai perbatasan Aceh di barat, sehingga bagian lain dari Karesidenan Pantai Timur Sumatra ini menjadi wilayah Siak.

Tetapi kita harus membedakan pada bagian yang dianggap sebagai Siak dalam arti sempit. Apa yang dimaksudkan di sini sebaliknya tidak pernah dijelaskan juga. Kini yang disebut Siak sering dipahami tanpa daerah Tanah Putih, Kubu dan Bangko; dan kembali juga Tapung tidak diikutkan. Pada kesempatan lain daerah Pekanbaru dan Mandau juga tidak dianggap termasuk di wilayah Siak, begitu juga apa yang dimaksud daerah Datuk Laksamana dari Bukitbatu. Apa yang masih tersisa kemudian dengan pulau-pulau ini menjadi daerah Siak yang asli. Tetapi gambaran ini sepenuhnya tidak benar. Jika orang menganggap Siak berbeda dengan daerah taklukkan sebelah barat, maka bisa dikatakan bahwa Sultan di sini menjadi penguasa dan berdaulat.

Di wilayah kedaulatannya, wewenang hukum tertinggi dan hak prerogatif raja dimiliki oleh Sultan, di luarnya tersebar pada berbagai raja lokal. Tetapi di wilayah Sultan kembali pembagian terjadi yang berada dalam berbagai kondisi politik, sebagai akibat dari kondisi sehingga pada berbagai periode daerah itu digabungkan dengan Siak, apakah melalui kekerasan senjata atau intimidasi seperti Tanah Putih, Kubu dan Bangko atau dengan cara damai seperti Tapung. Setelah penggabungan Tanahputih, Kubu dan Bangko, Sultan Siak memegang hak-hak yang dimiliki raja lokal. Sebagai Sultan Siak, dia menjadi raja. Dengan demikian semua daerah itu menjadi taklukkan Siak, yang hanya memiliki keunikan bahwa Sultan adalah raja mereka.

Kondisinya berbeda dengan Tapung. Tapung membentuk dua konfederasi yang anggotanya tampak sangat baik, sehingga bagi mereka sangat penting untuk berhubungan baik dengan Sultan Siak,

yang mutlak menguasai daerah aliran hilir sungai, di mana mereka menguasai alirannya; terutama karena sungai ini juga dianggap sebagai satu-satunya jalan ketika mereka bisa menjalin hubungan perdagangan dengan dunia lain. Di sisi lain, bagi Sultan ini juga sangat penting untuk menempatkan daerah-daerah pedalaman di bawah pengaruhnya, karena di pedalaman dia merasa aman terhadap tetangganya yang kuat. Pada saat itu tampak bahwa pada puncak kekuasaan Siak, mungkin tidak mudah untuk menaklukkan Tapung dengan kekerasan. Apa yang berhasil dilakukan kerajaan-kerajaan yang lebih kuat di sepanjang pantai melalui serangan dari laut, tidak mungkin dilakukan oleh Tapung melalui darat.

Sebagai akibatnya Tapung bersedia mengakui Sultan Siak sebagai penguasa mereka, sementara pihak Siak sudah puas dengan pengakuan ini. Tanah Putih, Kubu dan Bangko digabungkan dengan Siak dan karena itu menerima Sultan sebagai raja mereka, sementara aneksasi Tapung tidak berlangsung lebih lanjut daripada pengakuan sebagai penguasa oleh para kepala daerah Tapung, atau seperti yang mungkin bisa dikatakan berada di bawah perlindungannya.

Dalam setiap kasus, daerah-daerah ini menduga bahwa Tapung menjadi bagian dari Siak; kini sisa kerajaan itu sebagai intinya adalah Siak dan dengan demikian sepenuhnya bisa diberi sebutan daerah Siak yang sebenarnya. Jika orang menyelidiki daerah ini, maka terbukti bahwa wilayah itu dibentuk oleh berbagai bagian yang saling berbeda, bukan hanya berbeda karena letak khususnya dan karena pemerintahannya sendiri, tetapi juga karena hak dan kewajiban dari penduduk yang tinggal di sana atau termasuk kawula daerah itu. Di sini perlu disampaikan bahwa untuk sementara hanya disebutkan pembagian tanah dan kewajiban yang muncul; tentang penyebaran berbagai unsur penduduk, akan dibahas kemudian.

Tanah Siak yang sebenarnya kini dalam bagian-bagian utamanya bisa terdiri atas:

- a. Daerah 4 penghulu Siak
- b. Mandau hilir
- c. Daerah *batin* Melayu di sepanjang Sungai Siak serta *batin* Prawang;
- d. *Pertalangan*

- e. Tiga *luhak* (lurah)
- f. Tiga Kampung
- g. Teratak Buluh
- h. Daerah Penghulu Domei (Laksamana Bukit Batu)
- i. Daerah *batin* di sepanjang pantai di selatan muara Sungai Siak
- j. Daerah Suku Sakei di Mandau Hulu
- k. Daerah yang ditinggalkan atau tidak dihuni
- l. Pulau-pulau

a. *Daerah Empat Penghulu*

Daerah ini terbentang dari Tanjungbalai sepanjang aliran kiri Sungai Siak sampai muara sungai Mandau, dan di sepanjang aliran kanan Telok Dalam di depan Pulau Guntung sampai Sungai Buwatan. Dari kedua aliran sungai ini, daerah itu terbentang ke daratan apabila orang bisa mendengar sejenis gong yang disebut *tetawak* (*sapandangan pemukul tetawak*). Semua tanah ini bersama hutan yang ada di sana (*utan tanah*) termasuk milik penghulu Siak Kecil, Rempah, Siak Besar dan Betung dan kawulanya (anak buwah).

Batas-batas daerah 4 penghulu adalah sebagai berikut:

- Siak Kecil: dari Tanjungbalai sepanjang pantai dan dari muara Sungai Siak di aliran kiri sampai Telok Patah (di depan Pulau Guntung) dan selanjutnya Sungai Siak Kecil ditelusuri al samn yang disebut Pasisim. *Utan tanah* milik penghulu Siak Kecil dengan demikian terutama menjadi bagian hilir dari Sungai Siak Kecil. Dia tidak memiliki *utan tanah* di aliran kanan Sungai Siak Besar.
- Rempah: ini dimulai dari aliran sungai di mana Siak Kecil berhenti, tetapi terbentang di kedua sisi sungai itu. Teluk di sebelah kanan di depan Teluk Patah disebut Telok Dalam. Tanah Rempah tidak lagi ada di depan Belading di mana aliran kanannya di depan Telok Pah disebut Telok Dalam.
- Siak Besar: jika kita menyusuri sungai ini, maka di sebelah kiri dan kanan ditemukan *utan tanah* Siak Besar sampai Sungai Kecil Bila dan di depannya Sungai Langkei bergabung dengan Sungai Siak, kira-kira satu jam di bawah ibukota.

- Betung, jika orang melakukan perjalanan lebih lanjut ke hulu, maka dia akan tiba di daerah penghulu Betung, yang terbentang sampai Sungai Buwatan, dan di sebelah kirinya sampai di kuala Sungai Mandau.

Kampung utama Siak dan pemukiman kita terletak di Betung. Semua hak yang menurut pengertian Melayu muncul dari kepemilikan tanah, di sini menurut adat termasuk milik penghulu dan anak buahnya. Mereka semua di sana memiliki dan mengeksploitasi *sialang* (pohon yang rantingnya bergantung sebagai sarang lebah); mereka hanya bisa membabat tanah itu tanpa pembayaran *tapak lawang* atau pajak tanah, dan menanaminya.

Setiap orang asing, yang dahulu (kini diubah dengan cara yang salah) di sini datang untuk membuka ladang mereka, harus menyetorkan 10 gantang padi per ladang sebagai pajak tanah kepada penghulu terkait, sementara bagi semua produk hutan yang diperoleh dari daerahnya mereka memungut cukai 10% dari apa yang dikumpulkan sebagai pajak dengan nama *pancong alas*. Raja di sini (seperti di tempat lain) memiliki hak monopoli atas lilin, gading dan sebagainya yang diuraikan di atas, sementara juga suku Pasisir dibebaskan dari *tapak lawang* seperti di tempat lain di Siak, seperti yang terbukti di bawah tetapi selain itu perkecualian berlaku bagi cukai tanah atas hak milik penghulu dan anak buahnya.

Jika salah seorang anak buah penghulu menemukan *sialang* di *utan tanah* sukunya sendiri, maka ini menjadi hak miliknya; jika orang lain menemukannya, maka beberapa keuntungan yang disebutkan di atas akan berlaku tetapi *sialang* itu menjadi hak penghulu terkait. Orang asing, kecuali ketika termasuk suku Pesisir, di mana mereka bebas dari *tapak lawang*, terkena pembayaran pajak ini dan *pancong alas*. Namun oleh empat penghulu tidak ada cukai yang dipungut dari masing-masing anak buahnya. Ketika pada tahun 1863 melalui keputusan pemerintah tanggal 29 Januari nomor 5a, karena kesalahpahaman *pancong alas* dihapuskan, juga kesempatan dimanfaatkan untuk mengakhiri *tapak lawang*, sehingga empat orang penghulu dan anak buahnya bisa memiliki *sialang* dari semua hak tanah mereka. Sejak itu produksinya mengalami penurunan, namun

menurut dugaan orang (mungkin benar juga) sebagai akibat dari asap kapal uap yang menyusuri Sungai Siak.

b. Mandau Hilir

Di daerah hilir di sepanjang aliran Sungai Mandau Hilir dan anak-anak sungainya Ulah dan Merbungkal, orang-orang Melayu bermukim yang biasanya disebut sebagai orang Mandau atau orang Talang Mandau. *Utan tanah* mereka tidak terbentang di sepanjang aliran kanan Mandau kecuali sampai Sungai Minas dan di sepanjang aliran kiri hingga Sungai Bringin. Semakin ke arah alirannya, kita menemukan Suku Sakai. Orang Mandau ini dibagi dalam tiga suku: suku Mandau, suku Gronggang dan suku Pandan. Ketiga jenis warga ini tinggal saling berdampingan, tetapi setiap suku memiliki perantauannya sendiri. Ini mengakibatkan setiap suku memiliki *utan tanah* sendiri, yang dibatasi oleh tanjung di sungai-sungai tersebut. Orang Mandau lebih khusus lagi tinggal di sepanjang aliran Sungai Mandau, sementara orang Pandan terutama tinggal di Sungai Ulah dan orang Gronggong tinggal di Sungai Merbungkal, anak-anak Sungai Mandau.

Hak-hak yang muncul dari kepemilikan ini sama seperti yang terjadi pada empat penghulu di sepanjang Sungai Siak, setidaknya menurut adat termasuk mereka baik yang menyangkut *sialang* maupun *pancong alas* dan *tapak lawang*. Hak istimewa suku ini di daerah perantauan suku adalah bebas dari *pancong alas* dan *tapak lawang*. *Pancong alas* lain yang disetorkan diserahkan kepada pimpinan yang termasuk perantauan. *Tapak lawang* di sini yang berjumlah 10 gantang per ladang, sekarang dipungut oleh Sultan. Tetapi apakah ini bisa dibenarkan, saya meragukannya. Dahulu menurut kata orang, pajak ini juga diserahkan kepada para kepala daerah Mandau.

Suku-suku di Mandau bisa dibagi sebagai berikut:

1. suku Mandau dibagi menjadi tiga bagian, yang dipimpin oleh seorang penghulu, seorang *jenang* dan *tuwa-tuwa*.
2. suku Gronggang juga dibagi menjadi tiga dan dipimpin oleh *batin*, *antan antan* dan *tuwa tuwa*
3. sebagia kepala orang Pandan hanya ada *jokerah*

Para kepala sub 1 dan 2 dimaksudkan saling terpisah, meskipun sub 1 penghulu dan sub 2 *batin* dikenal sebagai *primus inter pares*, dan kebetulan perintah Sultan disampaikan kepada orang lain lewat mereka. Dari suku Pandan sebagian tinggal di *batin* di talang Gasip (lihat di bawah) dan sebagian lain di bawah kepala rendahan dengan gelar *jokerah* di Mandau. Tentang perdagangan *srahan* di sepanjang sungai Mandau, kemudian sesuatu perlu disampaikan.

- c. Daerah *batin* Melayu di sepanjang Sungai Siak serta daerah Batin Prawang.

Batin Melayu di sepanjang Sungai Siak adalah sebagai berikut:

- Gasip
- Senapelan
- Sigales

Dahulu masih ada *batin* keempat, yaitu *batin* Bangsa, tetapi suku ini punah atau setidaknya menghilang. Sebagai akibatnya, tanah yang dahulu dihuni oleh mereka jatuh ke tangan Sultan. Masih ada *batin* Tenayan, tetapi tanahnya terletak di daerah *batin* Senapelan, yang menjadi taklukkannya. Jadi *batin* ini tidak bisa dibahas secara khusus. Hak-haknya atas tanah sejauh masih belum dihapuskan, sekarang ini dikuasai oleh *bandar* Pekanbaru (Tenayan merupakan sungai aliran kanan Sungai Siak yang bertemu tidak jauh di bawah Pekanbaru).

Selain tiga *batin* Islam yang masih ada di atas, seperti juga penghulu yang disebut sub a ke arah darat, bisa dijumpai istilah *tawak-tawak*. Di atas telah disampaikan bahwa *utan tanah* milik penghulu Betung membentang sampai aliran kanan Sungai Siak hingga Sungai Buwatan dan di sebelah kiri sampai kwala Sungai Mandau. Aliran kanan sungai Buwatan ini hingga Sungai Gasip sekarang ini tidak berpenghuni. Dahulu di sana tinggal *batin* Bangsa dengan anak buahnya yang sekarang lenyap.

1. Semakin ke atas antara anak sungai kanan Gasip dan Pandanau, *batin* Gasip tinggal. Orang Gasip sekarang ini seluruhnya bergeser ke pedalaman (*pertalangan*) sehingga daerah yang dimaksudkan di sini sekarang telah ditinggalkan sama sekali. Toh *utan tanah* harus dianggap termasuk milik mereka.

2. Di depan Sungai Pendanau, orang menemukan Sungai Lukut. Dari sini sampai tempat di antara Pekanbaru dan pertemuan kedua Sungai Tapung, yang disebut Pasir Pales orang menemukan *utan tanah* milik *batin* Senapelan, yang terbentang di aliran kanan antara Sungai Pendauan dan Kandis.
3. Semakin jauh mengikuti aliran Sungai Kandis di sepanjang Tapung Kiri sampai cabang kirinya, Sungai Seketuk, dan dari Pasir Pales di sepanjang Tapung Kanan sampai aliran kiri Sungai Pudu, daerah *batin* Sigales ditemukan.
4. Akhirnya di antara Kwala Mandau dan Sungai Luhut ditemukan *batin* Prawang, yang disebut menurut anak sungai Prawang.

Tampaknya tidak perlu diragukan lagi bahwa baik *pancong alas* maupun *tapak lawang* setidaknya *batin* sub 1, 2 dan 3 muncul di sini, begitu juga *sialang* termasuk milik mereka. *Batin* ini mungkin selama pemerintahan raja Gasip muncul. Mungkin mereka tidak pernah berada di bawah Johor, karena seperti yang disebutkan di atas kekuasaan raja Johor mungkin hanya sampai Kuala Mandau.

Siapa yang di sana menggantikan setelah terusirnya raja Gasip, tidak diketahui. Mungkin mereka membentuk suatu persekutuan seperti yang kini masih ditemukan di Tapung. Penyelidikan selanjutnya mungkin bisa menjelaskan bahwa *batin* Senapelan menduduki peringkat pertama. *Senapelan* lama kini disebut Pekanbaru. Di sana seperti di Buwantan (Siak) tinggal tiga penghulu Minangkabau, yang harus mengawasi kepentingan warganya yang tinggal dan berdagang di sana. Baru ketika Marhum Pekanbaru tinggal di tempat ini, mereka memperoleh namanya sekarang.

Bandar baru muncul kemudian. Gelar sekarang ini juga baru yang keenam dan menurut penafsiran kini pejabat pertama telah diangkat sekitar 60-80 tahun lalu. *Batin* dahulu memungut *tapak lawang* dan *pancong alas*, tetapi penghasilan itu diambil dari mereka dengan penghapusan *pancong alas* pada tahun 1863, tanpa menerima ganti rugi untuk itu. *Batin* Prawang tidak memiliki hak istimewa seperti orang Akit, yang dimiliki *batin* lain (Melayu). Hak-hak awal atas *utan tanah* di daerah *batin* Senapelan dan Sigales belakangan ini hampir seluruhnya dialihkan kepada bandar Pekanbaru dan pada

Tongku Said Hamid di Pantai Cermin. Tentang ini kemudian masih akan disampaikan sesuatu.

d. Petalangan

Yang dimaksud Petalangan adalah bagian Siak yang terletak di antara tanah-tanah penghulu yang dimaksud sub a dan dari *batin* sub c, yang terletak di aliran kanan Sungai Siak di satu sisi, dan batas Pelalawan di sisi lain. Jadi, karena di aliran kanan Siak kita tidak lagi mendengar *tawak-tawak*, maka yang berada di sungai ini mulai *pertalangan*. Dengan Pelalawan, *pertalangan* tidak memiliki batas khusus karena mencakup semua hutan, di pedalaman antara sungai Kampar dan Siak. *Pertalangan* di sisi Siak lebih khususnya milik sultan kerajaan ini, dan di sisi Pelalawan lebih banyak tunduk kepada Tengku Besar.

Semakin ke pantai orang bisa memasuki hutan antara pantai dan *pertalangan* yang dikuasai oleh *batin* Rawa dengan anak buahnya. Tanpa menyinggung batas antara *pertalangan* dan orang Rawa, atau apapun juga, daerah itu dianggap terbentang ke laut sampai kira-kira aliran hulu Sungai Mempura, yang bertemu dengan sungai ini di depan kampung utama Siak. Semakin ke darat, *pertalangan* hanya mencapai sedikit di bawah jalan yang terbentang dari Pekanbaru sampai Teratak Buluh.

Tentang orang Talang bisa dibedakan: Talang Dayun, Talang Gasip, Talang Pandau dan Talang Kutip. Orang Talang hanya hidup dari ladang mereka. Ketika ladang yang dibuka oleh mereka mulai kehabisan daya, mereka meninggalkannya dan tinggal di tempat lain. Mereka dianggap sebagai pemeluk Islam meskipun mereka tampaknya tidak banyak mengetahui tentang definisi agama itu kecuali hanya namanya.

Tentang asal-usul berbagai orang Talang masih terdapat ketidakpastian. Legenda menunjukkan bahwa Talang Dayun berasal dari Jawa dan tiba lewat Pagaruyung. Legenda terkenal tentang adu harimau dan kerbau berlaku antara raja mereka dan raja Minangkabau. Setelah harimau kalah dalam pertarungan itu, orang-orang Jawa yang membawanya berangkat untuk tinggal di tempatnya sekarang ini. Inti sejarah dari legenda ini belum diteliti.

Sementara itu jelas bahwa pimpinan Talang Dayun masih menyandang gelar *patih* (yang berasal dari bahasa) Jawa. Di bawahnya masih ada dua kepala rendahan yang berkuasa atas suku-suku kecil, yang memiliki gelar *antan-antan* dan *pembilang*. Semakin ke pedalaman bisa ditemukan Talang Gasip, yang dipimpin oleh *batin* Gasip. Semakin ke barat daya, orang menemukan separuh orang Pandan, di mana sebagian lain tinggal di Sungai Maudau. Di atas sub b disebutkan bahwa orang Pandau yang tinggal di *Pertalangan* berada di bawah *batin*, sementara yang ditemukan di Mandau dipimpin oleh seorang *jokerah*.

Orang Pandau/Pandan? dibagi menjadi dua dan tidak tinggal saling berdampingan, yang dianggap berasal dari pengkhianatan sebagian orang Pandau terhadap bekas raja mereka, raja Gasip, ketika mereka menunjukkan jalan menuju Gasip bagi orang-orang Aceh di sepanjang Sungai Buwatan. Sejak itu mereka bukan hanya tidak lagi tinggal di sana tetapi sampai kini melihat aliran Sungai Gasip saja akan dijatuhi hukuman mati bagi keturunan mereka. Jadi orang jelas bisa menduga bahwa orang Pandau yang tinggal di Mandau pada mulanya berasal dari aliran kanan Sungai Siak.

Sebagian besar orang Talang Kutip tinggal di pedalaman di bawah seorang *batin*. Dari sini juga sejarahnya mulai dirintis. *Tapak lawang* dipungut oleh Sultan dari Talang Dayun sementara Mangkubumi melakukannya dari para *talang* lainnya. Apakah ini bertumpu pada hukum, atau pada pelanggaran kekuasaan, belum bisa dipastikan. Mungkin orang Talang pada mulanya memiliki hak, setidaknya untuk memungut *pancong alas* melalui para kepala *talang* itu. Tetapi mungkin saja bahwa warga dari tempat lain tinggal di hutan yang tidak berpenghuni dengan persetujuan raja, yang mungkin saja telah menyerahkan *pancong alas* yang sulit dikontrol kepada para kepala pendatang, sementara dia dengan mudah memungut *tapak lawang* sendiri.

Dengan cara ini, raja setidaknya mengambil sesuatu dari hutan yang tidak produktif dan sulit dimasuki (penduduk asli tinggal seperti di setiap daerah pribumi di sepanjang sungai), karena dia bukan hanya memungut hasil *tapak lawang* yang besar, tetapi juga hak istimewa para raja, perdagangan *serahan*, serta memungut lebih

banyak cukai impor dan ekspor dan kerja wajib. Dari Talang Dayun, legenda menunjuk pada asal-usul orang Jawa; Talang Gasip berasal dari daerah Gasip di sepanjang Sungai Siak, sementara Talang Pandan berasal dari tempat mereka kini berada. Tentang perdagangan *serahan* yang dikelola pada suku *talang*, akan disampaikan kemudian.

e. Tiga Luhak (atau Lurah)

Warga yang menghuni hutan antara Pekanbaru dan Teratak Buluh dan di atas Talang Kutip disebut Tiga Luhak. Mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari sana dan sebagian tinggal di Dataran Tinggi Padang serta daerah sekitarnya. Mereka masih sering mondar-mandir ke sana-kemari. Mereka hidup dari hasil ladangnya yang mereka buka di dalam hutan di berbagai tempat.

Di antara mereka masih ditemukan orang Lima Puluh, Pasisir dan Tanah Datar, tetapi semua di bawah seseorang kepala yang diangkat oleh Sultan Siak, dengan gelar penghulu dagang, yang harus diangkat dari warga suku Lima Puluh. Para anggota Tiga Luhak pada umumnya tidak menikmati reputasi yang baik, ditunjukkan bahwa banyak orang di bawah mereka mengungsi ke sana untuk menghindari jangkauan hukum (terutama dari Dataran Tinggi Padang), atau karena alasan lain. Pengaruh yang dimiliki Sultan di sana sama sekali tidak ada. Penghulu bersama beberapa orang anak buahnya di Pekanbaru tampil sebagai anggota pemerintahan kerajaan di sana, untuk mempersembahkan upeti mereka di samping pisang, sirih dan gula, tetapi {semua upeti itu} tetap berada di sana.

Pancong alas dan *tapak lawang* tidak disetorkan oleh mereka kepada Sultan; ini semua disediakan bagi penghulu yang memungut pajak dari setiap orang, juga dari anak buahnya sendiri. Apakah mereka menyetorkan pajak, masih harus dibuktikan. Juga *sialang* bagi *penghulu dagang* berlaku, sementara adat biasa tentang hal ini di Siak juga diberlakukan seperti di sini. Penghulu dagang adalah wilayah tempat pemungutan pajak bagi orang-orang yang lewat dari Teratak Buluh ke Pekan Baru, tetapi ini menjadi pembalasan bagi

pemungutan serupa di V Kota, dan juga hanya dipungut dari orang-orang yang berasal dari sana.

Sampai sekarang tidak banyak yang disetorkan, karena penguasa Siak membiarkannya, karena penguasa tidak berani terhadap mereka dan juga memuaskan mereka dengan menyebut *pagar parit* Pekanbaru, yang berarti bahwa dalam peristiwa perang tempat berdagang itu harus tetap dilindungi. Hanya sekali sejak 10-12 tahun lalu, mereka membuat lalu-lintas antara Pekanbaru dan Teratak Buluh menjadi tidak aman sehingga terdakwa, Panglima nan Tunggang, harus disingkirkan. Mereka terdiri atas 300-400 orang Bugis.

f. Tiga Kampung

Menurut kaum bangsawan Siak, Tiga Kampung ini menjadi bagian dari Siak. Yang dimaksud Tiga Kampung adalah kampung Lubuk Siam, Buluh Cina dan Buluh Nipis, yang terletak di Kampar Kanan antara Muara Sako (pertemuan aliran Kampar kanan dan kiri) dan Teratak Buluh. Juga di sini tampaknya kekuasaan Siak terbatas pada pengakuannya di masa damai, dan terlibat dalam peperangan melawan musuh Siak. Penghasilan Sultan tidak ada dari sana, tetapi penduduk Tiga Kampung juga harus mengikuti ekspedisi ke Kota Intan dan mereka pada kesempatan ini melakukan kerja kuli. Seberapa jauh ketergantungan Siak sendiri, harus dilihat sesuai kondisi ketika penghulu tidak diangkat oleh Sultan, tetapi hanya mengakui Sultan Siak sebagai raja mereka (*beraja ka Siak*). Persembahan apa sebagai bukti dari mereka akan ditunjukkan kemudian.

g. Teratak Buluh

Teratak Buluh adalah sebuah daerah di tepi Sungai Kampar, yang arti pentingnya bersumber dari letak kampung tersebut. Kampung Teratak Buluh yaitu pangkalan di Sungai Kampar sebagai tempat dagang yang penting, yang bisa disinggahi dari pelayaran Dataran Tinggi Padang melalui V Kota ke Siak dan seterusnya ke Singapura. Hubungan politik dengan Siak hampir sama dengan Tiga Kampung, hanya di sini penghulu ditunjuk oleh Sultan dari para anggota suku

yang memiliki hak. Juga penduduk dari sini melakukan kerja kuli dalam ekspedisi ke Kota Intan. Penghasilan dari sini tidak dipungut oleh Sultan Siak.

h. Daerah Penghulu Domei (Laksamana Bukit Batu)

Daerah ini terbentang di sepanjang pantai Sumatera di barat laut muara Sungai Siak dari Tanjungbalai, perbatasan dengan Siak Kecil, lihat sub a, sampai titik di mana aliran itu terbelah di laut, sebagian bermuara di Sungai Rokan dan sebagian lain melewati Selat Rupert, kira-kira tepat di depan Sungai Senabui, yang sebagai akibatnya dianggap membentuk batas dengan Bangko.

Di pedalaman tidak ada batas tertentu (dengan Mandau Hulu), tetapi yang ternyata diduga dibentuk melalui sederetan bukit yang ditumbuhi dengan pohon kamper dalam jarak 8-10 jam dari Domei, yang disebut Aleian Bahagian. Semua *utan tanah*, yang termasuk dalam batas-batas ini dahulu dimiliki oleh penghulu Domei, tetapi yang sejak ini seluruhnya diambil alih oleh Laksamana Bukit Batu. Daerah tersebut karena itu sekarang biasanya disebut daerah Datu Laksamana Bukit Batu. Dahulu penghulu Domei memegang hak monopoli di sana untuk memungut *pancang alas* dan *tapak lawang*. Tentang kepemilikan *sialang* di sini adat serupa berlaku seperti di daerah 4 penghulu di sepanjang Sungai Siak, dan semua *sialang* sejauh tidak termasuk milik anak buahnya, adalah hak milik penghulu.

Pada mulanya Laksamana Bukit Batu juga menjadi pegawai Sultan dan bukan bangsawan, seperti halnya bandar Pekan Baru. Dia ditempatkan di Bukit Batu untuk mewakili Sultan dan memperhatikan kepentingannya. Penghasilannya terdiri atas debet candu dan garam, di samping hasil denda yang dibebankan kepada kawula Sultan di daerah di mana dia mewakili Sultan. Kemudian tampaknya dia masih mendapatkan hak dari Sultan untuk menebus 4/5 nilai produk yang dikumpulkan di Domei, ketika Sultan sendiri tidak memanfaatkan hak itu. *Utan tanah* bukan milik laksamana sebagai seorang pejabat dan bukan sebagai akibat hak alami, melainkan laksamana hanya memilikinya sebagai *kurnia* Sultan.

Sultan segera melihat bahwa kepentingannya terutama sehubungan dengan daya tempur dan pertahanan negaranya, jauh lebih dipercayakan kepada seorang bandar daripada seorang kepala adat yang berasal dari penduduk. Juga *kurnia* Sultan sebagian memiliki sifat imbalan bagi jasa-jasa yang ditunjukkannya. Tentang akta pengangkatan yang diberikan oleh Sultan Ismail pada tanggal 24 Sawal tahun 1273 (jadi setelah pengesahan Traktat tahun 1858) kepada datuk laksamana sebelumnya, yang sekarang ini disahkan, pasal 1 berbunyi: "Adalah tanah yang dikurniakan oleh duli yang dipertuwan besar akan menjadi makanan datuk Laksamana dari Tanjung Balei kebaratnya sampai di perbahagian arusnya, dan apa-apa isi yang mendatangkan hasil di dalam tanah itu melainkan datuk Laksamana yang ampunya, dan pulau Bengkalis di sebelah Bantan mana-mana *sialang-sialang* atau hasil yang keluar di situ melainkan datuk Laksamana juga punya".

Akta lama selama perang dengan Wilson telah dibakar, sehingga dari situ tidak lagi bisa diselidiki ketika ketentuan ini diterapkan untuk pertama kalinya. Diketahui bahwa Datuk Laksamana saat itu selama kerusuhan dengan Wilson telah memihak Sultan, sementara perhatian dicurahkan bahwa dalam pasal 4-8 terhadap pelimpahan dalam pasal 1 kewajiban berat dibebaskan untuk membantu dalam perang. Jadi sangat mungkin bila pelimpahan daerah yang dimaksudkan di sini pada mulanya berlaku dengan akta. Sementara itu jelas bahwa berbagai peralihan kekuasaan laksamana secara perlahan disiapkan lewat jalur hukum.

Kondisi sekarang ini adalah bahwa semua *utan tanah* di daerah tersebut dimiliki oleh Datuk Laksamana Bukit Batu, yang di sana memungut 10% dari produk hutan yang dikumpulkan sebagai *pancong alas*, atau pemungutannya diserahkan kepada salah seorang anggota keluarganya (seperti makanan). *Tapak lawang* dipungut dari orang asing, dan sepenuhnya menjadi hak Laksamana. Juga *sialang* yang dahulu milik Penghulu Domei, kini dimiliki oleh Laksamana. Di sini perlu dicatat bahwa di daerah Datuk Laksamana, *batin* Bengkalis memiliki sebidang *utan tanah* bagi andilnya dalam menangkap ikan terubuk (kepala hantu).

Bidang tanah ini terletak di sepanjang pantai antara Tanjung Balei dan Gawa-Gawa (atau Tanjung Balei Dalam). *Sialang* di bidang tanah kecil ini disediakan baginya; produk-produk hutan di sana tidak dikumpulkan, dan juga tidak ada ladang, sehingga dia tidak memungut *pancong alas* maupun *tapah lawang*. Jika ada alasan bagi pemungutan ini, maka *batin* yang disebutkan sah secara hukum yang melakukannya.

i. Daerah *Batin* sepanjang pantai di selatan muara Siak

Utan Tanah Akit Penguling

Pada bagian a nomor 2 disampaikan bahwa daerah penghulu Rempah dimulai di aliran kanan Siak dekat Teluk Dalam di depan Pulau Guntung. Dari tempat ini mengikuti aliran ke Tanjung Layang dan dari sana sepanjang pantai sampai Sungai Penguling, kita menemukan *utan tanah* yang dahulu dihuni oleh sebagian suku kafir orang Akit, yaitu Akit Penguling.

Sekarang ini daerah itu sama sekali tak berpenghuni. Akit Penguling telah lama meninggalkan *utan tanah* itu, dan kini tinggal di atas rakit-rakit di Sungai Siak. Rumah-rumah mereka bisa terlihat ketika kita menyusuri sungai sampai sekitar kwala Sungai Mandau. Di sana mereka terutama sibuk dengan pengumpulan produk hutan dan pembukaan ladang. Meskipun mungkin saja tanah yang dimaksudkan di sini pada mulanya dimiliki oleh Akit Penguling sebagai akibat dari penghunian pertama, toh tanah ini dianggap menjadi hak milik Sultan, dan sebagai akibat dari prinsip hukum bahwa seorang kafir tidak bisa memiliki tanah di sebuah negara Islam. Sebagai akibat kondisi hukum itu, *sialang-sialang* yang ditemukan di sini adalah milik Sultan. Produk hutan di sini tidak pernah dikumpulkan dan ladang di sini tidak dibuka, sehingga juga tidak ada *pancong alas* ataupun *tapak lawang* yang dipungut.

Jika ini kemudian terjadi, maka pajak ini meskipun merupakan hak alami *Akit Penguling*, tetap dimiliki oleh Sultan sesuai dengan pengertian hukum Melayu. Begitu juga tanah ini tidak bisa dianggap telah ditinggalkan sama sekali, mengingat kewajiban lama

yang berkaitan dengan tanah bagi Akit Penguling (yaitu penyerahan kayu dan kajang kepada Sultan) tetap akan dibebankan pada mereka.

Utan Tanah Orang Rawa

Dari Sungai Penguling sampai Sungai Lakar (perbatasan dengan Pelalawan), sebuah suku non-Islam lainnya tinggal di sepanjang pantai, yaitu suku Orang Rawa. Istilah itu diberikan menurut Sungai Rawa, sungai utama di daerah ini. Di pedalaman daerah ini tidak memiliki batas-batas alami. Jika melalui hutan lebat orang tidak bisa menemukan jalan darat dari pantai. Barulah setelah Orang Rawa pergi di dekat Talang Dayun, kira-kira letak sumber air Sungai Mempora, mereka bisa menemukannya. Menurut teori Orang Rawa berada dalam kondisi yang sama seperti Orang Penguling; mereka juga hanya memiliki kewajiban, bukan hak.

Mengingat mereka tetap tinggal di hutan, mereka memang terbebas dari pemerintahan Siak, ketika mereka hanya memenuhi kewajiban kerjanya. Sultan menganggap dirinya sebagai pemegang hak milik sepenuhnya atas tanah dan juga bertindak demikian, yang tidak tertutup kemungkinan bahwa Orang Rawa bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Kini Sultan akan mengambil untuk dirinya, memberikan sebagai *kurnia* sebuah sungai kepada salah satu orang terkasihnya, untuk memetik keuntungan di mana Sultan di sana memiliki hak (seperti Sungai Rawa, yang kemudian diberikan kepada Bintara Jobei dan Jaya Pahlawan bagi kebutuhan hidup mereka). Kemudian dia akan mengeksploitasi sebuah sungai bagi dirinya sendiri, seperti pada saat itu Sungai Mangkapan, di mana dia bisa memungut cukai ekspor-impor dan para warga yang datang dari tempat lain harus membayar *pancong alas* dan *tapak lawang*.

Sultan diwakili oleh penghulu Lah di Sungai Mangkapan, yang merupakan semacam bandar di sana, dengan gaji \$60 per tahun. Untuk itu dia harus memungut cukai ekspor (sejauh mungkin) dari Sungai Lakar (perbatasan dengan Pelalawan) sampai Tanjung Layang (kwala Sungai Siak) dan terutama getah, damar dan penih balam (yang lain tidak banyak jumlahnya). Cukai impor tidak dipungut. Seluruh sistem ini tampaknya bertentangan dengan pengertian yang benar tentang hukum dan ekonomi, bagi suatu

kondisi seperti yang dijumpai di sini, merupakan satu-satunya kemungkinan.

Bagi Sultan tidak ada cara lain untuk mendapatkan sesuatu dari bagian daerahnya yang luas, sementara dia juga harus berhati-hati agar tidak terlalu menindas, karena dia tidak mampu menaklukkan orang Rawa. Suku ini bukan hanya tinggal sangat tersebar di dalam hutan sehingga jika tidak mau menghadapi kesulitan, mereka bisa ditolong oleh orang-orang Cina untuk menjual produk yang dikumpulkannya dan dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat sedikit. Orang-orang Cina telah tinggal di sana dan sangat dipercayai oleh mereka.

j. Daerah Sakei di Mandau Hulu

Pada sub b disebutkan bahwa *utan tanah* orang Mandau terbentang sampai sebelah kiri di Sungai Bringin dan kanan sampai Sungai Minas. Semakin ke hulu ditemukan Orang Sakai, suatu suku non-Islam. Orang Sakai dibagi dalam Batin Lima, yang termasuk Siak dan Batin Selapan yang termasuk Kota Intan. Dari Batin Lima, suku *batin* Minas atau Brimbau tinggal, dan dari *batin* Belutu di sebelah kanan aliran Mandau (di tepi sungai-sungai Minas dan Belutu) sementara di aliran kiri tinggal *batin* Bringin, Penasa dan Tingenan pada aliran Sungai Bringin.

Menurut pengertian Hukum Islam, Orang Sakai tidak siap memiliki tanah di Siak. Mereka yang berada di tanah di sanalah yang diberi hak untuk memungut *pancong alas* dan *tapak lawang*. Padi tidak ditanam oleh Orang Sakai, satu-satunya yang mampu mereka lakukan adalah menanam ubi di dalam hutan mereka. Produk hutan, garam dan parang tidak lagi mereka beli di Mandau. Ketika setiap *batin* mempersembahkan kayu guliga dan kayu gaharu kepada raja, maka juga kebebasan mereka tidak akan diganggu. Juga hampir tidak mungkin menyuruh orang Sakai agar melaksanakan perintah Sultan dengan paksaan yang tidak mereka sukai. Mereka bukan hanya tidak akan mendapatkan apapun dari hutannya, tetapi apabila suku itu sangat ditekan, maka mereka akan pergi seperti yang sekarang terjadi dengan sejumlah orang Sakai dari Kota Intan, yang

telah bermukim di daerah Sakai, karena tempat tinggal mereka tidak lagi terletak di batas-batas daerah raja Kota Intan.

k. Tanah Tak Berpenghuni (atau ditinggalkan)

Ketika orang melihat peta Siak, maka bisa diketahui selain tanah yang dibahas di atas, masih ada dua bidang tanah di daratan Siak, yang di sini belum disebutkan yaitu:

1. Tanah di sepanjang Sungai Siak, Buwatan dan Gasip
2. Tanah di pedalaman sebelah barat Tiga Luhak

Tanah yang pertama, dahulunya termasuk milik *batin* Bangsa dengan anak buahnya, tetapi suku ini semuanya telah meninggal atau menyingkir, setidaknya telah pergi. Tanah yang dimaksudkan sejauh orang masih bisa mendengar istilah *tetawak* atau *tawak tawak* (*sepemukul tawak-tawak*) akan pindah ke pedalaman. Apakah tanah pada sub-2 juga dihuni belum bisa diselidiki. Mungkin ini tidak terjadi, setidaknya pada abad-abad terakhir ini. Tanah yang dimaksudkan dalam alinea ini berdasarkan hukum dimiliki oleh raja, yang juga mendapatkan keuntungan dari kepemilikannya. Tanah sub-2 seluruhnya tidak berpenghuni, tetapi orang tinggal di beberapa ladang. Apakah di sini *tapak lawang* dipungut, masih belum bisa dipastikan. Mungkin saja pemungutan dilakukan oleh Mangkubumi, yang memungut pajak ini juga di Gasip. *Pancong alas* di sini juga tidak dipungut, tetapi juga ini bisa dilakukan kecuali Sultan memegang haknya.

l. Pulau-Pulau

Pulau-pulau yang termasuk milik Siak terdiri atas dua kelompok:

- kelompok yang terletak di depan dan di selatan muara Sungai Siak
- Pulau Rupert dengan pulau-pulau sekitarnya

Pada aspek mana kedua gugusan ini berbeda formasinya tidak pernah diselidiki, tetapi mereka hanya sesuai ketika dengan perkecualian tertentu menjadi hak milik raja yang telah memungut *utan tanah* bersama semua hasilnya. Pulau-pulau ini, kecuali Pulau Rupert, sebagian dihuni oleh penduduk asli, tetapi mereka hanya menghuni bagian yang sangat kecil dan selain itu jika mereka adalah

orang-orang kafir atau animisme, maka tidak mungkin mereka memiliki tanah di sebuah negara Melayu Islam.

Penduduk asli pulau itu sebagian masuk Islam, tetapi hanya di atas kertas daripada kenyataan, dan proses perubahan agama ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama. Selain penduduk asli, di pulau-pulau ini banyak warga dari tempat lain yang tinggal, terutama orang-orang Melayu dari daratan dan orang-orang Cina, yang sibuk dengan menanam padi atau sagu, mengumpulkan hasil hutan, selain juga mengelola perdagangan komoditi tersebut. Tetapi mereka disebut *orang menumpang*. Beberapa ribu orang Cina mengelola usaha penggergajian untuk perdagangan di Singapura. Bisa dikatakan bahwa papan-papan ini mendapat pemasarannya di sekitar Singapura, Cina, Arab dan Mauritius. Para penggergaji papan ini dikumpulkan dalam kongsi atau usaha kecil (*panglong*).

Penduduk pulau Rupert terdiri dari orang Akit dan orang menumpang. Tentang orang Akit ini akan dibahas kemudian. Di pulau-pulau lain hanya empat *batin* Melayu dari Bengkalis yang berhak memiliki tanah, dan karena itu mereka disebut rakyat yang memegang *utan tanah* dibandingkan dengan rakyat lain. Tanah ini merupakan bagian dari pulau Bengkalis, yang terletak di sepanjang selat Brower. Dalam akta pengangkatan Datuk Laksamana Bukit Batu sebelumnya tanggal 24 Syawal 1273, yang telah dibicarakan di atas, tercantum pada bagian akhir pasal 1: "dan pulau Bengkalis di sebelah Bantan (sisi utara pulau ini) mana-mana *sialang-sialang* atau hasil yang keluar di situ, melainkan Datuk Laksamana juga yang punya".

Dalam pasal 3 dari akta yang sama, Laksamana masih menguasai sebagian besar Pulau Rupert dari Tanjung Jering (di jalan masuk timur Selat Morong) sampai ke Mumbul (ujung tenggara di depan Tanjung Ketam), sementara di atasnya pada pasal yang sama masih dilimpahkan pantai barat laut dari pulau Padang sampai pulau Dedap. Dalam pengambilalihan beberapa hak Sultan atas Pulau Rupert, dalam keputusan pemerintah tanggal 28 Agustus 1875 nomor 10 serta dalam pengambilalihan semua hak oleh pemerintah atas pulau Bengkalis, dengan hak-hak yang diserahkan kepada Laksamana di atas pada dasarnya kurang diperhitungkan, dan juga

di sini Sultan menerima ganti rugi bagi hak-hak yang sebagian bisa diserahkan kepada pihak ketiga.

Yang menarik adalah hak Sultan atas penghasilan di Pulau Merbau dan Tebing Tinggi, dengan pantai Pulau Rangsang yang terletak di depannya. Said Amal atau Tengku Besu (yang mendapat gelar Panglima Besar Tebing Tinggi) putra bungsu Said Usman memiliki tiga orang putra:

- Tengku Mohamad (Marhum Besar) yang mendesak Sultan Ibrahim dan keturunannya dari tahta Siak;
- Tengku Bagus, yang mendapatkan tanah apanage di Tebing Tinggi
- Tengku Indut, yang menguasai Merbau

Seorang cucu Tengku Bungsu, yaitu Tengku Sulung Cantiuk dan seorang putera Tengku Indut, yaitu Tengku Ngah atau Tengku Haji masih hidup.

Cara bagaimana Sultan memenuhi kebutuhan dalam merawat keturunan kedua saudaranya dari almarhum ayahnya menimbulkan alasan bagi keluhan banyak orang dan ini bisa dipahami. Bagaimanapun juga, jelas bahwa Sultan memiliki tuntutan sah atas hasil-hasil pulau ini, tanpa peduli apakah dia yang menguasainya atau tidak, atau menyerahkannya kepada anggota keluarganya. Ternyata penghasilan yang dipungut Sultan dari pulau-pulau ini tidak begitu besar. Yang penting adalah pemborongan atas penggergajian kayu orang Cina, yang di berbagai pulau ditemukan selain di Bengkalis. Dahulu pajak atas penggergajian kayu ini yang dipungut oleh Tengku Haji sebagai sumber penghasilan utama.

Kini oleh Sultan hak diborongkan kepada seorang pedagang Eropa di Bengkalis untuk memungut \$ 0,50 per bulan dari setiap orang Cina yang menggergaji kayu, hak ini mencakup pembayaran kayu yang ditebang dari hutan Sultan. *Pancong alas* tidak dipungut di pulau-pulau ini, tetapi Sultan memiliki hak untuk itu. Juga bisa dibenarkan bila dia menyerahkan wewenang untuk memungut cukai atas ekspor getah, sagu dan lilin dari pulau-pulau itu kepada pemerintah dengan ganti rugi (Lembaran Negara 1875 nomor 236), yang menggantikan *pancong alas*. Sementara itu terutama harus diperhatikan bahwa tentang hak atas tanah penduduk asli pulau ini

tidak diketahui. Mungkin di sini tentang hak itu tidak disinggung, karena penduduk masih belum beradab untuk bisa memberikan gambaran yang sesuai.

Sultan dan anak raja-raja pada umumnya membiarkan penduduk pulau itu pada kehidupannya sendiri, ketika kini mereka menyisihkan sebagian dari upeti yang dipungut dalam bentuk hasil hutan (lilin, getah dan sebagainya). Dahulu juga cukai impor masih dipungut dari kulit tengar, tetapi pada tahun-tahun belakangan ini komoditi itu tidak diekspor, mengingat di sini tidak ada lagi orang Bugis dan hanya dengan keuntungan kulit tengar tampaknya bisa dikumpulkan. Hasil pajak ini kemudian tidak begitu berarti dan sepenuhnya disetorkan kepada kepala orang Bugis yang tinggal di Tanjung Peranap. *Sialang* di pulau-pulau, selain yang termasuk empat *batin* Melayu dari Bengkalis, atau yang diserahkan kepada Laksamana, termasuk milik Sultan yang begitu sering memungutnya apabila dia menghendakinya. Ketika Sultan tidak mengijinkan, penduduk di sekitarnya akan menguasai, yang kemudian menjual produknya kepada para pedagang Cina.

III

Unsur-Unsur Penduduk

Dari pengantar sejarah catatan ini, terbukti bahwa penduduk Siak terdiri atas berbagai bagian dan ini bukan hanya menyangkut daerah asalnya melainkan juga sehubungan dengan posisi sosialnya. Sebelum kedatangan Raja Kecil di Siak, ada banyak orang Minangkabau tinggal di sana, sejauh dari pihak raja Minangkabau di Buwantan, di mana saat itu di pantai ini merupakan kedudukan dinasti Johor-Siak, tiga penghulu diangkat (dari Lima Puluh, Tanah Datar dan Pasisir), yang kewajibannya adalah untuk melindungi warga mereka yang tinggal dan lewat di daerah Siak. Mereka sekarang ini bisa kita sebut sebagai konsul.

Para penghulu ini juga tinggal di Senapelan (kemudian disebut Pekanbaru). Dengan peralihan kedudukan raja dari Buwantan ke Siak Sri Indrapura, di mana kini masih ada yang

berlangsung di bawah Sultan Mohamad (Raja Buwang) yang mangkat pada tahun 1761, juga bagi warga dari Kampar seorang wakil demikian diangkat. Kapan ini terjadi di Senapelan belum bisa diketahui. Juga banyak orang Johor yang bermukim di Siak setelah kerajaan ini diletakkan di bawah perlindungan raja Johor. Tetapi tampaknya mereka lebih banyak bercampur dengan penduduk daerah ini daripada dengan orang Minangkabau, yang menduduki posisi khusus.

Kerajaan Siak dikuasai oleh Raja Kecil di Johor, terutama atas bantuan orang-orang Minangkabau yang banyak tinggal di sana, dan dengan demikian wajar bila orang Minangkabau memiliki hak atas pampasan perang. Tetapi mereka tidak memperoleh tanah. Tanah dikuasai penduduk yang telah menggarapnya sebelum kedatangan Raja Kecil. Raja Kecil tidak hanya percaya bahwa orang-orang pedalaman yang tinggal di Siak tetap berada di bawah pimpinan mereka sendiri, yang terlepas dari kekuasaan raja tetapi para kepala adat ini bersama raja dianggap sebagai mewakili kekuasaan. Jika raja merupakan wujud dari kerajaan, mereka menjadi tiang kerajaan (sebagai tiang yang menopang bangunan kerajaan). Di luar kerajaan mereka tidak berarti apapun, tetapi sebaliknya kerajaan ini tidak bisa ada tanpa mereka.

Sekarang ini, para pengganti kepala adat asli suka menyebut dirinya sebagai tiang kerajaan, dan mereka berusaha mempertahankan posisinya yang merdeka. Setidaknya ini lebih baik daripada yang diduga sebelumnya yang mungkin terjadi di bawah seorang raja Melayu, dan usaha yang dilakukan oleh pihak raja untuk menyingkirkan mereka. Dari sisi lain hanya mereka yang bukan berasal dari Minangkabau dianggap sebagai kawula raja, dan bersama ini kesewenang-wenangan dilakukan oleh berbagai raja sejak masa Raja Kecil.

Jika para Sultan harus mengusir orang-orang Minangkabau dari kerajaannya, yang lain akan menampungnya. Akibatnya, pada umumnya di antara penduduk Minangkabau ini akan ditemukan lebih sejahtera. Sejauh mana kepentingan mereka dihormati, tergantung pada pribadi Sultan dan energi para kepala adat Minangkabau, sementara bagi yang lain ukuran keabsahan

bagaimana mereka diperintah, dan cara bagaimana lembaga adat lama mereka dihormati, semuanya tergantung pada sifat Sultan. Dari uraian di atas terbukti bahwa tidak benar bila menduga kekuasaan absolut di Siak bercampur dengan unsur-unsur demokrasi, setidaknya menurut pemahaman kita. Sultan memerintah secara absolut atas kawulanya, sebagaimana raja Melayu yang lain. Lembaga-lembaga lama tetap harus dia hormati, tetapi bagaimana bila orang tidak menemukannya?

Kini tidak bisa dibantah bahwa warga keturunan Minangkabau berada dalam kondisi yang lebih baik, tetapi mereka bukan orang Siak. Pada saat itu para kepala adat tidak bisa dan tidak berani menyalahgunakan kekuasaan, kecuali raja. Pertama-tama untuk menopang posisi mereka dan keturunan yang kurang tinggi, dan yang kedua karena tindakan penyelewengan mereka yang bisa dibandingkan dengan Sultan. Suatu kondisi lain yang jelas ikut mendukung kemudahan kondisi imigran Minangkabau adalah bahwa para kepala adat dari kalangan mereka sendiri berasal dari daerah yang sama. Mereka sebagai akibatnya merasakan sama seperti kawula mereka. Selain itu, mereka bukan raja melainkan para kepala adat dan memang tidak bisa dibantah bahwa hubungan para kepala adat dengan kawula mereka bersifat patriakal. Kawula mereka juga bukan hamba atau rakyat seperti yang dilakukan Sultan, melainkan anak buahnya.

Sebaliknya raja Siak berasal dari daerah lain. Mereka tidak berasal dari kalangan penduduk setempat dan harus menaklukkannya. Kawula mereka bukan rekan sesama suku melainkan taklukkannya. Jarak yang memisahkan raja Melayu dari kawulanya ini sebagai akibatnya di sini sangat besar, dan ini terjadi ketika Said menduduki tahta Siak. Penjelasan ini cukup memadai untuk menunjukkan bahwa di Siak ada dua kategori orang yang saling berbeda: kawula Sultan langsung dan warga keturunan Minangkabau atau anak IV suku. Keduanya kembali dibagi dan di sini digambarkan tersendiri.

a. Anak IV Suku

Warga yang berasal dari pedalaman di Siak dibagi menjadi empat suku: Lima Puluh, Tanah Datar, Pasisir dan Kampar. Yang termasuk

tiga suku pertama, hanya mereka yang berasal dari wilayah Minangkabau. Ketika Siak termasuk kekuasaan Johor, penduduk pedalaman memiliki daerah khusus, tetapi ketika itu mereka hanya dipimpin oleh penghulu. Setelah Raja Kecil menguasai tahta Siak, orang-orang Minangkabau menerima otonomi lebih luas sementara para kepala mereka bergelar Datuk. Tetapi Datuk bukan penghulu tua, yang telah menduduki jabatan di istana Johor, melainkan mereka menjadi para pembantu utama Minangkabau bagi Raja Kecil, dari setiap *luhak* satu orang.

Datuk suku Lima Puluh adalah seseorang dari Geuting, Datuk Tanah Datar berasal dari Sumanik dan Datuk Pasisir berasal dari Sianok Kota Gedang. Kawula mereka bukan anggota sukunya (yaitu apa yang menurut adat Minangkabau dimaksudkan sebagai suku) tetapi warga dari daerah yang sama atau dengan kata lain warga dari *luhak* yang sama. Yang termasuk suku Pasisir (dalam arti Siak) adalah semua orang dari *luhak* Agam dengan semua tanah yang terletak di belakangnya, sampai ke pantai barat; dari sana disebut istilah Pasisir.

Orang-orang yang membentuk suku Tanah Datar berasal dari bagian selatan dan suku Lima Puluh dari bagian timur Dataran Tinggi Padang. Suku Kampar pada saat ini tidak ada lagi. Ini baru muncul ketika Raja Ismail (Marhum Mangkat di Balai) untuk kedua kalinya menaiki tahta Kerajaan Siak, sampai menjadi suku tertentu, jadi sekitar tahun 1780. Dahulu warganya di bawah kekuasaan langsung Sultan dan atas namanya daerah itu diperintah oleh seorang sahbandar. Yang termasuk suku ini adalah semua orang Melayu dari Sumatra Tengah, yang tidak termasuk tiga suku lainnya, khususnya warga dari sungai Jambi, Indragiri dan Kampar Hulu.

Di Johor juga banyak orang Minangkabau menetap, yang menikah di sana. Sebagian dari mereka mengikuti Raja Kecil ketika menjalankan usahanya di Siak. Sejumlah besar anggota dari suku IV Suku dari pihak ayah berasal dari Minangkabau, sementara ibu mereka adalah perempuan Siak atau Johor. Begitu juga beberapa perempuan Minangkabau berangkat ke Siak. Pertama-tama pada mulanya ada beberapa yang ikut tiba bersama suami atau kerabatnya, tetapi sebagian besar baru datang kemudian kemari

selama kerusuhan yang ditimbulkan oleh kaum Paderi di Dataran Tinggi Padang, dan banyak perempuan saat itu yang tinggal di Siak untuk menghindari tindakan fanatik Nan Rancik.

Sering diduga bahwa orang-orang Minangkabau, untuk membela tradisi lamanya (terutama sehubungan dengan hak keluarga dan hak waris) bangkit melawan terhadap kaum Paderi. Tetapi yang menarik adalah bahwa orang-orang Minangkabau ini telah membiarkan tradisi serupa berkembang, segera setelah mereka tinggal di Siak hal itu juga dilakukan dengan mengikuti leluhur pendatang Minangkabau, yang ditemukan di Siak, dan di mana mereka bergabung menurut hukum dan sifat alamnya, tetapi dari sisi lain sangat mungkin mereka berhasil ketika mereka menghendaknya untuk mempertahankan adatnya.

Dari prinsip ini mungkin bisa diputuskan bahwa perlawanan yang dijumpai oleh kaum Paderi di antara penduduk bukan ditujukan terhadap usaha mereka untuk menggantikan adat lama dengan aturan-aturan dalam Quran, melainkan terhadap tindakan keras mereka terhadap apa yang disebutnya sebagai penyelewengan dan di antaranya termasuk merokok, makan sirih, adu ayam dan kegemaran lain dari orang-orang Melayu, yang di mata mereka bisa dijatuhi dengan hukuman mati. Ditinjau secara sepintas tampak bagaimana suku-suku (*luhak*) Minangkabau telah bertahan di Siak, ketika orang berpikir bahwa terutama pada mulanya sebagian besar orang Minangkabau yang tiba di Siak adalah pria dan menurut pandangan di Siak anak-anaknya tidak termasuk suku ayah tetapi suku ibu, juga pewarisan pada garis pria bisa dihormati.

Jadi bisa diputuskan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang Minangkabau dari wanita Siak bukan anggota IV Suku melainkan harus disebut sebagai orang Siak asli. Toh saat itu orang sering menemukan banyak anak buah IV Suku di Siak (pada masa lalu terutama) yang bisa dijelaskan dari berbagai sebab. Pertama-tama jelas seperti yang dikatakan, beberapa wanita Minangkabau ikut serta pergi. Selanjutnya anggota keluarga dan pengikut wanita yang dahulu dibawa Datuk di Siak, baik pria maupun wanita, dianggap termasuk suku Datuk. Seluruh kampung, di mana salah

satu dari Datuk ini menikah, beralih pada IV Suku. Keturunan dari wanita yang diperoleh dengan cara ini termasuk anggota IV Suku.

Selanjutnya ini menjadi kebiasaan dan selalu tetap ada kebiasaan ketika anak-anak Datuk, tanpa peduli di mana mereka menemukan istrinya, dianggap termasuk suku ayah mereka. Juga dengan cara ini ada sejumlah besar wanita yang disiapkan. Akhirnya oleh adat perantauan yang dominan di beberapa bagian Bukit Batu dan di pulau-pulau (di mana anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti ibu dan anak yang baru dilahirkan mengikuti ayahnya). Dari uraian di atas terbukti kesalahan dari apa yang umumnya diduga orang, bahwa warga IV Suku di Siak mengikuti adat Minangkabau, dibandingkan dengan penduduk asli yang pewarisannya lebih sesuai dengan aturan-aturan Quran. Hal berbeda telah berlangsung jauh sebelumnya.

Dari asal-usul IV Suku tampak bahwa mereka tidak memiliki *utan tanah*, dan sebagai akibatnya juga tidak memiliki *sialang*. Warga IV Suku tinggal tersebar di seluruh Siak; sebagian besar dari mereka tinggal di kampung utama di Siak, dan kebanyakan ladang mereka ditemukan di sepanjang Sungai Siak. Pajak tidak mereka setorkan, setelah pada tahun 1863 *pancong alas* (dan juga *tapak lawang*) dihapuskan di sebagian besar daerah Siak. Dahulu, di bawah kekuasaan Johor, hanya suku Pasisir yang bebas dari pembayaran *tapak lawang* (bebas) dan sebagai imbalan bagi jasa-jasa yang mereka tunjukkan dalam pembuatan mahkota Sri Tri Buwana, raja pertama Johor, sebagai pengganti mahkota pertamanya, yang hilang saat kapalnya kandas.

Suatu hak istimewa lain yang mereka peroleh adalah bahwa suku mereka tidak pernah disebutkan dalam keterangan atau panggilan pada saat peperangan. Mungkin Datuk sangat menyadari bahwa tujuan pemerintah tidak terletak pada penghapusan *pancong alas* dengan ganti rugi kepada Sultan (yang saat itu tidak memiliki hak), tetapi karena anggota suku mereka mendapatkan penghasilan yang penting, mereka tidak pernah mencoba memperbaiki ketimpangan ini. Para Datuk ini menduga bahwa sebelum kedatangan pemerintah, anak buah mereka tidak perlu menyetorkan

pancong alas dan hanya sedikit *tapak lawang*, atas dasar bahwa tanah itu telah mereka taklukkan dengan darah dan senjata.

Meskipun kebenaran dugaan ini belum bisa dibantah secara tegas, toh tidak mungkin terutama dengan memperhatikan pembebasan dari *tapak lawang*, yang sejak dahulu telah dinikmati oleh suku Pasisir. Satu-satunya kewajiban, *pusaka*, yang harus dipenuhi mereka terhadap raja adalah ikut berangkat ketika terjadi peperangan, pada kesempatan ketika setiap Datuk harus menyiapkan sebuah perahu bersenjata yang disebut *penjajab*, semuanya diperkuat dengan meriam oleh Sultan. Dalam peperangan terhadap Kota Intan, setiap Datuk selain anggota harus menyetorkan satu peti senapan. Juga mereka harus memberikan sumbangan uang dalam pembangunan sebuah rumah baru bagi Sultan, *astana*, tetapi yang hanya berjumlah beberapa dollar dari setiap keluarga. Dalam pembangunan istana Sultan terakhir setiap Datuk menyetorkan \$200.

Kewajiban anggota suku terhadap para Datuk mereka terutama adalah mendampinginya dalam perjalanan ke daerah lain, apakah dilakukan atas perintah Sultan atau atas inisiatif Datuk sendiri. Mereka kemudian harus memimpin rombongan dan para Datuk disertai dan dibantu oleh para pengikutnya. Selanjutnya dalam kesempatan pesta mereka mendampingi Datuknya sebagai *kabesaran*. Juga anak buah pada kesempatan khusus seperti membangun rumah dan sebagainya harus membantu mereka, tetapi kewajiban ini tidak diuraikan secara cermat, dan seluruhnya merupakan akibat dari posisi Datuk, dan dengan demikian ditentukan oleh pandangan rakyat. Seorang Datuk bisa meminta lebih banyak dari anak buahnya, kecuali di mana dia sebagai pemimpin rakyat memiliki hak dan seorang anak buah bertanggungjawab kepada Datuknya apabila melaksanakan tugas ini yang dibebankan kepadanya menurut adat.

Para datuk memiliki wewenang nuntut menghukum anggota sukunya dengan denda maksimal \$20. Selebihnya mereka dihukum oleh *kerapatan*. Namun wewenang ini jarang sekali digunakan, mengingat Datuk menganggap kekayaan itu tidak penting bila harus mengorbankan warga sukunya; mereka menyebutnya “makan anak sendiri”. Ketika jabatan Datuk kosong, oleh anggota kerabat datuk

yang meninggal atau diberhentikan dan oleh anggota suku yang kaya pembicaraan diadakan tentang siapa yang akan menggantikannya. Jika pilihan dijatuhkan, maka keputusan pengukuhanannya akan tergantung pada Sultan. Jika Sultan tidak menyetujui pilihan yang dibuat, maka seorang lain harus diusulkan. Jika Sultan setuju dengan usul ini, maka Datuk dari IV Suku lainnya harus didengar pendapatnya.

Calon harus mengalami percobaan selama beberapa saat, biasanya setahun. Setelah itu secara resmi dia akan dikukuhkan pada jabatannya, dan gelarnya di samping akta pengangkatan dan cap jabatannya diberikan kepadanya. Selanjutnya ada kebiasaan bahwa pada kesempatan ini Sultan akan menganugerahkan baju berwarna kuning, sebuah kain dan ikat kepala dari kain kasumba kepada calon pejabat baru. Dalam cap, Datuk IV Suku disebut sebagai wazir Sultan. Dahulu hanya datuk IV Suku serta Laksamana Bukit Batu, Bandar Pekanbaru dan sahbandar Siak yang menerima cap, di mana mereka semua disebut sebagai wazir Sultan, kecuali sahbandar Siak yang disebut sebagai wakil Sultan. Sekarang ini juga kedua Bintara menerima cap seperti Maharaja Dewa. Kekuasaan Datuk mencakup seluruh warga sukunya yang tinggal di Siak, selain di daerah Bandar Pekanbaru dan daerah kekuasaan Laksamana Bukit Batu, Bandar dari Pekanbaru, dan Sahbandar Siak menggunakan cap di mana mereka hanya diberi gelar sebagai wasir Sultan, selain terakhir yang disebut wakil Sultan.

Sekarang ini juga kedua Bintara itu memiliki cap seperti halnya Maharaja Dewa. Kekuatan Datuk mencakup semua anggota suku yang tinggal di Siak, selain di daerah Bandar Pekanbaru dan Laksamana Bukitbatu. Di Pekanbaru empat penghulu akan memimpin IV Suku. Meskipun pangkatnya tidak lebih tinggi daripada Datuk di Siak, mereka toh tidak bisa dianggap tunduk kepadanya atau diberi wewenang oleh mereka, juga meskipun hal ini terjadi. Para penghulu tersebut mungkin dahulu diangkat oleh raja Minangkabau dengan tujuan yang sama, dan mungkin sekaligus sebagai penghulu memimpin Johor-Siak di Buwantan, yakni untuk mengawasi hak-hak rekan-rekan mereka yang berada di sana. Juga di Pekanbaru tidak ada lagi kebutuhan bagi para pelindung ini kecuali

di Buwantan, karena di Pekanbaru para pengembara bukan hanya singgah, tetapi mereka di sana bisa menyediakan peluang perkapalan ke Singapura atau Malaka, sementara mereka hanya mengunjungi sebentar Buwantan.

Para penghulu juga tidak menerima pengangkatannya dari Datuk melainkan dari Sultan sendiri, tetapi yang mendengar dari datuk suku terkait tentang penghulu yang diangkat. Satu-satunya yang bisa disebutkan tentang hubungan penghulu dengan datuk dalam pasal 4 adalah bahwa penghulu bersama datuk di Siak “mengikut dan menurut sepanjang adat pusaka”, sementara dalam akta pengangkatan para datuk tidak ada yang bisa dikatakan. Kewajiban penghulu hanya mengarahkan tindakan pemerintahnya terhadap para datuk Siak.

Penghasilan penghulu IV suku di Pekanbaru dahulu:

1. andil dari cukai pengangkutan yang dipungut di Pekanbaru;
2. andil dalam *pengeretan* (hak atas ikan trubuk yang diterapkan)
3. penjualan candu secara eceran
4. dengan kebebasan cukai bagi sebuah perahu dengan barang-barang dagangan di Siak
5. andil mereka dalam denda

Semua penghasilan ini dirampas dari mereka kecuali penghasilan nomor 5 yang tidak berarti. Penghasilan nomor 1 dan 2 dihapuskan atas perintah residen Pantai Timur Sumatra pada tahun 1878, mengingat hal itu dianggap bertentangan dengan traktat tahun 1858, dan sub 3 pada saat yang sama mengingat hak untuk penjualan candu di luar kuala Sungai Mandau ditolak oleh penguasa pribumi. Penghasilan sub-4 dirampas oleh mereka dengan pengambil alihan cukai ekspor-impor oleh pemerintah, di mana tampaknya orang melupakannya.

Kewajiban mereka terhadap raja terutama adalah menyerahkan sebuah perahu bersenjata, *penjajah*, dalam perang dan pengajuan dua kerbau dengan perayaannya pada pesta besar. Seluruh kawula dari empat penghulu yang disebutkan di atas ditafsirkan mencapai 200 keluarga. Wewenang hukum penghulu bisa mencapai \$ 2,40 (10 real), sementara karapatan di Pekanbaru, di mana Bandar dan 4 penghulu ikut duduk, bagi anggota IV suku ada

hak yang mencapai \$20. Persoalan lebih besar di Siak diselesaikan oleh karapatan. Para anggota IV suku yang tinggal di daerah Datuk Laksamana dari IV suku berada di antara mereka sebagai utusan Datuk Siak.

Ini merupakan suatu akibat dari kondisi bahwa mereka hanya sedikit jumlahnya serta ada adat lain tentang kepemilikan anak-anak yang berlaku daripada di Siak. Anak-anak yang lahir ganjil termasuk ibu dan yang genap termasuk milik ayah. Sebagai akibatnya, di sini suku tidak murni dan orang termasuk IV suku yang di tempat lain tidak termasuk di dalamnya.

Jumlah jiwa yang dimuat setiap suku di Siak, selain di Pekanbaru pada saat itu, menurut penafsiran mentah berjumlah untuk suku:

| | |
|---------------|------|
| - Lima Puluh | 800 |
| - Tanah Datar | 150 |
| - Pasisir | 600 |
| - Kampar | 1000 |

Banyak warga suku pergi pada tahun-tahun belakangan ini, di mana beberapa orang tinggal di pulau Bengkalis, sehingga kini mereka menjadi kawula pemerintah. Suatu adat Siak khas di mana para Datuk dari IV suku di Siak ikut terlibat dan yang juga menunjukkan jenis kebesaran, dan karenanya di sini bisa disebutkan tentang *nobat*.

Nobat merupakan sejenis orkestra yang terdiri atas dua genderang yang digantungkan di leher dan sebuah *serunei*, seruling Melayu. Orkes ini hanya bisa dimainkan pada upacara dan pesta-pesta besar dan kemudian dimainkan sejak pagi sampai petang selama setengah jam. Selama musik ini bermain, orang tidak boleh berjalan; pelanggaran akan dihukum dengan denda \$ 0,36 yang menjadi hak orang Bintan dan Bulang. Denda ini biasanya tidak bisa dianggap sebagai hukuman, tetapi lebih banyak dibebankan dengan cara yang halus.

Segera setelah *nobat* berhenti, ada sembilan tembakan meriam; kemudian kepada semua hadirin kue-kue dan hidangan lain dibagikan. Para pemain musik adalah warga suku Sawang. Khasanah ini terdiri atas dua berkas, lagu yaitu tangis-tangisan Naga atau dalam bahasa Arab disebut *Ibrahim Chalil* dan arak-arakan. *Serunei*

menunjukkan melodi, sementara salah satu genderang yang disebut *menjelalu* dan yang lain disebut *meningkah*. Begitu *nobat* mulai bermain, empat Datuk tampil dan menghias diri dengan *tampan-tampan* dan tetap bertahan selama masih dimainkan. Hal serupa terjadi pada para wanitanya di keputren Sultan. *Tampan-tampan* merupakan sebuah kain kuning panjang, yang dipakai oleh Datuk pada upacara di pundak kiri, sebagai tanda kebesarannya.

b. Kawula Sultan Langsung

Kawula Sultan langsung bisa dibagi menjadi tiga: anak raja, hamba raja dan rakyat raja. Anak raja adalah keturunan beberapa orang raja yang bersama-sama membentuk kelompok bangsawan, membentuk suatu suku tertentu, di mana Mangkubumi menjadi pemimpinnya. Mereka terutama tinggal di kampung pusat di Siak dan selanjutnya di Tebing Tinggi di pulau tersebut. Beberapa dari mereka yaitu kerabat terdekat Sultan menerima dari mereka penghasilan tetap bagi kebutuhan hidupnya, sementara selain itu juga tergantung pada kemurahannya.

Dari mereka, hanya sedikit yang telah dikatakan daripada keturunan raja-raja di wilayah Melayu. Mereka merasa dirinya keturunan tinggi, untuk bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja, dan memilih suatu kehidupan miskin yang ditutup dengan pemberian bantuan, di luar hasil yang mereka peroleh melalui jerih payahnya sendiri.

Ada beberapa orang yang bisa membuka ladang melalui anak semang mereka, tetapi untuk itu biasanya menentukan aktivitasnya. Terutama posisi keturunan raja-raja perempuan sangat disesalkan, terutama karena mereka adalah Said, dan sebagai akibatnya hanya dengan Said perkawinan bisa dilangsungkan. Dengan demikian mereka sering tetap tidak dipercaya dan mencoba dengan cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anggota keturunan Arab yang berjumlah 150 orang ini, termasuk beberapa orang Said, juga membentuk suku tertentu di bawah perintah langsung Mangkubumi.

Kawula langsung lain dari Sultan, orang kebanyakan, kembali dibagi menjadi hamba raja dan rakyat raja. Masih belum jelas apa kriteria kedua kelompok orang ini, tetapi tampak bahwa ini harus

dicari pada kepatuhan mereka terhadap Islam. Hamba raja pada umumnya adalah umat Islam yang patuh, dan mungkin meskipun mereka sebagian besar tidak mengikuti semangat ajaran Islam, kewajiban agama harus dilengkapi oleh mereka. Rakyat raja hanya memeluk Islam di atas kertas dan karenanya tidak banyak yang menonjol. Biasanya apabila orang mendengar tentang orang Melayu di Siak, ini tidak termasuk mereka, tetapi mereka dibandingkan hal itu disebutkan menurut bagian daerah di Siak tempat mereka berada.

Rakyat raja menurut adat tidak bisa makan bersama dengan hamba raja, dan hamba raja tidak memberi para putrinya kepada rakyat raja untuk dikawini. Belakangan ini perbedaan tidak lagi bisa diperhatikan, setidaknya sekarang ini berlaku bagi kedua kategori itu. Hamba raja kembali dibagi dalam sub-bagian berikut ini:

1. Kawula empat penghulu Siak
2. Hamba raja dalam
3. Orang Bintan dan Bulang
4. Warga Teratak Buluh dan Tiga kampung

Hamba raja IV penghulu sebagai kawula empat penghulu Siak menghuni daerah di luar sub a yang diuraikan.

Mereka tinggal di sana sebelum kedatangan Raja Kecil di Siak, dan saat itu menjadi kawula raja Johor, yang atas namanya diperintah oleh Syahbandar di Sabah-aur. Legenda menunjukkan bahwa empat penghulu saat itu tidak hadir, tetapi bahwa setelah kedatangan Raja Kecil mereka baru diangkat olehnya dan dari keturunan syahbandar yang dipecat oleh Raja Kecil ini. Syahbandar dipecat oleh Raja Kecil, karena atas perintah majikannya dia memungut cukai dari Raja Kecil, ketika masih menjadi petualang, yang ditulis dalam pengantar sejarahnya.

Semakin jelas bahwa empat penghulu juga selama ini telah ada sebelum syahbandar. Toh dia adalah seorang pejabat Johor, sementara penghulu mungkin akan menjadi para pemimpin rakyat asli dari penduduk Siak yang tunduk kepada Johor. Bagaimanapun juga jelas bahwa sejak Raja Kecil tidak ada syahbandar lagi di Sabah-aur, juga sejak saat ini empat orang penghulu telah memerintah penduduk di sepanjang hilir Sungai Siak. Para penghulu ini adalah

Siak kecil, Rempah, Siak besar dan Betung. Penghulu tidak berada langsung di bawah Sultan.

Di atas mereka terdapat dua pejabat yang diangkat oleh Sultan dan bergelar Bintara. Pejabat pertama adalah Bintara kiri dan yang kedua adalah Bintara kanan. Seseorang yang mengawali sebagai bintara kanan, kemudian akan diangkat menjadi bintara kiri. Bintara pasti berasal dari Siak kecil atau Rempah, dan yang satu dari Siak besar atau Betung. Melalui pengangkatan mereka, mereka berasal dari suku-sukunya dan anak-anaknya sejauh mereka bukan bintara, terbagi dalam *juwak raja*, dan atas dasar pertimbangan bahwa keturunan seorang bintara tidak bisa ditekan di bawah seorang penghulu. Di bawah salah seorang bintara (sekarang bintara kiri), para penghulu Siak kecil dan Rempah berada dan di bawah yang lain (sekarang bintara kanan) penghulu Siak besar dan Betung. Perintah dari Sultan kepada para penghulu disampaikan oleh bintara, yang harus memperhatikan pelaksanaannya.

Selanjutnya bintara yang ditunjuk melalui gelarnya, sejenis dewan kerajaan dan ditugasi untuk mempertahankan upacara ini pada perayaan khidmat. Ketika rakyat menerima perintah raja (terutama gelar dari para kepala dan bangsawan yang baru saja diangkat) maka ini dilakukan lewat suara bintara. Penghasilan bintara dahulu diatur dalam akta pengangkatannya dan biasanya terdiri atas pelepasan hasil sebuah sungai, kecuali perdagangan *serahan* dari sebagian penduduk pedalaman. Jadi para bintara Jobei dan Jaya Pahlawan dahulu mengeksploitasi sungai Rawa, sementara bintara akiri sekarang ini dalam pengangkatannya mendapatkan hak monopoli untuk menjual besi dan garam di sepanjang sungai Mandau, seperti memungut 10% cukai dari semua hasil hutan, yang diekspor dari sungai ini. Cukai ini dalam akta pengangkatan disebut sebagai *pancong alas*; ini merupakan cukai ekspor murni.

Bintara kanan sekarang ini dengan pengangkatannya memperoleh hak monopoli untuk menjual garam kepada orang Dayun (*talang*). Tidak ada keterangan tentang besi, tetapi tampaknya tujuannya adalah bahwa dia memiliki hak yang sama. Orang Dayun dalam akta yang sama diletakkan di bawah perintah bintara kanan. Dengan penghapusan *pancong alas*, penghasilan bintara yang

diuraikan di atas dihapuskan dan mereka untuk itu sebagai gantinya menerima gaji f 500 per tahun, sementara perdagangan *serahan* atas *pertalangan* Dayun diserahkan kepada Tengku Sulung Negara dan yang di sepanjang sungai Mandau kepada Tengku Unus, yang pertama adalah putra resmi dan yang kedua adalah putra selir dari Sultan Ismail.

Penghasilan empat orang penghulu dahulu adalah *lawang*, sebanyak 10 gantang padi per keluarga, bagi masing-masing ladang yang dibuka di daerahnya, di samping *pancong alas*, 10% dari produk hutan yang dikumpulkan di daerahnya. Juga para penghulu masih memiliki wewenang untuk menjatuhkan denda kawulanya sampai 10 real *duit ripis*, \$ 2,40 tetapi tidak pernah memanfaatkan wewenang ini. Pertama-tama karena kawulanya tidak bisa membayar, dan kedua karena para kepala adat tidak mau memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kawulanya.

Di sini perlu dicatat bahwa hukuman denda di atas 10 real sampai \$ 20 termasuk wewenang bintang, tetapi yang juga tidak pernah dimanfaatkan. Persoalan yang lebih penting hanya bisa diselesaikan oleh kerapatan. Penghulu ditunjuk dengan penyediaan jabatan oleh yang bersangkutan, biasanya dari anggota keluarga (putra atau saudara) penguasa sebelumnya dan oleh Sultan dengan akta pengangkatan atau surat dikukuhkan, di mana pada kesempatan ini mereka menerima *pesalinan* dari raja, yang berupa sebuah sarung, sebuah baju dan sebuah ikat kepala. Kawula mereka harus melaksanakan banyak pekerjaan; mereka harus membangun jembatan, dermaga dan kolam, serta pada saat upacara dan kesempatan lain mendirikan barak-barak tetapi materialnya tidak perlu disetorkan oleh mereka. Selanjutnya mereka harus menghias rumah raja pada saat pesta, dan juga menyiapkan makanan dan minuman bagi para tamu dan menghidangkannya di mana kaum pria melayani tamu pria dan para wanita melayani tamu wanita. Mereka jika perlu harus mendampingi perjalanan Sultan, dan mengemudikan perahunya, biasanya pada saat perang juga ikut bertempur. Selain itu dalam perkawinan empat orang pria mendampingi mempelai pria dan empat orang wanita mendampingi mempelai wanita yang disebut *menjawat*, sejenis pengawal

kehormatan selama beberapa hari, sehingga mereka bisa tinggal bersama yang kadang-kadang berlangsung berbulan-bulan.

Semua pekerjaan ini menjadi sangat penting dengan memperhatikan sedikitnya jumlah orang yang berada di bawah para penghulu di sini. Dari situ terbukti bahwa selama pesta yang diadakan oleh Sultan pada tahun 1878 ketika khitanan tiga orang putranya dan perkawinan dua orang putrinya, semua orang tunduk pada perintah penghulu, pria dan wanita, tiga belas bulan lamanya dengan cara yang diuraikan di atas harus merayakan pesta, sebagai akibatnya pada tahun itu mereka tidak siap menggarap ladangnya, atau mengerjakan sesuatu yang diperlukan bagi kebutuhannya. Suatu kebiasaan yang kembali menyangkut kategori orang di sini dan biasanya mereka menjadi korban adalah pungutan.

Di sini orang memahami kewajiban masing-masing dari empat penghulu untuk menyerahkan empat orang kepada setiap Sultan baru, apakah saat kenaikan tahtanya atau ketika dia menghendaknya sebagai isi istana seperti yang sering disebut orang. Mereka harus menjalankan berbagai aktivitas rumahtangga di tempat tinggal raja, selain pekerjaan berat dan kasar yang dilakukan oleh anak semang. Meskipun demikian mereka mirip seperti budak dan disebutkan bahwa mereka harus melayani Sultan dan keluarganya meskipun adat jelas melarangnya. Mereka diambil dari keluarganya dan dari sukunya, dan segera menjadi dayang, yaitu secepat mungkin ditunjuk untuk diserahkan kepada Sultan. Mereka menjadi anggota suku atau *hamba raja dalam*. 'ketika mereka menikah, hadiah perkawinan yang diberikan baginya dibayarkan kepada Sultan. Dayang-dayang ini ditunjuk oleh penghulu dan secepat mungkin ini terjadi ketika setiap usaha memiliki resiko sendiri. Hanya sedikit ambisi di antara orangtua untuk menjadikan anaknya sebagai dayang. Jika ada kesempatan bahwa seorang Sultan baru akan naik tahta, semua gadis muda harus dikawinkan sebelum dipilih untuk itu. Juga disebutkan bahwa beberapa orang mencoba menghindari kondisi yang kurang menyenangkan itu. Mungkin juga semua penghulu bisa menyertakan antara 300-400 keluarga, jadi kira-kira 1600 jiwa. Kemampuan produktif yang di sini tidak begitu besar, dengan pemindahan 16 orang gadis ke suku *hamba raja dalam* oleh

setiap Sultan baru juga tidak lebih besar, sehingga tampak bahwa setelah beberapa generasi empat orang penghulu Siak segera lenyap.

Kategori *hamba raja dalam* pada mulanya terdiri atas keturunan Raja Kecil, ketika dia menguasai Siak. Di sini ada warga dari berbagai keturunan, yang padanya bergabung dalam perjalanannya. Tetapi kebanyakan orang-orang Johor yang bergabung dengan mereka, dalam usahanya untuk menguasai tahta Johor. Meskipun juga ladang-ladang dibuka di sepanjang Sungai Siak, toh kebanyakan mereka tinggal di dekat rumah Sultan. Terhadap Sultan pada umumnya mereka memiliki kewajiban yang sama seperti *hamba raja IV penghulu*, selain tidak perlu menyetorkan dayang. Mereka pada umumnya lebih terawat karena posisinya lebih baik. Sebagai pimpinannya diangkat seorang Datuk, yang memiliki gelar Maharaja Dewa, dan yang menerima gaji dari Sultan f 1000 per tahun.

Suatu bagian khusus dari *hamba raja dalam* adalah orang Bintan dan Bulang, yang sebagian tinggal di kampung utama Siak dan sebagian lagi di Pecah Tima. Mereka adalah keturunan dari silsilah Raja Kecil yang berasal dari pulau Bintan dan Bulang (di kepulauan Riau Lingga). Mereka tampaknya telah melihat kesempatan ini, setidaknya mereka terbukti mendukung raja, karena prestasi kerja mereka dipersembahkan kepada raja seperti dalam perang, kini masih melayani penembakan meriam yang selalu terjadi pada saat kesempatan upacara atau keagamaan. Selanjutnya dalam perkawinan raja, empat wanita mereka setiap malam menjadi penjaga di dekat dipan mempelai wanita (*menjawab*) dan selama *nobat* dipukul.

Pada kesempatan ini mungkin kira-kira 200 jiwa yang teramsuk orang Bintan dan sekitar 100 orang Bulang berada di sini. Yang masih termasuk *hamba raja dalam* adalah *jumah raja* dan *hamba raja injelei*. *Jumah raja* diterjemahkan dengan bujang atau anak laki bangsawan, tetapi di Siak memiliki makna lain. di sini para pegawai pribadi Sultan dan keluarganya, tidak sebagai tahanan tetapi sebagai opas, mandor, juragan, penulis, pemegang pedang dan tali api dan sebagainya. Mereka adalah keturunan dari para bintang lama dan bisa tampil sebagai keturunan bangsawan (sejauh mereka bukan

bintara) yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan penghulu, tetapi sebagai *juwak raja* dan dibagi dalam suku *hamba raja dalam*. Jumlahnya ditafsirkan sekitar 300 orang.

Hamba raja injelei adalah mereka yang pada mulanya termasuk *IV suku* tetapi karena sesuatu keluar dari kelompok itu (akibat sengketa, perselisihan dan sebagainya) dan berada di bawah perintah langsung Sultan. Jumlah mereka sangat sedikit. *Hamba raja* di Bukit Batu dan di Pekanbaru berada di bawah perintah Datuk Laksamana dan Datuk Bandar di sini. Keduanya adalah pejabat Sultan, meskipun kedudukan mereka tampaknya bisa diwariskan pada keluarganya menurut kebiasaan. Menurut kisah Laksamana tentang asal-usulnya (di mana tidak ada alasan untuk meragukannya) mereka pasti keturunan Panglima Jamal, seorang Bugis yang memihak kepada Marhum Bukit dalam peperangan antara dua orang putra Raja Kecil Marhum Mempura (Sultan Muhamad) dan Marhum Bukit. Jadi ketika Marhum Mempura dinaikkan di atas tahta Siak oleh VOC, Jamal ditangkap oleh Kompeni, diberi cap di Malaka dan selama beberapa tahun dirantai.

Setelah pengkhianatan Gontong pada tahun 1759, seperti yang disampaikan Raja Alam kembali dengan bantuan Kompeni memulihkan kekuasaan Siak, setelah beberapa kapal Kompeni mengusir Raja Muhamad dengan susah payah. Terutama di atas Pulau Gontong perjalanan sangat sulit, karena sungai ini ditutup dengan pohon-pohon besar. Panglima Jamal kini berangkat bersama beberapa orang melalui air, dan membabati kayu dengan parang atau gergaji. Dalam laporan Komisaris Visboom tentang ekspedisi itu, di sini bisa disampaikan sebagai berikut: "Sementara itu empat orang utusan Raja Alam berlayuar dan tiga tali pertama diputuskan. Setelah itu kami berjanji kepada mereka yang masih akan menarik lima tali lagi hadiah 30 real Spanyol, yang dilakukan oleh juru kemudi van Egten".

Setelah perang, Panglima Jamal menjadi sahbandar di Bukitbatu, dan dia menerima hak monopoli debet garam dan candu di sana bagi kebutuhan hidupnya. Ketika setelah kemangkatan Raja Alam, dia digantikan oleh putranya Markum Pekan (Rajan Mohamad Ali) dan segera kembali diusir oleh kemenakannya putra Raja

Mohamad Markum Mangkat Dibalei (raja Ismail), Bandarbatu melarikan diri ke Malaka, mungkin karena dia takut pada pembalasan Raja Ismail, karena dia telah ikut membantu mengusir ayahnya. Salah satu putranya, Encik Brahim, tetap tinggal di Siak dan setelah Said Ali menyingkirkan kemenakan dan iparnya marhum Mangkat Didungen (Sultan Yahya) dari tahta (di mana Encik Brahim tersebut memihak kepada Sultan Ali), dia diangkat menggantikan ayahnya sebagai *Bandar* di Bukitbatu.

Keturunan mereka menduga bahwa *Bandar* diberi tanah oleh Said Ali, dan bukan putranya Encik Chemis yang menggantikannya setelah kematiannya sebagai *Bandar* dan oleh Sultan Ismail (yaitu mantan Sultan) diangkat menjadi Laksamana. Mungkin saja hal ini benar, tetapi lebih mungkin bila Laksamana ini dianugerahi dengan tanah (yaitu penghulu Domei) oleh Sultan Ismail. Laksamana sekarang ini, Encil Abdullah (putra Encik Chemis yang masih hidup, tetapi diberhentikan karena usia tuanya) menduga bahwa tidak ada akta pengangkatan lama yang tersisa, karena setiap saat konflik terjadi dengan Wilson. Dia menduga bahwa pemberian daerah yang kini dikuasai olehnya dilakukan oleh Said Ali sebagai imbalan atas andil Encik Brahim dalam menaklukkan wilayah sebelah barat Siak, di mana dia masih menerima gelar Maharaja Lela Setia (lihat selanjutnya apaan yang disampaikan di atas).

Kawula Sultan kini tunduk pada kekuasaan langsung, yang tinggal di daerah yang diperintah oleh Laksamana. Seperti kawula yang lain, mereka harus menunjukkan jasa-jasanya jika diminta, tetapi ini tampaknya kurang begitu terasa pad amereka dibandingkan orang-orang yang tinggal lebih dekat dengan Sultan. Dahulu Panghulu Domei menjadi pemimpin penduduk sekarang ini, dari Tanjung Balei sampai Perbahageian Arus (Sungei Senebui) tinggal di sepanjang pantai. Tetapi semakin banyak pengaruh Laksamana ini, semakin banyak kekuasaan Penghulu berkurang, sehingga akhirnya dia didesak ke Sungei Domei dan semua penghasilan dari bagian lain daerahnya jatuh pada Laksamana. Penghulu Domei terakhir sejak lama meninggal dan pejabat baru belum diangkat. Ketika dari atas tidak ada pengawasan bagi

pelestarian jabatan Penghulu ini (mungkin tidak diperlukan), maka dia segera akan punah.

Laksamana berhak menjatuhkan hukuman sampai \$20; persoalan besar dihadapkan di depan Karapatan di Siak. Di atas dengan singkat disampaikan bahwa para anggota IV suku, yang tunduk padanya tinggal di daerah Laksamana. Ini mungkin menunjukkan bahwa dahulu tidak diperlukan untuk mengangkat penghulu Minangkabau di Bukitbatu, seperti di Pekanbaru dan Siak, dan kemudian juga tidak ada yang diangkat karena warga suku terlalu sedikit. Datuk Laksamana dianggap sebagai paling berkuasa di antara para datuk Siak. Prinsip bahwa orang IV suku di Bukitbatu – selain dari mereka yang tinggal di sana dari tempat lain – menyatakan bahwa menurut kebiasaan yang berlaku di antara raja-raja di daerah ini, anak-anak bernomor ganjol akan mengikuti suku ibunya dan nomor genap mengikuti ayahnya. Menurut adat perkawinan *semando* ini bukan merupakan orang IV suku.

Jumlah *hamba raja* yang tunduk pada Datuk Laksamana Bukitbatu menurut penafsiran mencapai 160 orang. Mereka tinggal di kampung Baru Bakul (di Bukitbatu) sebanyak seratus *hamba raja*, yang tidak tunduk kepada Datuk Laksamana tetapi langsung berada di bawah Sultan. Sebagai pimpinan mereka diangkat seorang *penghulu kanaikan* (*kanaikan* adalah sebuah kata pujian bagi perahu raja). Orang-orang ini harus mengemudikan perahu pribadi Sultan. Di pulau Merbouw masih terdapat 120 orang *hamba raja* dan di pulau Tebing Tinggi ada 200 orang, yang termasuk *hamba raja*. Mereka tiba di sana sebagai pengikut keturunan raja yang memiliki apanase. Tentang *rakyat raja* di daerah Datuk Laksamana, kemudian sesuatu masih perlu disampaikan. Seperti di Bukitbatu, di Pekanbaru Sultan diwakili oleh seorang pejabat yang memiliki gelar Bandar di sana.

Dia menjadi pemimpin *hamba raja* yang ditemukan di sana bahwa semua orang yang tidak termasuk orang IV suku, akan berada di bawah penghulu mereka. Dia memiliki wewenang yang sama seperti para datuk Siak sehubungan dengan kawulanya; dia juga berhak menghukum mereka sampai \$20. Para anggota IV suku melalui para penghulu mereka bisa dihukum oleh *karapatan* di Pekanbaru, di mana Bandar dan 4 orang Penghulu ikut bersidang.

Persoalan yang masih lebih besar lagi dihadapkan pada *karapatan* di Siak. Bandar Pekanbaru pada ulanya hanya merupakan pegawai Sultan dan dengan demikian tidak menerima *utan-tanah*. Penghasilannya terdiri atas sebuah perahu bebas cukai di Sungai Siak, yang diambil alih oleh pemerintah senilai f 200 per tahun selain andilnya dalam denda, sebuah cukai atas orang asing yang lewat yang tidak termasuk IV suku, andil dalam *repang* dan *pengeretan* (pajak atas *trubuk* yang lewat).

Kedua pajak ini keudian dilarang tanpa ganti rugi yang diberikan kepada Bandar. Sebaliknya Bandar oleh Sultan dianugerahi dengan *utan-tanah*, di mana dia mendapatkan prioritas yang berkaitan dengan kepemilikan itu. *Utan-tanah* yang diberikan kepadanya pada mulanya merupakan hak milik batin dari Senapelan (lihat di atas). Kapan ini terjadi dan mengapa masih belum diketahui secara pasti. Alasannya mungkin adalah bahwa Sultan akan memberikan gaji yang layak kepada para pegawainya, tetapi ini dilakukan dengan mengorbankan *batin* Senapelan. Pemberian *utan-tanah* disebutkan dalam akta pengangkatan pada tahun 1276 H (1859-1860) kepada Bandar keempat, ayah Bandar sekarang ini.

Mungkin pelimpahan ini dahulu tidak terjadi, karena penghulu Pekanbaru memastikan bahwa setelah pemungutan *pancong alas* dan *tapak lawang* diambil alih dari *batin* Senapelan, ini hanya dipungut sekali oleh Bandar, ketika *pancong alas* (dan *tapak lawang*) dihapuskan, setelah ini oleh pemerintah diambil alih, dan pungutannya dilarang melalui pengumuman Residen Riau tahun 1863. Sultan memberi ganti rugi Bandar dengan f 200, tetapi jumlah ini hanya dibayarkan sekali kepadanya. Hasil pohon lilin sekarang ini terutama dimiliki oleh Bandar. Dahulu hak ini juga berlaku bagi *batin* Senapelan, yang harus menyetorkan sampai $\frac{3}{4}$ (bukan $\frac{4}{5}$) kepada Sultan.

Para kawula *batin* tersebut termasuk *rakyat raja* dan kemudian akan diperlakukan demikian. Jumlah *hamba raja* yang tunduk kepada Datuk Bandar di Pekanbaru berjumlah 200 jiwa. Dengan demikian masih disebutkan bahwa di sana ada 40-an orang tinggal yang merupakan keturunan Arab. Orang-orang yang termasuk Tiga Luhak, Tiga Kampung dan Teratak Buluh juga dianggap termasuk

hamba raja. Di samping apa yang disampaikan di atas tentang mereka, tidak ada lagi yang bisa disebutkan. Diduga bahwa para penghulu Tiga Kampung dan Teratak Buluh wajib untuk menyerahkan seekor kerbau masing-masing kepada Sultan pada saat upacara pesta, dan pada tahun 1878 mereka masih melakukannya; juga mereka dalam perang melarikan diri ke Kota Intan.

Tetapi tampak bahwa mereka lebih banyak berada di bawah perlindungan Siak daripada dianggap tunduk kepadanya. *Rakyat raja* dimaksudkan sebagai kawula Sultan, yang bukan *hamba raja*. Posisinya pada umumnya tidak bisa diabaikan. Jika *hamba raja* memiliki beberapa hak yang harus dihormati oleh Sultan (adat), semua yang diberikan oleh Sultan kepada rakyatnya dianggap sebagai pemberian karena kasihan. Mereka oleh orang Eropa dulu disebut sebagai *taillable et corveable a merci*. Begitu juga di sini kenyataan lebih baik daripada teori, karena semua rakyat juga tidak menentang perintah raja, mereka bisa menghindarkan diri dengan bersembunyi di hutan yang tidak bisa ditembus, apabila kepatuhan mereka terlalu lemah. Dari sini tampak bahwa juga dari pihak raja perhatian masih harus diberikan sehingga papan penyiksa tidak lagi digunakan. Kekuasaan tetap tidak ada padanya untuk memaksakan kehendaknya dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh kecuali mengungkapkan ketidakpuasannya.

Rakyat raja kembali dibagi menjadi *rakyat lentera* yang memeluk Islam dan *rakyat banang* yang sama sekali bukan Islam. Yang termasuk *rakyat lentera* adalah orang Talang, di mana juga orang Mandau ikut diperhitungkan, seperti kawula para *batin* Melayu di sepanjang Sungai Siak dan orang-orang yang menghuni tanah seperti yang dimaksud pada sub b, c dan d. Juga untuk itu masih diperhitungkan *rakyat laut* yang tinggal di daerah Datuk Laksamana, kawula empat *batin* Melayu di Bengkalis dan Orang Cedun serta Senggarau. Semua orang ini terutama hidup dari pertanian padi selain *rakyat laut*, dan *rakyat lantera* yang tinggal di Bengkalis, yang juga menemukan sumber penghasilannya dari penangkapan ikan.

Semua orang mengumpulkan hasil hutan, apabila kelaparan mengancamnya. Yang termasuk kelompok terakhir ini adalah orang

Sakei, Akit, Rawa dan Utan. Selain itu dalam nota ini, orang Talang disebutkan berbeda dengan orang Mandau. Ini tidak tepat meskipun dipertegas dengan penggunaan ungkapan. Talang berarti seseorang yang tidak tinggal di sepanjang aliran sungai. Orang Mandau dengan demikian merupakan sejenis Talang, dan mereka juga disebut Talang Mandau. Orang Talang biasanya dibedakan dengan orang Melayu, yang ladang-ladang mereka terletak dekat aliran sungai. Mengapa orang Talang telah memilih tinggal di hutan, jauh dari jalan, belum bisa dipastikan. Jelas ini masih terjadi bagi wilayah mereka di sepanjang sungai. Mungkin prioritas ini dahulu dicabut, kecuali mereka menganggap dirinya lebih aman tinggal di dalam hutan lebat dan mereka tidak salah yang membuktikan jumlah penduduknya sangat besar.

Bagaimana *batin* Prawang tinggal di hutan yang dihuni olehnya di atas kwala Mandau, tidak diketahui. Di atas dalam gambaran tentang daerah yang dihuni oleh orang Talang dan oleh orang Mandau, tentang orang-orang ini telah disampaikan lebih lanjut dan selain itu bisa dirujuk. Sultan menjalankan perdagangan *serahan* bagi orang Talang dan bagi orang Mandau, yang menjadi sumber penghasilan, yang hasilnya biasanya dia serahkan sebagai upah bagi pegawai selain kepada anggota keluarga bagi kebutuhan hidupnya. Perdagangan *serahan* hanya terdiri atas parang dan garam, tetapi juga disebutkan bahwa bila kebutuhan penduduk hampir semuanya terpenuhi dengan komoditi ini, perdagangan dalam komoditi lain yang diperlukan (terutama pada kain) sulit untuk dikelola oleh orang lain, kecuali olehnya yang melakukan perdagangan *serahan*.

Perdagangan *serahan* ini tidak berbeda dengan apa yang kita sebut sebagai monopoli debet garam dan besi, dan tidak bisa dibantah bahwa pandangan yang mendasarinya tidak begitu buruk. Karena itu toh dalam dua kebutuhan hidup utama dari orang Talang yang tinggal jauh dilengkapi dengan mudah. Garam dan besi memang mahal, tetapi tampak di sana bahwa selalu tidak perlu dicari jauh dari jalan. Tetapi telah jelas bahwa tentang perdagangan *serahan* di darat seperti Siak, oleh mereka yang menerima hak untuk mengeksploitasinya, segera disalahgunakan. Penduduk toh

menyerahkan semuanya kepadanya, sementara baginya tidak mungkin untuk mengadu tentang ketidakadilan yang terjadi. Mereka bisa yakin terhadap tidak ada manfaatnya pengajuan keluhan itu. *Pertalangan* toh terutama pad amasa lalu dianggap sebagai lahan yang cocok oleh anak raja, untuk bisa memenuhi nafsunya bagi harta kawulanya.

Pemungutan berbagai produk yang tidak ditetapkan dan berbagai kesewenang-wenangan mendorong orang Talang selama kunjungan itu dan kembali ke hutan mereka, di mana mereka tidak menduga bahwa kunjungan itu telah selesai. Penjualan diam-diam oleh pihak ketiga tidak mungkin dilakukan, karena penduduk tinggal tersebar luar dan dengan demikian komoditi itu hanya bisa diperoleh di lokasi tertentu, yang bisa dibuktikan. Pada saat itu perdagangan *serahan* hampir seluruhnya merupakan barter dan pengangkutan produk yang akan ditukarkan tidak bisa dilakukan secara diam-diam. Tidak perlu ditegaskan bahwa perdagangan *serahan*, yang sah dan diperlukan sejak awal menjadi sumber hambatan bagi perkembangan daerah itu dan peningkatan daya produktifnya.

Di bawah pemerintahan kita bisa diduga bahwa penyediaan garam dan besi yang diperlukan di samping komoditi rumahtangga pribumi lainnya bisa diserahkan pada persaingan bebas, terutama dari orang-orang Cina, di mana bukan hanya barang-barang itu bisa dijual lebih murah dan lebih baik tetapi penduduk juga semakin giat mengumpulkan hasil hutan, segera diketahui bahwa hasil usaha mereka memberikan keuntungan. Dahulu (seperti yang telah disampaikan) perdagangan *serahan* di sungai Mandau dekat Bintara Kiri, dan di *pertalangan* di Bintara Kanan, yang diberikan sebagai gaji tetapi yang kemudian dicabutnya, sementara sebagai gantinya mereka menerima f 500 per tahun dan perdagangan ini kembali diserahkan kepada Tengku Unus dan Sulung Negara.

Tengku Unus telah memborongkan eksploitasi hak itu, pertama kepada seorang Melayu dari Malaka senilai \$160, dan kini kepada orang Cina senilai \$180 yang kemudian naik menjadi \$200. Tengku Sulung Negara telah mengeksploitasi sendiri, tetapi administrasinya diserahkan kepada Bintara Kanan, yang untuk itu

mendapatkan sebagian hasil (dikatakan 1/3). Suatu sumber penghasilan lain yang diterima Sultan dari orang Talang adalah hasil *tapak lawang*, yang tampaknya berjumlah 10 gantang padi per ladang, tetapi bagi Talang Dayun setidaknya dinaikkan sampai 20 gantang per ladang (pasal 5 dari akta pengangkatan Bintara Kanan tahun 1279 H).

Juga dalam akta yang sama diperintahkan agar semua minyak yang dihasilkan oleh orang Dayun harus disetorkan kepada Sultan senilai f 1 per gantang, sementara akhirnya diperintahkan agar orang Dayun hanya menjual padinya kepada Sultan dengan harga \$3 per 100 gantang, sebaliknya Sultan sendiri wajib bila orang Dayun memerlukan beras, mereka bisa menebusnya kembali (biasanya dengan nilai pasar yang dijual tiga kali harga ketika dijual). Dari aturan-aturan serupa, orang bisa menyelidiki apa yang muncul sebagai penduduk yang tertindas seperti orang Talang, apabila mereka tunduk kepada despot sewenang-wenang dan setengah gila tanpa terkontrol, seperti mantan Sultan yang membuat aturan-aturan itu. Selain pajak yang harus disetorkan orang Talang dalam bentuk-bentuk di atas kepada raja mereka, mereka masih memiliki kewajiban seperti orang Mandau dan kawula *batin* Melayu di sepanjang Sungai Siak untuk melakukan beberapa kewajiban yang demi kepentingan daerah atau diperlukan oleh Sultan, seperti membuat jalan dan selokan, merancang benteng dan menebang kayu yang diperlukan oleh raja bagi dirinya atau bagi daerahnya.

Para kepala *rakyat raja* yang disebutkan di atas ini diangkat oleh Sultan. Mereka ditunjuk oleh suku sebelumnya melalui anggota suku dan dari kemenakannya. Pewarisan pada saat kematian tidak semua bisa dilimpahkan kepada mereka dalam garis lurus dari ayah menuju anak, tetapi dari paman kepada anak-anak saudaranya. Penghulu Mandau dalam pengangkatannya menerima sebuah baju, sebuah sarung dan sebuah pengikat kepala, yang terdiri atas sebuah *kabung* katun putih (1/2 *vadem*) yang digulung dalam katun hitam besar (*detar berkabung*). Ini merupakan petunjuk pada ternak lebah di mana juga dari dalam terdapat warna putih (lilin) dan dari luar hitam (lebah). Pimpinan Talang Dayun yang disebutkan dengan gelar *patih*,

dalam pengangkatannya menerima sebuah baju, sebuah sarung dan sebuah ikat kepala hitam.

Para kepala lain hanya menerima *pesalinan* biasa, yaitu sebuah baju, sebuah sarung dan kain kepala. Perintah raja disampaikan secara lisan kepada *rakyat raja* oleh seseorang yang sebagai bukti keseriusan pengirimannya membawa serta sebuah panah, di mana selembur katun kuning dengan kancing disematkan (*ikat simpul sentak*). Dalam perkara penting misalnya dalam mengejar seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan besar, kain kuning itu disematkan dengan kancingnya sebagai tanda perintah pencarian. Atas desas-desus (kata orang) bahwa seorang utusan mendekat dengan tanda kain kuning, penduduk berlarian menyambutnya.

Apabila salah seorang kepala yang disebutkan di atas lalai atau tidak mau menjalankan perintah raja, maka hukuman yang menunggunya adalah bahwa dia harus meminum apa yang disebut *air keris*, ketika dia tampil di depan raja bersama para terdakwa lainnya, yaitu sebuah keris yang direndam dalam air, di mana orang telah mematahkan *lombok setan*, dan air yang menetes ini dibiarkan membasahi mulut terdakwa yang harus ditelannya. Hukuman ini dianggap sangat berat, karena bukan hanya menyebabkan tanggapan yang sangat kurang menyenangkan tetapi menurut keyakinan rakyat juga akan membawa bencana. Jika hukuman ini telah selesai, maka Sultan harus memberikan *persalinan* kepada terdakwa untuk bisa kembali menutup tubuhnya. Tanpa itu, mereka bisa pergi.

Orang Talang sangat banyak jumlahnya. Menurut penafsiran, orang Dayun hanya berjumlah 800, orang Gasip, Kutip serta kawula Batin Pandan seluruhnya berjumlah 450, seluruh orang mandau (termasuk orang Gronggang dan warga Jokerah Pandan) seluruhnya berjumlah 800 orang, atau seluruhnya 2050 orang, membentuk keluarga yang menunjukkan jumlah penduduk kira-kira 9-10 ribu jiwa. *Rakyat laut* yang semuanya tinggal di daerah Laksamana Bukitbatu, seperti yang telah disampaikan juga termasuk *rakyat lentera*. *Rakyat laut* tidak memiliki tempat tinggal tetap, tetapi berkelana di sini di kepulauan Riau-Lingga dan di seberang Malaka di Johor dan Singapura. Apabila di sini mereka menikah, mereka akan tinggal dan hidup apakah dari hasil ladangnya atau dari

menangkap ikan. Mereka dibagi dalam sembilan suku, yang masing-masing berada di bawah pimpinannya sendiri, yang menyandang gelar *batin*. Dari sana mereka sering disebut *rakyat sembian suku*.

Para suku ini adalah Sembulun, Gelam, Keluwang, Kapit, Semombo, Seabui Ladi, Tengai dan Perayun. Pimpinan mereka adalah raja negara, yang oleh Sultan diangkat dari salah satu empat suku ini. Raja negara yang disebutkan terakhir ini selama beberapa tahun telah meninggalkan Siak dan kini mengabdikan kepada Maharaja Johor, di mana menurut kata orang dia mengawasi beberapa bangunan raja. Kepala mereka yang di sini disebut *rakyat laut*, diki Lingga beberapa saat yang lalu adalah Orang Kaya Mapar, yang dalam pengangkatannya menerima gelar Orang Kaya Temenggung; apakah dia bisa menjalankan fungsi ini, tidak bisa disampaikan. Jumlah *rakyat laut* di Siak (Bukitebatu) sekarang ini hanya mencapai 400 orang. Orang menduga bahwa banyak dari mereka yang telah meninggalkan tempat itu. Penulis tidak mampu di sini untuk menemukan *rakyat laut* di tempat lain di kepulauan ini, dan dengan demikian di sini tidak bisa disampaikan mengapa dan kapan mereka tinggal di Siak.

Mungkin dugaan bisa dibenarkan bahwa mereka adalah keturunan dari kawula Raja Negara di Singapura, di mana Raja Kecil itu dipercaya oleh kakeknya Laksamana Johor dan yang telah membantunya Raja Kecil dalam peperangannya melawan Johor, Riau dan keudian juga terhadap Siak bersama rakyatnya. Gelar Raja Negara yang disandang oleh kepala *rakyat laut* di sini mungkin juga bisa dijelaskan. Pada *rakyat laut* ada kebiasaan bahwa anak-anak yang bernomor ganjil mengikuti ibu dan yang bernomor genap mengikuti ayah. Jika anak terakhir bernomor ganjil, sehingga ketika adat diikuti, ibunya lebih berhak atas anak itu daripada ayahnya, maka ini tidak akan diberikan kepada salah satu orangtua itu, tetapi kemudian apabila pemkisan dilakukan pada tahun-tahun kemudian, akan dipilih akan mengikuti siapa dia. Selama pilihan ini belum ditetapkan, anak itu disebut sebagai *mata malang* yang menurut ungkapan lokal menunjukkan nasibnya.

Beberapa kewajiban yang dimiliki oleh *rakyat laut* di Siak selain pembayaran *tapak lawang* bagi mereka yang membuka ladang,

atau *pancong alas* bagi mereka yang mengumpulkan hasil hutan, pengiriman armada atau pada umumnya peluncuran perahu dikirimkan oleh Sultan. Setelah penjelasan di atas, jelas bahwa *rakyat laut* tidak memiliki *utan tanah*. Empat orang *batin* Melayu dari Bengkalis yang bersama kawulanya termasuk *rakyat lantera*, biasanya dibedakan dengan rakyat lain melalui *rayat yang memegang utan tanah*. Tanah mereka terletak di pulau Bengkalis yang diambil alih oleh pemerintah dan yang bagiannya digenangi oleh selat Brouwer.

Empat *batin* yang dimaksudkan berasal dari Bengkalis, Penebal, Senderak dan Alam. Mereka dahulu diletakkan di bawah perintah langsung Laksamana, seperti bunyi ungkapan itu yang membentuk IV suku. *Utan tanah* mereka dimuat dalam akta pengangkatan seperti yang dilimpahkan kepada Laksamana. Selain pelimaphan ini sendiri sebagai tindakan tidak sah, redaksi akta yang dibuat ini juga tidak menjelaskan bahwa orang bisa membacanya di mana daerah 4 *batin* ini terletak dalam batas-batas wilayah yang menjadi daerah monopoli debet candu dan garam Laksamana. Dalam setiap kasus jelas bahwa menurut legenda dan mungkin juga benar, empat *batin* ini sejak lama berada di Bengkalis, bukan hanya sebelum adanya seorang Laksamana (atau Bandar) di Bukit Batu, tetapi jauh sebelum Raja Kecil Siak berkuasa.

Dalam pengambil alihan pulau Bengkalis oleh pemerintah, baik hak-hak Laksamana maupun penduduk asli tidak diperhitungkan, dan Sultan diberi ganti rugi bagi pelepasan hak-hak kedaulatannya atas sebidang tanah, yang tidak begitu banyak hasilnya, sementara dia tidak memberikan ganti rugi ini kepada empat orang Datuk Siak, yang toh harus dianggap memiliki hak karena mereka juga menguasai Kerajaan Siak, dan sebagai akibatnya juga memiliki andil atas hak-hak di pulau Bengkalis. Selain itu beberapa anak buah mereka ditempatkan di sana, yang dilepaskan setelah penyerahan pulau itu.

Sebagian besar kawula empat orang *batin* yang dimaksudkan itu tetap berada di pulau Bengkalis dan kini menjadi kawula pemerintah. Beberapa orang lain di bawah *batin* Bengkalis tinggal di Bukit Batu atau tetap berada di sana. Dari para *batin* tua, setelah pengambil alihan pulau ini, tidak pernah lagi memperhatikan dan

toh mungkin diperlukan petunjuk untuk memberi mereka ganti rugi dengan cara lain, khususnya dengan menjadikan mereka sebagai kepala kampung, untuk memberikan ganti rugi yang mereka alami, karena ini mereka kehilangan hak-hak lama atas tanah. Tentang tanah yang dimiliki *batin* Bengkalis di wilayah Laksamana Bukit Batu, lihat di atas pada sub h.

Anak buah dari 4 orang *batin* ini ditafsirkan berjumlah 400-500 orang di Siak. Terhadap rakyat yang diperlakukan demikian, *yang memegang utan tanah*, masih ada rakyat *yang tidak memegang utan tanah* atau Orang Cedun dan Orang Senggerau. Dikatakan bahwa mereka berasal dari Johor. Pada kasus ini mereka sudah ada sebelum kedatangan Raja Kecil di Siak, karena tanpa itu sulit dijelaskan mengapa mereka merasa lebih dirugikan daripada orang-orang Johor lainnya, yang bersama atau setelah mereka tiba dan menjadi *hamba raja*. Orang Cedun kembali tersebar dalam empat *onderafdeeling*, yaitu Sawang, Pianan, Tetama dan Cedun, masing-masing di bawah pimpinannya sendiri; di Sawang gelar *jenang* digunakan, sementara di tiga tempat lain adalah *batin*.

Orang Senggeran hanya membentuk satu suku di bawah seorang *batin*. Sebagian besar jenis rakyat ini tinggal di daerah Datuk Laksamana Bukit Batu dan beberapa di bagian hilir Sungai Siak. *Batin* Pianan dan Tetama khususnya tinggal di pulau Gontong. Meskipun sebagian besar mereka tinggal di daerah yang diserahkan kepada Datuk Laksamana, mereka toh langsung berada di bawah Sultan. Dari sana mereka juga bisa disebut sebagai *rayat raja* atau *rayat dalam*. Kewajiban mereka terhadap Sultan adalah sebagai berikut.

Batin Cedun dan Senggeran harus mengelola sampan yang dikirimkan oleh Sultan. *Batin* Sawang, Pianan dan Tetama juga harus melakukannya tetapi kerja wajib utama mereka terdiri atas menyediakan atap bagi *batin* Sawang, sementara dua *batin* lain harus menyediakan perahu dan pendayung yang diperlukan serta harus menyerahkan genting untuk perlindungan. Ketika *rayat dalam* dinyatakan bersalah, maka mereka akan direndam dalam air. Orang berkata bahwa mereka sangat takut terhadap hukuman ini dan sangat ampuh. Saksi mata mengisahkan bahwa setelah lebih dari seperempat jam dibenamkan, kadang-kadang dia harus diambil

dalam kondisi setengah mati. Setelah eksekusi itu, Sultan akan memberikan *persalinan* kepada terdakwa.

Orang Cedun dan Senggeran sekarang ini berjumlah hanya sekitar 150-200 orang. Terutama kedua kategori orang ini dalam jumlah besar menyingkir dan berita-berita tersebut benar, sehingga jumlah mereka yang dahulu menyebar bisa mencapai ribuan orang. Pada tingkat paling bawah dari jenjang sosial di Siak terdapat *rayat banang*, yaitu mereka yang masih animisme (termasuk juga harus diperhitungkan orang-orang yang belum lama ini masuk Islam, seperti beberapa *orang utan* di pulau-pulau). *Rayat banang* dibedakan menjadi orang Sakei, orang Akit dan orang Utan dan Rawa. Orang Sakei menjadi suatu suku yang mungkin masih pribumi di Pantai Timur Sumatra, seperti di daratan Malaka, di mana mereka juga ditemukan di sana.

Dalam koran *de Locomotief* tanggal 4 Oktober 1878 nomor 233, sebuah ringkasan laporan pejabat di distrik Kinto di daratan Malaka disampaikan, di mana suatu gambaran diberikan tentang orang-orang Sakei yang tinggal di Siak, yang sangat mirip dengan orang-orang Sakei yang tinggal di Siak. Juga bahasa *kamfer* di sana dikenal. Di sini mereka menghuni Mandau hulu dan daerah Rokan yang berbatasan dengannya; di Mandau hulu yang termasuk Siak, mereka dibagi dalam lima suku, dan mereka yang tinggal di daerah Rokan, masing-masing suku berada di bawah *batin* sendiri. Dari situ biasanya mereka dibedakan dan disebut sebagai *batin* lima dan *batin* selapan.

Tentang daerah yang dihuni oleh orang Sakei di Siak atau *batin* lima, serta tentang orang Sakei sendiri di sub h di atas telah disampaikan dan di sini tidak akan diulangi lagi. Orang Sakei menggunakan dialek Melayu, dengan campuran beberapa kata. Hanya apabila mereka pergi untuk mengumpulkan kamper, mereka menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa kamper yang telah disinggung di atas. Mungkin orang-orang Sakei, ketika bahasa dan adat mereka diteliti lebih lanjut, banyak persoalan kabur tentang asal-usul dan penyebaran ras Melayu bisa dijelaskan. Orang Sakei jarang keluar dari hutan mereka yang sulit dimasuki di mana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya apakah dengan pengumpulan

produk hutan yang bisa dimakan, atau dengan penanaman ubi. Dengan dilengkapi garam dan peralatan besi, mereka menyerahkan diri kepada pemborong perdagangan *serahan* di sungai Mandau.

Menurut pemborong perdagangan *serahan* pada tahun 1878, debet garam di sungai Mandau berjumlah 1000 gantang per tahun. Suatu andil besar dalam pasokan pangan mereka adalah babi liar dan seekor hewan yang di Siak disebut *nangoi* dan dikatakan mirip dengan babi. Hewan-hewan mana ini, penulis tidak bisa menyampaikan karena dia tidak pernah melihatnya dan dari gambaran itu tidak bisa disimpulkan hewan mana ini. Jumlah hewan itu sangat berlimpah dalam beberapa saat per tahun.

Kebutuhan orang Sakei sangat sedikit; pakaian mereka bagi kaum pria terdiri atas cawat (kain panjang yang melilit paha, di mana sebuah simpul ditarik di antara tulang selangkangan) dan bagi wanita terdiri atas sejenis rok, keduanya terbuat dari kulit pohon cerep yang dikupas. Perabotan rumah mereka terbuat dari sambungan bambu. Orang Sakei sangat ahli dalam berburu terhadap berbagai hewan, yang dihasilkan hutan mereka; ya bisa diduga bahwa mereka tidak begitu khawatir ketika berjumpa seekor harimau, asalkan mereka dilengkapi dengan tombak pendek.

Tentang agama mereka hanya diketahui bahwa mereka memiliki kepercayaan, yang dari situ membuktikan bahwa mereka masih menunjukkan penghormatan kepada jenasah sebelum dikuburkan, apa yang biasanya tidak akan dilakukan ketika mereka tidak memahami tentang kehidupan selanjutnya atau roh-roh dari alam gaib atau para dewa yang mempengaruhi nasib manusia. Ketika seseorang meninggal, maka kerabat dekatnya berkumpul di sekitar jenasah dan dengan sebuah parang akan menimbulkan luka di dahinya, kemudian beberapa darah akan menetes pada jenasah itu, setelah itu baru dikuburkan.

Menurut teori mereka tidak memiliki hak di depan raja, tetapi ternyata mereka tidak memiliki kewajiban juga. Mereka hidup bebas di hutannya; bukan karena mereka tidak terlihat tetapi karena eksploitasi rutin dari mereka termasuk tidak mungkin bisa dilakukan; pertama-tama karena mereka tidak memiliki hal lain kecuali keberanian dan ketrampilan, dan kedua karena bagi orang

Melayu tidak mungkin untuk mengambil orang-orang ini dari hutan mereka. Mereka harus menyetorkan kayu gaharu dan semua *guliga* yang mereka temukan kepada Sultan, tetapi mereka hanya memberikan sebagian. Juga disebutkan bahwa mereka menjual hampir semuanya kepada pedagang, yang masih terjangkau bagi mereka. Hanya kini seorang *batin* harus memperhatikan penyetoran satu atau dua *guliga* dan kayu gaharu kepada Sultan dan Sultan juga harus merasa puas.

Orang-orang Sakei tidak pernah berhubungan langsung dengan Sultan, tetapi hanya melalui utusannya di Sungei Mandau, yang sekarang disebut Mat Saleh. Jika seorang *batin* meninggal, maka oleh utusan ini laporan dibuat kepada Sultan dan juga seorang calon baru diusulkan, menurut kata orang berasal dari kemenakan *batin* sebelumnya. Sultan kemudian akan mengirimkan sebuah baju kepada *batin* baru yang diangkat sebagai tanda pengakuannya. Orang melihat bahwa tidak pernah ada pemerintahan teratur Sultan atas orang Sakei, atau apapun bentuknya. Begitu juga dilaporkan di mana *batin lima* tidak lagi ada dan *batin selapan* dimulai. Hutan mereka terbentang begitu luas sehingga mereka tidak bisa saling dihambat untuk tinggal dan kembali pergi, apabila mereka apakah karena penyakit menular atau karena ambisi raja-raja mereka sendiri dipaksa berbuat demikian.

Orang sekarang ini bisa membedakan banyak orang Sakei dari *batin selapan* dengan orang Sakai di dekat tempat kedudukan pemerintah di Kota Intan dan lebih banyak terpusat di Mandau hulu, mengingat kondisi Siak tampaknya lebih membuat mereka kurang menarik. Jumlah orang Sakei yang tunduk kepada Siak ditafsirkan kira-kira 4-5 ribu jiwa. Orang Akit merupakan suatu kelompok orang yang masih misterius dalam segala aspeknya seperti orang Sakei. Jika orang Sakei tampaknya termasuk penduduk hutan di daerah hilir Sumatra Timur, orang Akit menjadi bagian dari penduduk pribumi yang menghuni daerah pantai bagian selatan selat Malaka dan pantai pulau-pulau yang terletak di sana, dan yang dengan berbagai nama bisa dijumpai apakah di sepanjang daratan Sumatra atau di sepanjang daratan Malaka atau di kepulauan. Mereka sebagian

tinggal di darat yang tidak jauh terpisah dari laut, selain di perahu-perahu atau rakit mereka.

Orang Akit di Siak bisa dibedakan dalam dua suku, yaitu orang Akit Penguling dan orang Akit Selat Morong. Orang Akit Penguling di sini pada mulanya tinggal di aliran kanan muara Sungai Siak; Tanjung Layang sampai Sungei Penguling. Mengingat bidang tanah yang dihuni oleh mereka sangat sempit dan menghasilkan produk sangat sedikit, orang Akit ini telah meninggalkan tanahnya, dan mereka berlayar menyusuri Sungai Siak di atas rakitnya. Mereka masih tinggal di sekitar muara sungai Mandau dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengumpulkan hasil hutan, beberapa membuka ladang. Jumlah orang Akit Penguling ditafsirkan tidak lebih dari 70-80 orang.

Orang Akit di Selat Morong kembali dibagi menjadi dua bagian, yaitu orang Akit (dalam arti sempit) dan Orang Ratas, masing-masing di bawah *batin*. Orang Akit Perawang yang berada di bawah seorang *batin* menghuni tanahnya di sepanjang Sungai Siak atau kuala Mandau sampai ke Sungei Lukut atau Bukit Ratas. Mereka mungkin berasal dari Selat Morong, dan mungkin apakah atas perintah raja atau karena dorongan sendiri selama beberapa saat menghuni bidang tanah yang digarap oleh mereka. Tanpa itu, sulit dijelaskan mengapa dan dari mana begitu jauh di pedalaman dan dikelilingi dari semua sisi oleh orang Melayu, orang-orang Akit ini berasal. Tidak banyak jumlahnya, mungkin sekitar 40-50 jiwa.

Perabdian mereka kepada Sultan terdiri atas penyerahan kajang dan semua kayu, yang diperlukan oleh Sultan. Pengangkatan *batin* Akit sepenuhnya sesuai pemilihan Sultan, yang seperti pada orang Sakei memberikan sebuah baju pada kesempatan ini. dengan kesalahan terhadap Sultan atau dalam kelalaian perintah mereka, para *batin* seperti juga *raja laut* dan *rayat dalam* dijatuhi hukuman, dengan membenamkan mereka dalam jangka waktu lama sampai ke leher, setelah pelaksanaan hukuman itu mereka menerima sebuah baju.

Orang Akit yang termasuk penghuni Pulau Rupat ditafsirkan berjumlah 200 orang. Orang Akit seperti yang disampaikan masih animisme dan orang menduga bahwa mereka tidak tertarik masuk

Islam karena mereka dilarang memakan daging *nangoi*, yang sangat mereka sukai. Mereka sangat bersemangat dalam menangkap jenis hewan ini. Satu-satunya keturunan penduduk Siak yang sampai sekarang masih tinggal adalah orang Utan dan orang Rawa. Suatu perbedaan fisik antara kedua suku ini tampaknya tidak ada, setidaknya tidak bisa diketahui bahwa orang Rawa yang menjadi orang Utan, yang tinggal di daratan sepanjang atau sekitar sungai Rawa. Mereka juga masih mondar-mandir, dan kini dari daratan ke pulau-pulau yang terletak di dekatnya, dan kembali ke arah daratan.

Orang Rawa dikatakan berjumlah 20 sampai 130 jiwa dan berada di bawah seorang *batin*. Orang Utan tampaknya merupakan penduduk asli kepulauan ini, tinggal di dekat muara Sungai Siak dan Kampar. Di atas telah disampaikan bahwa empat orang *batin* Melayu di Bengkalis yaitu dari Bengkalis, Penebal, Senderak dan Alam mereka memiliki tanah di sepanjang selat Brouwer.

Di bagian lain, kawula dua *batin* Orang Utan yaitu Kembung dan Bantan tersebar. Di pulau Padang, penduduk asli semuanya adalah Orang Utan. Sesuatu yang lain tentang mereka tidak diketahui. Jumlah mereka ditafsirkan sekitar 200 orang. Selain ini, karena masih beberapa orang Melayu di daratan yang ditemukan, mereka membuka ladang di samping orang-orang Cina yang menggergaji papan kayu di sana. Di Merbau penduduk aslinya juga orang Utan, tetapi sebagian dari mereka telah memeluk Islam, mungkin sebagai akibat pengaruh keturunan raja-raja Siak, yang tinggal di sana. Penduduk Merbau (yang bisa dikatakan penduduk asli, bukan *hamba raja*) berada di bawah tiga orang *batin*, yaitu Merbau, Apong dan Cintai. Semua kawula ketiga *batin* ini berjumlah kira-kira 500 orang.

Di Merbau juga di Tebing Tinggi yang terletak di dekatnya, sejumlah *hamba raja* tinggal, yang tunduk kepada Tengku yang tinggal di sana. Jumlah mereka ditafsirkan antara 120 dan 200 orang. Di kepulauan Tebing Tinggi atau Rantau dan Rangsang atau Medang, penduduk dibagi dalam lima bagian, yang masing-masing memiliki seorang *batin*, yaitu *batin* Sumir, Kerimbang, Gelang, Melei, yang semuanya memeluk Islam dan *batin* Pancor yang masih animis. Para kawula keempat orang *batin* ini setidaknya di atas kertas

memeluk Islam, tetapi asal-usul mereka sama seperti orang Utan lain di pulau-pulau. Anak buah lima orang *batin* tersebut ditafsirkan berjumlah 600-700 orang, yang tersebar di kedua pulau itu. Sebagian besar tinggal di sepanjang selat yang memisahkan kedua pulau ini.

IV TAPUNG

Di atas telah disampaikan bahwa Tapung tidak bisa dianggap termasuk daerah Siak asli, tetapi mereka adalah taklukannya seperti juga disebutkan dalam traktat tahun 1858. Ikatan mereka dengan Siak lebih bersifat federatif daripada subordinatif. Terutama dari situ terbukti bahwa mereka bukan hanya berada dalam posisi yang sama terhadap Siak tetapi juga Kota Intan. Sebelum ikatan dengan kerajaan Melayu terakhir ini terlepas sebagai akibat ekspedisi tahun 1876, konsep masih ada yang menunjukkan hubungan Tapung: *beraja ka Siak, bertuwan ke Kota Intan*.

Menurut konsep ini, raja Kota Intan di Tapung memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada Sultan Siak. Pada kenyataannya, kondisi ganda ini tidak begitu menyulitkan karena baik Kota Intan maupun Siak tidak menarik keuntungan dari Tapung. Ketika eksploitasi atas orang-orang animisme mendatangkan keuntungan besar, raja Kota Intan bereaksi terhadap penolakan hak-haknya. Ada keunikan bahwa kehadiran para pemimpin Tapung di kraton Kota Intan berbeda dengan mereka di Siak. *Ka-ilir* (jadi di Siak) berarti menuju Tapung Kanan mengunjungi Bandahara Sikijang lebih dahulu dan *Terana* Lindei kemudian, dan di Tapung Kiri mengunjungi Bandahara Petapahan lebih dahulu dan Bandahara Tandun kemudian, sementara *ka-ulu* (jadi di Kota Intan) terjadi sebaliknya.

Menurut berita-berita tertua, Tapung kiri jelas tunduk kepada raja Gasip, sementara Tapung kanan sangat mungkin demikian. Bandahara Tandun masih memiliki sebuah perisai dan bandahara Batu Gaja masih memiliki keris dengan pegangan dari emas, yang diberikan kepada pendahulu mereka oleh raja sebagai *kabesaran*.

Setelah pengusiran raja Gasip, Tapung tunduk pada kekuasaan Raja Kecil dan para penggantinya. Di bawah Johor mereka tidak bisa bertahan, seperti yang kemudian terbukti dari dua kenyataan berikut ini (nota Gubernur Netscher).

Pada tanggal 14 Januari di Malaka sebuah kontrak ditandatangani dengan para bangsawan Kota Renah, Kebon dan Gili bagi penyerahan timah dan timah yang ditemukan di sana adalah milik Kompeni. Mereka juga menjanjikan kepada para kepala Tandun ini untuk mencoba mendorong daerah taklukannya ikut menandatangani kontrak. Kepada mereka diberikan bendera Kompeni untuk dikibarkan di Malaka. Dalam memorinya tanggal 6 Oktober 1876 Gubernur Malaka B. Bort, pemilik pulau timah ini adalah suku bebas yang tidak pernah ditaklukkan skiapun, mereka tinggal di sepanjang Sungai Siak. Melalui kontrak tanggal 21 Mei 1685 dengan Sultan Johor, disepakati bahwa orang-orang Belanda tidak boleh berlabuh di bawah Pasir Sala, tetapi harus berlabuh lebih ke hulu agar rakyat Siak tidak bercampur dengan orang-orang Minangkabau, untuk kemudian tidak menimbulkan masalah. Meskipun Tapung dihuni oleh penduduk padat, tidak perlu diragukan lagi bahwa penduduk ini adalah keturunan dari Minangkabau.

Ini bukan hanya terbukti dari nota yang dikutip di atas, tetapi juga dari kondisi bahwa sekarang ini bahasa, adat dan kebiasaan penduduk Tapung hampir murni orang Minangkabau. Sebagai akibatnya, tidak ada yang luar biasa bahwa mereka dengan pengusiran raja Johor dari Sungai Siak hilir oleh Raja Kecil telah menggantungkan diri padanya, dkibantu oleh Raja Minangkabau dan oleh kelompok Minangkabau di Siak saat itu. Bagaimanapun juga, apakah Tapung masih menganut “bertuwan ka Kota Intan”, menjadi tidak pasti. Menurut legenda, Tengku Husein dari Siak, sebagai akibat perpecahan di sana melarikan diri ke Kota Intan dan menikah dengan seorang anak raja di sana, yang dari perkawinannya menurunkan seorang putra, dikenal dengan nama *Marhum mangkat di balei* (jangan dikacaukan dengan tokoh dari Johor).

Marhum menjadi raja di Kota Intan. Para bangsawan Tapung memihak kepada Tengku Husein yang melarikan diri (dan kemudian

putranya), mungkin karena ini begitu dekat di lingkungan mereka dan didukung oleh raja Kota Intan. Bagaimanapun juga dengan tinggal di Siak, hubungan Tapung ditetapkan oleh konsep “beraja di Siak, bertuwan di Kota Intan”. Dalam perjanjian perdamaian tanggal 11 September 1876, raja Kota Intan secara resmi melepaskan semua haknya atas kedua daerah Tapung, sementara segera Sultan Siak dalam plakat tanggal 10 Sawal 1293 memberitahukan kepada para kepala adat dan penduduk di sana pada pasal 1: “Adalah seperti antara segala bendahara-bendahara serta kerapatan isi negri semuanya yang selaras Tapung kiri dan selaras Tapung kanan lalu ka Lindei antara dengan raja Kota Intan telah sudahlah putus pertaliannya, dan tida sekali-kali lagi ada persangkutannya daripada adat dan pusaka, hanyalah segala yang tersebut tertinggal di bawah pemerintahan duli kita di Siak”, sementara pada pasal kedua disampaikan bahwa mereka tetap menganut “beraja dan bertuwan di Siak”.

Batas-batas daerah ini diterima oleh Tapung:

- di timur seiring aliran dengan Siak di Tapung kanan (batas Bendahara Sikijang dengan *batin* Sigales) pada aliran kiri Sungei Podu dan di aliran kanan Sungei Mancah Sakti; dan di Tapung kiri (batas bendahara Petapahan dan *batin* Sigales) dan Sungei Seketuk;
- di utara dan barat laut, berbatasan dengan Kota Intan aliran sungai Tapung kanan dan Rokan kiri, sementara di utara dan timur laut berbatasan dengan daerah Mandau aliran sungai antara Tapung kanan dan Mandau;
- di selatan, batas dengan V Kota dari barat dimulai dengan Sungei Telangka kecil, Sungei Leboi tengah dan selanjutnya batas antara Tapung kiri dan Kampar kanan yang disebut Titian Teras;
- di barat dengan Rokan IV Kota adalah aliran sungai antara Rokan kiri dan kedua Tapung, melalui Tapung kiri dengan Bukit Seligi dan melalui Tapung kanan dengan Bukit Langa

Tanah antara batas-batas tersebut diketahui dikuasai oleh dua persekutuan, yaitu Tapung kiri dan Tapung kanan, yang masing-masing membentuk kerajaan kecil yang juga tidak saling berhubungan.

Sultan di daerah Tapung diwakili oleh seseorang keturunan Arab yang bernama Tengku Said Hamid, yang kemudian menikah dengan bibi dan saudari Sultan. Orang ini merupakan semacam kuasa Sultan. Semua tindakan pemerintahan biasanya berasal darinya dan para bangsawan Tapung sebagai akibatnya sangat jarang muncul di Siak, dan biasanya hanya cukup dengan menunjukkan penghormatan kepada Sultan. Tengku Said Hamid ini diberi penghasilan seperti *batin* Sigales oleh Sultan, seperti halnya Bandar Pekanbaru dengan penghasilan *batin* Senapelan.

a. Tapung Kiri

Persekutuan Tapung kiri terdiri atas empat anggota, yang dari situ bisa disebut dengan istilah Tapung non IV. Para anggotanya adalah Petapahan, Batu Gajah, Kebon dan Tandun. Sebagai pimpinan seteiap bagian ini adalah seorang bendahara, yang mewakili daerah itu keluar. Setiap anggota memiliki penduduknya sendiri dan dibuat batas-batas secara cermat. Kebon kembali merupakan persekutuan sendiri. Di sana tanah dan penduduknya dibagi menjadi tiga yaitu Kebon, Kota Renah dan Lianten, yang kembali bersama-sama membentuk persekutuan, yang diwakili oleh bendahara Kebon.

Di Tandun, penduduknya dibagi dua yang masing-masing memiliki suku dan bendaharanya sendiri. Tetapi tanah di sana termasuk milik kedua bagian ini. bendahara Tandun juga memimpin semuanya terhadap dunia luar. Anggota utama dari persekutuan Tapung kiri adalah Petapahan. Pertama-tama seorang Said ditempatkan di sana sebagai bendahara, dan selanjutnya terletak sangat dekat dengan Siak di mana Petapahan sejak dahulu memihaknya. Juga penduduknya tidak begitu buruk. Bendahara Petapahan selalu menerima lebih banyak fasilitas di Siak daripada para bendahara lainnya. Akibatnya dia dibebaskan dari cukai untuk perahu dagang di sepanjang Sungai Siak, suatu fasilitas yang kemudian diambil alih oleh pemerintah dengan ganti rugi f 200 pada tahun 1875.

Batas-batas Petapahan adalah sebagai berikut:

- dengan V Kota aliran sungai Kampar yang disebut Titian Teras;
- dengan Sigales, sungai Seketuk

- dengan Batu Gajah dan Sungei Tangkei ke darat sampai di Sialang Kecil (yang masih termasuk Petapahan) dan Sungei Delitan
- dengan Sikijang, aliran sungai kedua Tapung yang di sini disebut Perentian Munggu.

Penduduk Petapahan dibagi dalam lima suku yaitu Piliang, Ceniaga, Kampei, Domo dan Melayu (Peranakan).

Empat suku pertama adalah penduduk asli, *anak bumi*, sementara suku Melayu terdiri atas orang-orang yang datang dari tempat lain. Sebagian dari suku Melayu ini membentuk orang Peranakan, yang semuanya berasal dari Siak. Bendahara di sini dengan demikian termasuk suku Melayu, karena seperti yang disampaikan di atas dia adalah keturunan Arab, bukan *anak bumi*. Sebagai pimpinan setiap suku, seorang penghulu tampil yang kedudukannya bisa dialihkan kepada kemenakan ketika dia meninggal. Jabatan bendahara yang kini diduduki oleh Said bisa diturunkan dari ayah kepada anaknya, menurut aturan-aturan Islam. Ayah bendahara sekarang ini dalam suku bendahara terakhir menikah dan menggantikan posisinya.

Semua *utan tanah* di Petapahan termasuk milik bendahara. Penghulu dan rekan-rekan suku mereka hanya memiliki petak-petak tanah kecil di dan sekitar kampung mereka, yang bisa diperoleh dari bendahara. Setiap orang yang membuka ladang di Petapahan membayar tapak lawang sementara dari produk hutan yang dikumpulkan *pancong alas* harus disetorkan, di mana hasilnya seluruhnya dimanfaatkan oleh bendahara, yang dibandingkan dengan daerah-daerah Tapung lainnya tidak diserahkan kepada penghulu. Di daerah-daerah ini, *tapak lawang* digantikan dengan kewajiban untuk bekerja selama lima hari per tahun pada bendahara dan juga pada penghulu suku (kerja lima hari setahun).

Kewajiban di Petapahan ini masih dibebankan kepada penduduk di luar dan selain pembayaran *tapak lawang*. Apakah penghulu di Petapahan juga memiliki hak atas lima hari setahun, bendahara tidak mengetahuinya tetapi mungkin bahwa ini terjadi. Penghulu dahulu menerima hasil pajak atas budak dan kerbau, serta hak bepergian orang asing bagi mereka, tetapi belakangan ini semua

itu tidak lagi ada. *Sialang* termasuk milik bendahara, tetapi yang bisa diserahkan kepada penduduk demi kebutuhan hidupnya. Bendahara berhak membeli lilin di mana dia harus membayar seluruh nilainya kepada penduduk pribumi atau *anak buwah* dan kepada *orang dagang* membayar 4/5 dari nilainya.

Semakin ke pedalaman, di sana orang tidak lagi mendengar tentang *beduk* seperti yang dipukul di Petapahan. Kita menemukan apa yang di Siak disebut sebagai *pertalangan*. Di sana tinggal berbagai *orang dagang* yang pimpinannya adalah seseorang bergelar Jokinantan atau penghulu Banjar. *Anak buwahnya* terutama adalah warga V Kota. *Tapak lawang* yang disetorkan olehnya serta *pancong alas* bagi *jokinantan* disetorkan. Dari hasil *sialang* ini, 1/3 dibayarkan bagi bendahara dan 2/3 bagi *jokinantan*. Di bawah kampung Petapahan, kita jumpai kampung Pantei Cermin sebagai tempat tinggal Tongku Said Hamid.

Batas Batu Gajah dengan Petapahan dilaporkan di sini; batas dengan Tapung kanan adalah aliran kedua sungai Tapung; dengan V Kota adalah Sungei Leboi tengah, dengan Kebon di aliran kanan Sungei Sipasun dan di aliran kiri Sungei Mengkakan; dengan Tandun (Kasikan) Sungei Sirah (di aliran kanan) dan Sungei Bancah Pudu (di aliran kiri Tapung). Penduduk Batu Gajah dibagi dalam empat suku: Caniago, Petapang, Melayu dan Mandailing. Bendahara berasal dari suku Mandailing. Sebagai pimpinan setiap suku diangkat seorang penghulu.

Utan tanah di sini dianggap termasuk hak bendahara, tetapi dia sangat memahami seluruh penduduk karena semua suku menanggung keuntungan yang berkaitan dengan kepemilikannya. Dari orang asing, di sini *tapak lawang* dipungut sebesar 10 *gantang* per ladang. Juga bagi hasil hutan yang dikumpulkan, *pancong alas* dibayarkan. Hasil-hasil kedua pajak ini seluruhnya dipungut oleh bendahara, yang melepaskan separuhnya kepada penghulu Caniago, Petapang dan Melayu serta sebagian lain berbagi dengan penghulu Mandailing. Penduduk Batu Gajah tidak menyertorkan *tapak lawang*, yang bagi mereka diganti dengan kewajiban melakukan kerja lima hari per tahun pada bendahara (biasanya di ladangnya) dan juga pada penghulu suku.

Setiap orang yang tinggal di Batu Gajah, bisa memiliki *sialang*, yang diperoleh baik melalui penemuan pertama maupun lewat pewarisan. Jika seorang dagang memiliki sebuah pohon, maka ini merupakan milik bendahara, ketika pemilik pertama pergi atau meninggal. *Sialang anak suku* bisa dialihkan kepada kemenakannya ketika dia meninggal. Seperti yang telah disampaikan di atas, Kebon kembali merupakan persekutuan tiga kerajaan yang masih bersaudara: Kebon, Kota Renah dan Liantan, di mana Kebon adalah yang tertua dan mewakili hubungan keluar. Dahulu Kebon terdiri atas Kebon, Kota Renah, Giti dan Sikubin. Tetapi Giti dan Sikubin kemudian lenyap dan Liantan muncul kembali.

Bagaimana semua ini bisa terjadi, saya tidak tahu. Sebagai pimpinan setiap daerah ini, yang membentuk Kebon, adalah bendahara yang masing-masing memiliki hak dan wewenang yang sama dalam batas-batasnya. Selain itu antara tiga bendahara ini jika terdapat sengketa yang tidak bisa diselesaikan, maka keputusan akan diserahkan kepada bendahara Kebon. Seperti yang dibicarakan tentang Kebon, yang dimaksudkan adalah daerah Kebon dalam arti sempit. Batas-batas daerah Kebon adalah:

- dengan V Kota (Kuwo) aliran sungai Telangka kecil
- dengan Kota Renah, Pematang Penyemuran
- dengan Liantan, aliran sungai Gili sampai perantauan Kubur di Aur (di atas kuawa Liantan)
- dengan Batu Gajah, sungai Sipasau dan Menkakan

Suku-suku yang membentuk penduduk Kebon adalah Piliang, Melayu dan Petapang, masing-masing dengan penghulu khusus. Bendahara berasal dari suku Melayu.

Tentang suku ini, juga masih ada seorang penghulu yang menyandang gelar Maharaja Lelo, dan yang dimaksudkan untuk digantikan oleh kemanakan bendahara. Setiap suku memiliki *utan tanah* sendiri; *sialang* yang dijumpai berasal dari penghulu atau *anak buwahnya*. Begitu juga oleh semua orang *pancong* alas dibayarkan atas hasil hutan yang dikumpulkan, juga oleh orang Kebon sendiri. Dari hasilnya sebagian disetorkan kepada bendahara, sementara sebagian lagi dibagi rata di antara tiga orang penghulu. *Tapak lawang* di sini bagi orang-orang pribumi digantikan dengan kewajiban bekerja lima

hari per tahun pada bendahara dan pada penghulu. Tetapi *orang dagang* membayar *tapak lawang* kepada bendahara, yang kembali berbagi dengan penghulu, seperti yang terjadi dengan *pancong alas*.

Batas-batas Kota Renah adalah:

- dengan Kebon, Pematang Penjemuran
- dengan Liantan, Pematang Sijiko
- dengan Pangkei dan Kota tengah, dan Bukit Seligi

Penduduk dibagi dalam suku-suku berikut ini:

1. Domo (penghulu Datu Maharaja)
2. Domo (penghulu besar)
3. Melayu (Majalelo Sakti)
4. Melayu (Sindara Ketik)

Di sini ada dua suku Domo dan juga Melayu, yang bisa dibedakan menurut gelar penghulu, yang menjadi pemimpinnya. Bendahara berasal dari suku Melayu di Majalelo Sakti. *Utan tanah* Kota Renah dibagi di antara empat suku. *Tapak lawang* juga di sini digantikan dengan kewajiban kerja lima hari setahun baik pada bendahara maupun pada penghulu, suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hidup dari sebuah ladang. *Pancong alas* dipungut oleh bendahara, yang menyerahkan sebagian kepada penghulu Datuk Maharaja, Penghulu Besar dan Sindara Ketik, sementara dia harus berbagi rata dengan Majalelo Sakti. Penghulu ini adalah kemenakan bendahara dan bisa tampil sebagai penggantinya saat pejabat sebelumnya meninggal. Tentang hal itu, adat yang sama seperti di Kebon berlaku di sini.

Liantan juga disebut sebagai Aliantan. Batas-batas dengan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut:

- dengan Kebon, sungai Giti sampai perantauan Kubur di Aur (di atas kuala sungei Liantan)
- dengan Kota Rendah, pematang Ticido
- dengan Kasikan (Batu Gajah), pematang Kayu Bagak

Penduduk di sini dibagi menjadi lima suku: Melayu, Mandailing, Piliang, Caniago dan Petapang. Bendahara berasal dari suku Petapang. Sebagai pimpinan setiap suku adalah seorang penghulu. Satu-satunya suku yang memungut *utan tanah* di sini adalah suku Caniago dan Petapang dan suku Melayu hanya sedikit. Sebagai

akibatnya kewajiban untuk melakukan kerja lima hari per tahun di sini hanya perlu dipenuhi terhadap bendahara dan bukan terhadap penghulu seperti di tempat lain.

Semua penduduk di sini memiliki *sialang*, yang ketika meninggal diserahkan kepada kemandakan selain orang dagang, yang menyerahkannya kepada bendahara mengingat orang dagang ini tidak memiliki kemandakan di sana. Setiap orang yang mengumpulkan hasil hutan di sini membayar *pancong alas* kepada bendahara, yang harus menyerahkan sebagian kepada penghulu suku Melayu, Mandailing, Piliang dan Caniago. Bagian ini dia bagi bersama dengan kemandakannya, penghulu suku Petapang.

Tandun (dengan Kasikan) memiliki batas-batas:

- dengan Lubu Bendahara, Ujung Batu dan Pendalian, aliran sungai Tapung kiri dan Rokan kiri atau Bukit Seligi
- dengan Kampar juga Bukit Seligi
- dengan Liantan, Pematang Kayu Bagak;
- dengan Batu Gajah, sungei Sirah (di aliran kanan) dan Sungei Bancah Pudu (di aliran kiri sungai Tapung)
- dengan Tapung kanan (Lindei) aliran sungai kedua Tapung

Dalam batas-batas ini bermukim baik warga Batu Gajah maupun warga Kasikan, masing-masing di bawah bendaharanya sendiri.

Tanah ini tidak dibagi menjadi dua, tetapi hanya di antara penduduk yang tinggal di sana. Semua *utan tanah*, dengan beberapa perkecualian yang bisa disebutkan, di sini diserahkan kepada kedua bendahara dan bukan kepada suku, dan keuntungannya akibatnya seluruhnya juga diberikan kepada mereka (seperti yang dikatakan di sini). Menurut bendahara Tandun, alasan pengaturan ini yang tampaknya bertentangan dengan lembaga adat adalah sebagai berikut. Keturunan bendahara asli pada saat itu meninggal dan penduduk tidak sependapat siapa yang akan menggantikan almarhum bendahara ini. Jabatan itu kemudian diserahkan kepada seseorang dari Muara Takus, yang mendudukinya setelah memenuhi persyaratan bahwa semua *utan tanah* akan dibayarkan kepadanya.

Ketika suatu saat bendahara Kasikan tidak hadir; dia perlu dipilih dari keturunan bendahara Tandun. Bendahara Tandun akan mewakili seluruh daerah ini keluar dan kepadanya diserahkan

wewenang atas kawula bendahara Kasikan dalam keputusan hukum. *Tapak lawang* di sini diganti dengan kerja lima hari setahun bagi penduduk setempat kepada bendahara dan juga kepada penghulu mereka. Orang dagang selain itu masih membayar 10 *gantang* per ladang kepada bendahara, dengan seorang kawula yang dikawininya (*semindo*). Tentang hasil *pancong alas* serta *tapak lawang* dari orang asing, penghulu tidak menerima apapun; semua ini disetorkan kepada bendahara.

Warga Tandon dibagi dalam 4 suku: Pilihang, Caniago, Domo dan Melayu. Bendahara berasal dari suku Domo (Muara Takus). Suku Piliang dibagi dalam 3 induk, di mana 3 orang penghulu memegang kekuasaan. Domo dibagi menjadi 2 induk; salah satunya langsung berada di bawah bendahara dan yang lain di bawah seorang penghulu dengan gelar Tumenggung. Pada warga suku Caniago, hanya ada seorang penghulu, dan juga hanya satu yang berkuasa atas suku Melayu. Perkecualian atas kenyataan bahwa semua *utan tanah* disetorkan kepada bendahara, di mana di atas telah disebutkan bahwa 2 dari induk suku Piliang serta suku Caniago masih memiliki petak-petak kecil *utan tanah*, di mana keuntungan akan diserahkan kepada penghulu terkait. Mereka diberi semua ini karena bendahara lama menikah dalam suku ini (*semindo*).

Warga Kasikan semuanya termasuk suku Piliang, yang dibagi dalam 4 induk yang hanya dipimpin oleh seorang penghulu. Bendahara sendiri adalah orang Domo dan termasuk keturunan yang sama seperti bendahara Tandun.

b. Tapung Kanan

Persekutuan Tapung Kanan terdiri atas dua anggota, yang masing-masing kembali dibagi menjadi dua. Dua bagian utama ini adalah Lindei dan Sikijang. Pimpinan Lindei menyandang gelar Terana dan pimpinan Sikijang menyandang gelar Bendahara. Pada masa lalu sangat mungkin raja Gasip menjadi penguasa daerah Tapung Kanan. Tetapi di sini tidak lagi ada *kabesaran* yang diberikan oleh raja, seperti yang masih ditemukan di Tapung kiri. Kemudian juga konsep yang mengatur hubungan Tapung kanan, *beraja ka Siak, bertuwan ka Kota Intan*.

Di kraton Siak seperti yang telah disampaikan di atas, bendahara Sikijang memiliki pengaruh terbesar dan di kraton Kota Intan adalah bendahara Terana dari Lindei. Sebaliknya bendahara Lindei memiliki suatu posisi khusus terhadap keluarga raja di Kota Intan. Raja-raja Kota Intan dari pihak ibu adalah keturunan dari Lindei, sebagai akibatnya hubungan mereka sangat erat sehingga Kota Intan (atau yang lebih dikenal sebagai Kunto) dianggap terdiri atas tiga bagian: yaitu Kota Intan, Kota Lama dan Lindei. *Terana* Lindei sebagai akibatnya menduduki posisi tinggi; seperti yang disebutkan dalam definisi Melayu, mereka adalah *adik raja*, *abang andika*. Dari situ terbukti bahwa mereka tidak dianggap sebagai raja, tetapi bisa langsung menggantikannya.

Suatu fasilitas yang melekat pada posisi ini adalah bahwa dengan tidak berfungsinya seorang raja di Kota Intan, *Terana* Lindei selama 14 hari (*duwa kali tujuh hari*) menduduki jabatan raja dan menerima bukti-bukti penghormatan yang berkaitan dengannya (*sembah*); baru setelah selesainya batas waktu ini, pejabat baru kemudian tampil. *Terana* Lindei menduga bahwa dia tidak pernah memiliki batas-batas tetap dengan Kota Intan dan juga tidak memilikinya. Dalam batas-batas (*terkurung*) Lindei, orang masih menjumpai bendahara Sanama Nenek, dan dalam batas-batas Sikijang masih dijumpai bendahara Danau Lancang.

Kedua bendahara Sanama nenek dan Danau Lancang ini pada umumnya berada dalam batas-batas yang menutup *utan tanah* mereka, memiliki wewenang dan hak yang sama seperti *terana* Lindei dan bendahara Sikijang di daerah khusus mereka. Begitu juga ada banding dalam sengketa kepada bendahara Sikijang, dan mereka bisa meminta bantuannya untuk memaksa kawulanya yang memBangkong agar mematuhi kewajibannya. Posisi ini paling jelas bisa digambarkan di mana *terana* Lindei dianggap sebagai saudara tua bendahara Sanama nenek, dan bendahara Sikijang menjadi saudara tua bendahara Danau Lancang (*adik beradik*). Adik memiliki hak memberikan nasehat, tetapi keputusan tetap dipegang oleh abang dalam persoalan kepentingan umum. Dalam sengketa keluar, abang tidak hanya mewakili kawulanya tetapi juga adik-adik dan

kawula adiknya. Dahulu bendahara di Tapung kanan hanya menerima gelarnya di Kota Intan, sekarang proses itu terjadi di Siak.

Batas-batas Lindei dengan daerah-daerah sekitarnya adalah sebagai berikut:

- dengan Lubu Bendahara, bukit Langa
- dengan Tandun, aliran kedua sungai Tapung
- dengan Sikijang (di aliran kanan Sungei Lindei), kuala Sungei Sanama Nenek dan (di aliran kiri) kuwala Sungei Ganggo, dan di aliran kiri Sungei Penasan Sungei Kuras

Dengan Kota Intan, tidak ada batas permanen tetapi mungkin ini ditunjukkan aliran Tapung kanan dan Rokan kiri.

Selanjutnya di bawah *terana* Lindei masih terdapat aliran hulu sungai Tamaluka, mulai dari Sungai Siak ke kanan dan Sungei Lemiding di aliran kiri. Di sini perlu dicatat bahwa aliran hulu Tapung kanan menerima nama Sungei Penasan, selama masih mengalir lewat daerah *terana* Lindei, dan pertama-tama menerima dari aliran Tapung kanan, ketika sungai ini mengalir di bawah kuwala Sungei Lindei memasuki daerah Sikijang (Danau Lancang). Dengan Sanama Nenek, Lindei juga tidak memiliki perbatasan permanen, bagian hilir Sungei Penasan dihuni oleh Sanama Nenek dan bagian hulu oleh Lindei.

Orang Lindei dibagi dalam empat suku: Piliang, Piliang tengah, Piliang bone dan Domo. Sebagai pimpinan masing-masing diangkat seorang penghulu. *Terana* berasal dari suku Domo. *Utan tanah* di sini seluruhnya merupakan hak milik *terana*. Tetapi warga Lindei ini dibebaskan dari *pancong alas*, tetapi hanya bagi mereka yang mengambil sendiri produk itu dari hutan. Setiap orang lain harus membayar *pancong alas*, orang asing juga yang mengumpulkan hasil hutan atas tanggungan penduduk Lindei. Warga Lindei bebas dari pembayaran *tapak lawang*, tetapi setiap tahun harus bekerja selama lima hari pada bendahara dan juga pada penghulunya.

Orang asing juga tiba, tetapi selain itu masih membayar *tapak lawang*. Seluruh hasil *pancong alas* dan *tapak lawang* bagi *terana* disetorkan dan penghulu tidak menerima apapun. Sumber utama penghasilan bagi penghulu dahulu adalah cukai atas orang asing (*wang menarus*). Ketika warga dari pedalaman datang (Rau,

Mandailing, dan Padang Lawas), mereka harus membayar \$ 0,03 untuk menginap dan \$ 1 apabila mereka (lewat darat) dibawa ke Danau Lancang. Dahulu setiap bulan 20-30 orang tiba, kini hampir tidak ada lagi karena orang-orang pedalaman berangkat ke laut melalui Bilah dan Asahan sesuai dengan pilihan. Setiap orang bisa menemukan *sialang* di Lindei; orang asing yang tidak menikah di Lindei juga bisa mengambil hasilnya di sana. Mereka yang menikah di sana tetap bertahan selama mereka tinggal di Lindei. Dengan kepergian atau kematian, hak mereka menjadi milik *terana*. Suatu kewajiban yang di sini bertumpu pada seluruh penduduk adalah merawat *rumah penangan*, di mana anggota keluarga wanita dari *terana* tinggal dan juga tempat mengadakan rapat.

Suku-suku di Sanama Nenek adalah Domo, Petapang, Piliang dan Mandailing. Masing-masing dipimpin oleh seorang penghulu. Bendahara berasal dari suku Domo. Di Sanama Nenek semua penghulu memiliki *utan tanah* mereka sendiri, di mana mereka menikmati *pancong alas*. *Tapak lawang* di sini tidak dipungut, juga dari orang asing. Tetapi semua orang harus melaksanakan kerja selama lia hari per tahun pada bendahara dan juga pada penghulu suku. Tentang *sialang* di sini tidak ada adat yang sama seperti di Tindei.

Batas Sikijang (Danau Lancang) dengan Lindei adalah Sungei Sanawa Nenek, dan sampai Sungei Ganggo, Sungei Lindei di aliran kanan dan Sungei Kuras di aliran kiri Sungei Penasan. Batasnya dengan *batin* Sigalus adalah sungai Mencah Sakti dan Pudu; batas dengan Tapung kiri (Petapan) adalah aliran kedua sungai Tapung (*pemerentian munggu*) dan batas dengan Kota Intan adalah aliran sungai Tapung kanan dan Rokan kiri. Daerah bendahara Danau Lancang dipisahkan dari wewenang bendahara Sikijang di aliran kanan Tapung kanan oleh Sungei Sentangan dan di aliran kiri oleh Sungei Pemangkowangan.

Penduduk Sikijang dibagi menjadi empat suku: Caniago, Piliang, Petapang dan Melayu. Bendahara berasal dari suku Melayu. Dahulu masih ada suku Mandailing, tetapi dia meninggal dan suku Petapang menggantikannya. Seorang penghulu diangkat atas setiap suku. Setiap suku di sini memiliki *utan tanah* sendiri; apa yang tidak berasal dari tiga suku tersebut (dan merupakan bagian terbesar)

menjadi milik bendahara. *Pancong alas* dan *tapak lawang* dari orang asing diserahkan kepada pemilik *perantauan*, begitu juga *sialang*. Apabila seseorang dari tempat lain menemukan *sialang*, maka dia tidak bisa mengambilnya sendiri kecuali setelah pohon itu diserahkan kepada penghulu, yang termasuk *perantauan*.

Tentang *pancong alas* dan *tapak lawang*, bendahara harus melepaskan sebagian kepada penghulu suku Melayu, kemanakannya. Kepala kampung Kota Batah yang menyandang gelar penghulu besar, kini seorang pemimpin yang otonom diangkat di Tapung kanan. Tetapi dia tidak berbeda seperti penghulu suku Piliang di Sikijang. *Utan tanahnya* terletak di Sungei Soram. Penghulu besar sekarang ini adalah haji dan menerioma fasiulitas di Siak. Penduduk Sikijang juga di sini harus melakukan kerja setiap tahun selama lima hari kepada bendahara dan juga pada penghulu, tetapi untuk itu dibebaskan dari *tapak lawang*.

Di atas telah disampaikan bahwa Danau Lancang mencakup bagian hulu Sikijang dari sungai Sentangan dan Pemangkuwang. Penduduk di sini dibagi dalam tiga suku: Petapang, Melayu dan Piliang. Bendaharanya berasal dari suku Petapang. Adat yang di sini sehubungan dengan *pancong alas*, *tapak lawang* dan *sialang* masih ada, sama seperti di Sanama Nenek dan karena itu bisa ditunjukkan secara singkat.

V

Tanah Putih, Bangko dan Kubu

Pada pengantar nota ini disebutkan bahwa daerah Tanah Putih, Bangko dan Kubu bukan merupakan bagian dari Siak, tetapi tunduk kepadanya yang juga memiliki keunikan bahwa mereka menganggap Sultan Siak sebagai raja setempat. Pada mulanya kerajaan Kapenuan tampaknya telah memperluas wilayahnya di kuwala sungai Rokan, sampai beberapa abad lalu membagi daerah ini menjadi dua atau lebih tepatnya dua kerajaan bersaudara.

Bagian hulu tetap berada di bawah raja Kapenuan yang sah, sementara Raja Lontar, seorang keturunan dari Johor yang menikah dengan Raja Siti, seorang putri Kapenuan, tampil sebagai raja. Setelah

berlangsung beberapa saat, daerah aliran hilir Rokan dan dengan demikian juga Tanah Putih ditaklukkan oleh Johor. Apakah daerah ini merupakan lahan apanage para pangeran Johor, penulis tidak mengetahui tetapi pada pertengahan kedua abad XVII, Rokan hilir diperintah oleh pejabat Johor (syahbandar). Ketika orang-orang Johor diusir oleh Raja Kecil dari Siak, tidak berlangsung lama atau mereka juga dipaksa meninggalkan Rokan hilir, di mana daerah-daerah Tanah Putih, Kubu dan Bangko berada di bawah kekuasaan Siak. Kapan ini terjadi, masih belum bisa diketahui. Di daerah-daerah ini orang menyadari bahwa hal itu tidak lagi ada dan di Siak orang menduga bahwa ini terjadi selama Raja Alam, putra sulung Raja Kecil.

Dalam berbagai kerusuhan yang menandai pemerintahan raja-raja Siak selama abad lalu, raja-raja yang diusir berulang kali menyingkir apakah ke Asahan, ke Batubara atau ke Rokan dan kembali ke Siak setelah kondisi tenang. Juga disebutkan bahwa melalui kerusuhan yang berulang kali terjadi, Kerajaan Siak menjadi sangat lemah sehingga pengaruh yang sebelumnya ditegakkan atas daerah taklukkannya di sebelah barat mulai berkurang.

Ini berlangsung sampai Said Ali pada tahun 1791 menduduki tahta Siak lewat kudeta. Raja yang paling energik yang dimiliki oleh Siak ini berusaha mempertahankan ketenangan di daerahnya dan menindas daerah taklukkan di sebelah barat dengan kekuatan senjata Siak. Pada ekspedisinya, dia juga menaklukkan Tanah Putih dan menegaskan pengaruhnya di sana; dia tampil sebagai Sultan Siak. Bagi Said Ali ada alasan memadai untuk tampil di muara sungai Rokan, dengan cara yang paling utuh mendapatkan penghormatan dari kawula penduduk di Tanah Putih, Kubu dan Bangko. Sejak saat ini Siak menjadi penguasa daerah taklukkannya, yang selalu dianggap sebagai apanage Sultan sendiri, yang bisa menerima penghasilan dari sana atau menyerahkan kepada anggota keluarganya.

Marhum Besar (Tengku Mohamad) memberikan penghasilan Tanah Putih kepada kemenakannya Tengku Said Abubakar, yang dikenal sebagai Tengku Besar. Pada saat ini raja Rambah tinggal yuang telah diusir oleh Pakih Saleh dari daerahnya, seperti halnya

raja Tambusei di Tanah Putih. Raja Rambah sepenuhnya tunduk kepada Siak, dia bersama rakyatnya pergi ke sana untuk ikut membangun kraton Siak. Tengku Besar, yang bersifat sombong, memperlakukan raja Rambah sebagai bawahannya. Raja Rambah kemudian bersekutu dengan Datuk Tanah Putih untuk melepaskan diri darinya.

Pada suatu hari, ketika putra Tengku Besar yang sudah dewasa yaitu Tengku Bendul berangkat ke Deli, raja Rambah memasuki rumah Tengku Besar, membunuhnya dan mengambil semua harga yang dimilikinya (dia dikatakan menjadi sangat kaya) seperti juga putranya Tengku Uda (kemudian dibunuh oleh Tengku Putra). Dia memperkuat Tanah Putih dan menyiapkan diri untuk menunggu serangan Siak dengan kekuatan senjata. Ketika berita tentang kedatangan Tengku Mohamad (*Marhum Besar*) mencapai dirinya, keberaniannya menurun dan dia melarikan diri ke Dalu Dalu, di mana dia menawarkan semua harta yang dirampas olehnya serta Tengku Uda kepada Pakih Saleh.

Marhum Besar berangkat dengan armadanya menyusuri sungai sampai perbatasan Tanah Putih, tetapi raja Rambah telah mendahuluinya lari. Ketika kembali ke Siak, penghulu Kampar dari Pekanbaru dikirim ke Dalu Dalu untuk memanggil kembali Tengku Uda. Pakih Saleh memenuhi permohonan itu dan memberitahukan kepadanya. Penghasilan dari Tanah Putih pada mulanya diserahkan oleh Sultan sekarang ini kepada saudaranya Tengku Mak Ingsun (yang sudah meninggal), yang menikah dengan Tengku Kelana dari Pelalawan, dan setelah kematiannya kepada saudaranya, Mangkubumi Siak sekarang ini. Kepada Mangkubumi sebagai ganti rugi bagi pelepasan pulau Bengkalis diserahkan oleh Sultan kepada pemerintah dan keduanya dengan ketentuan bahwa \$ 400 per tahun dibayarkan kepada Datuk Tanah Putih.

Surat yang dibuat dipalsukan oleh Mangkubumi, yang seperti sekarang ini tampak dia telah menerima pinjaman Tanah Putih sebagai warisan. Nilai akta ini menjadi hilang, sejauh memiliki tujuan di luar pemberian jaminan penghasilan pribadi kepada Mangkubumi, karena redaksinya dipalsukan sementara isinya (seperti sekarang ini) bertentangan dengan adat, karena tidak ada

raja Melayu yang berhak untuk menyerahkan sebagian tanahnya di bawah wewenangnnya kepada pihak ketiga. Sementara itu Mangkubumi selalu bersikap sebagai penguasa merdeka di Tanah Putih dengan memecat para kepala yang diangkat olehnya tanpa seijin Sultan dan mengangkat pejabat lain tanpa memberitahukannya kepada Sultan. Tetapi Sultan tidak pernah memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran wewenang ini.

Pada tahun 1879 setelah Mangkubumi menerima peringatan dari pemerintah tentang sikapnya yang berlebihan itu, sebuah pengumuman dibuat dan disebar, yang ditandatangani oleh Sultan dan dirinya, dan dengan memberikan ancaman hukuman berat kepada setiap orang, ada larangan untuk mengangkat para kepala adat di Tanah Putih, Kubu dan Bangko atau menerima pengangkatannya, tetapi bagi yang lain Mangkubumi mengingkari dokumen itu di depan Sultan tanpa peduli. Sejauh mana sifat angkuh Mangkubumi terus berlangsung, redaksi akta pengangkatan menunjukkan, yang diberikan kepada seorang bernama Bimbang dan Badu pada tanggal 8 Dulhidah 1294 di mana dia mengangkat mereka sebagai pemimpin suku Batu Hampar dan Mesa, menggantikan para pemimpin yang diangkat oleh Sultan dan tidak pernah dipecat olehnya.

Dalam akta ini tidak pernah disebut-sebut tentang Sultan Siak, dan ditetapkan bahwa persoalan yang tidak bisa diselesaikan di Tanah Putih ini akan diputuskan bukan oleh Karapatan di Siak sebagai hakim yang berwenang melainkan oleh Mangkubumi sendiri. Apabila dia menjadi penguasa mutlak di Tanah Putih, maka dalam akta ini tidak perlu ada kata-kata lain. Tetapi untuk mendukung Mangkubumi, bisa dikatakan bahwa Tanah Putih diserahkan sebagai hak milik dan mungkin saja mereka melakukan hal ini untuk memaksanya agar memberikan persetujuan bagi penyerahan Bengkalis; dan Mangkubumi setelah berkas ini disahkan, tidak lagi terikat pada permohonan itu dengan penyisipan kata-kata "sampai anak cucunya" untuk menyatakan bahwa pelimpahan itu bisa diwariskan, di mana kepada semua persoalan selanjutnya menurut dugaannya, langkah itu telah dipotong.

Tidak perlu ditegaskan bahwa cara bertindak ini telah memunculkan kondisi kacau di Tanah Putih, yang tidak bisa dimaksudkan untuk menyerahkan tanah miskin. Tentang daerah Kubu dan Bangko, juga masih ada akta yang disahkan oleh Sultan, di mana daerah-daerah tersebut juga akan diserahkan kepada Mangkubumi, tetapi dengan kewajiban bahwa sebagian pendapatan harus dibayarkan kepada Sultan, sementara sebagian lainnya disediakan bagi Mangkubumi. Keterpaduan berkas ini dibantah oleh Sultan.

Tentang daerah-daerah tersebut masih dinyatakan bahwa juga atas kebenaran berita-berita Siak, tampaknya bisa diduga bahwa batas Tanah Putih dan Kapenuan adalah Ayer Meminda, dan tanah yang dikuasai oleh raja Rantau Binuwang terletak dalam batas-batas daerah Tanah Putih. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Kapenuan dan Tanah Putih (kerajaan-kerajaan atau sebagian dari bekas kerajaan) saling berbatasan. Daerah-daerah aliran hilir Tanah Putih kini dikuasai oleh raja-raja Siak sejak lama, sebelum raja Tambusei diusir dari tanahnya (di Rantau Binuwang) oleh Pakih Saleh selama perang Paderi; sejak itu pengaruh Siak kembali ditanamkan di Tanah Putih oleh *Marhum Besar*, yang menyerahkan daerah ini sebagai apanlage kepada kemenakannya Tengku Besar.

Raja Tambusei setelah diusir dari daerahnya pada mulanya tinggal di Sungei Kerang (di Panei), setelah itu di Sungei Daun, ketika itu di Sekeladi kemudian di Padang Pendpaatan dan akhirnya 40-45 tahun lalu di Rantau Binuwang, daerah Tanah Putih. Dari berbagai dokumen terbukti bahwa raja Tambusei telah menerima pinjaman sebidang tanah dari Sultan Siak antara Ayer Meminda di aliran hulu dan Pagaran Itik aliran hilir. Pada mulanya dia tidak berpikir untuk menghindari supremasi Siak, dan juga dalam batas-batas daerah ini dia menerima sambutan ramah, yang mengakhiri petualangannya karena diusir dari daerahnya.

Seperti penduduk lain di Tanah Putih dan juga warga raja Rambah, kawulanya melakukan kerja wajib di Siak. Tetapi perlahan-lahan rezim yang kuat di Siak kembali melemah, setelah raja Tambusei di mana-mana mulai merasa dirinya bebas dari Siak, juga bahwa dia berusaha menganeksasi tanah Pagaran Itik di daerah hilir,

dan memiliki pohon-pohon lili yang ada di sana, bahkan di seluruh Tanah Putih seperti di daerah Rokan lainnya, dia bisa mengajukan tuntutan sebagai hak miliknya yang sah.

Kita selanjutnya tidak akan meninjau daerah Rantau Binuwang bersama penduduknya sendiri, sehingga ketika berbicara tentang Tanah Putih, hanya dimaksudkan tanah di bawah Pagaran Ilik. Konsep untuk menguraikan posisi penduduk Tanah Putih, Kubu dan Bangko adalah: *beriman ka ampat suku, bertuwan ka tuwan Sultan Siak*, yang berarti: tunduk kepada 4 suku (yakni Siak) dan menjadikan Sultan Siak sebagai rajanya. Ketika para datuk daerah-daerah ini tiba di Siak, mereka sebelumnya menghadap kepada para datuk di sana, untuk membicarakan persoalan itu dengan mereka. Kewajiban yang ditunjukkan penduduk semua daerah ini terhadap Sultan Siak, seperti di seluruh wilayah Kerajaan Siak mencakup penyerahan wajib *larangan raja*, yang sebaliknya terbatas pada penyerahan sebuah gading dari gajah yang terbunuh sementara Sultan jika perlu bisa membeli gading lain dengan harga yang layak. Cuka atau *guliga* di sini kata orang tidak pernah ditemukan. Sultan di sini juga bisa membelinya dengan 4/5 dari harga sebenarnya.

Selanjutnya penduduk menurut adat harus menyertakan *bunga padi*, yaitu sebuah pajak atas tanaman padi berukuran 1 sumpit (1 gantang) beras, yang diserahkan oleh para datuk daerah-daerah yang dimaksudkan di sini kepada Sultan di Siak. Selain itu warga Tanah Putih, Bangko dan Kubu ketika dipanggil harus datang ke Siak untuk melakukan kerja wajib dalam membantun perbentengan, membuat jalan dan parit, dan sebagainya. Untuk pembangunan *astana* baru bagi Sultan Siak, penduduk daerah ini harus menyerahkan sumbangan uang senilai f 5 per keluarga.

Penduduk Tanah Putih, Bangko dan Kubu pada umumnya tidak sejahtera, sementara penduduk Tanah Putih sangat miskin. Ini merupakan akibat terutama dari sedikitnya energi penduduk, dan yang kedua cara bagaimana di daerah-daerah ini terjadi perpindahan dari sisi Siak, dan di sini sesuatu masih perlu disampaikan. Di sini perlu dicatat bahwa Sultan Siak menjadi wali di tiga daerah tersebut (ini merupakan simbol dari martabat raja). Tetapi dia menyerahkan

wewenang ini, *wilayat*, kepada imam dan katib di mesjid yang di sini ditemukan, di setiap daerah masing-masing satu orang.

Pajak yang dibebankan sehubungan dengan agama adalah zakat (1/10 dari hasil tanaman padi) dan fitrah senilai 1 gantang beras per kepala (besar dan kecil). Dari situ jabatan keagamaan (imam, katib, bilal, penghulu mesjid) semuanya dibayar.

Tanah Putih

Penduduk Tanah Putih dibagi dalam empat suku yaitu Melayu Besar, Melayu tengah, Mesah dan Batu Hampar. Setiap suku memiliki seorang datuk sebagai pimpinannya, dan kembali dibedakan sebagai *induk*, yang memimpin sebuah *tungkat*. Tiga suku pertama disebut memiliki *utan tanah*; Batu Hampar tidak memilikinya. Mungkin suku ini pada mulanya terdiri atas kaum pendatang. Sebagai akibatnya mereka tidak memiliki *pancong alas* maupun *hasil tanah*. Sebaliknya mereka harus membayarnya kepada suku-suku lain, apabila mereka mengumpulkan hasil hutan atau membuka ladang.

Utan tanah tidak dimiliki oleh tiga suku pertama tetapi masing-masing warga memiliki sebagian darinya secara turun-temurun. Pemilik *perantauan* ini sekarang memiliki hak atas *pancong alas* dan membebani *hasil tanah*, namun dengan pengertian bahwa *tungkat* dibebaskan dari hak, berada di *perantuan* milik *anak induk* dan datuk dalam sukunya. Selanjutnya ada adat bahwa warga Bangko bebas mengambil rotan di Tanah Putih dan sebaliknya warga Tanah Putih bebas mengambil *atap* dari Bangko.

Suku Melayu Besar dibagi menjadi empat, suku Melayu Tengah dibagi menjadi dua, Mesah dibagi menjadi dua dan Batu Hampar dibagi menjadi 3 induk, sehingga di sana 3, 1, 1 dan 2 *tungkat* ditemukan; datuk sendiri menjadi kepala induknya sendiri. Suku Mesah pada kesempatan ini tidak memiliki *tungkat*; datuk diberhentikan oleh Mangkubumi, dan *tongkat* lama, Badu, digantikan olehnya. *Tongkat* dahulu tidak memiliki akta pengangkatan tetapi yang pada tahun 1878 diberikan kepadanya oleh Mangkubumi, ketika di Siak dirayakan sebuah pesta. Kedudukan datuk atau *tongkat* diturunkan dari ayah kepada putranya, tetapi hanya apabila

putra ini berasal dari suku atau induk ayahnya (karena anak suku atau induk akan menggantikan ibunya). Jika tidak ada putranya, maka jabatan itu akan dialihkan kepada kemenakannya.

Jadi juga pada saat meninggal, pewarisan bagi sebagian besar harga diberikan sebagian kepada anak-anaknya, tetapi sebagian masih tetap dimiliki kemenakannya. *Tongkat* memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman anak induknya sampai sebesar \$10, sementara datuk menjatuhkan denda sebesar \$20 pada anak suku; perkara senilai @20-40 akhirnya harus diselesaikan oleh para datuk bersama-sama. Perkara besar ini diselesaikan di depan karapatan di Siak. Para datuk di Tanah Putih sebaliknya mengeluh bahwa ketika perkara itu dihadapkan di depan karapatan, yang sangat jelas bisa diselesaikan, mereka akan kehilangan sebagian dendanya.

Hasil denda ini oleh para datuk bersama *tongkat* dibagi: dari suku Melayu Besar tiga orang *tongkat* ini bersama-sama menerima $\frac{1}{2}$, dan dari suku-suku lain mereka menerima $\frac{1}{3}$ darinya. Dari cukai ekspor-impor, datuk memiliki seluruhnya \$400. Dahulu pemungutan diborongan oleh Tengku Kelana bagi istrinya Tengku Mak Ingrun senilai \$ 800. Pada tahun 1882 Mangkubumi menyerahkan hak itu kepada seorang Eropa di Bengkalis senilai \$1200, yang kembali menyerahkannya kepada seorang Cina di Singapura dengan keuntungan \$200.

Cara bagaimana Mangkubumi memenuhi kewajibannya untuk membayar \$400 kepada para datuk setiap tahunnya, dari pihaknya berulang kali mengarah pada keluhan. Sejak pemborongan dilakukan kepada orang-orang Eropa, kondisinya menjadi lebih baik mengingat dalam kontrak yang dibuat oleh mereka ditetapkan bahwa uang \$400 ini langsung akan dibayarkan olehnya kepada pemegang hak. Dari uang ini, Datuk Melayu Besar menerima $\frac{2}{5}$ atau \$160, dan tiga yang lain masing-masing menerima $\frac{1}{5}$ atau \$80. Datuk Melayu Besar harus kembali menyerahkan $\frac{1}{4}$ dari \$160 ini atau \$40 kepada *tongkat*, Lela Raja, sehingga dia hanya menerima \$120. Datuk Melayu Besar menerima jauh lebih banyak karena dia memiliki paling banyak anak buwah. Jumlah keluarga bawahannya menurut penafsiran mencapai 150, sementara yang lain yaitu Datuk Melayu Tengah dan Datuk Mesah masing-masing memiliki 25

keluarga dan Datuk Batu Hampar memiliki 35 keluarga. Di seluruh Tanah Putih, kira-kira 250 keluarga tinggal, sehingga jumlah penduduknya mencapai 1200-1500 jiwa.

Bangko

Penduduk Bangko seluruhnya terdiri atas sebuah suku, yang merupakan keturunan Aceh. Tipe Aceh masih tampak di sejumlah warga Bangko. Kepala Bangko adalah seorang datuk, yang dalam pemerintahannya dibantu oleh 6 orang *tongkat*. Penduduk memenuhi kebutuhannya terutama dengan membuka tanah ladang dan menangkap udang, yang dijumpai dalam jumlah besar di pantai daerah itu. Suatu pemukiman 400-500 orang Cina yang sangat penting terjadi di kampung Bagan Api-API dan bertahan di sana dengan penangkapan ikan dan udang, yang sering dikeringkan atau dijual sebagai *belacan*.

Tanah Bangko dimiliki oleh penduduk dan dibagi di antara sejumlah induk bersama datuknya. Sebagai akibatnya mereka memiliki *pancong alas* serta *hasil tanah*. Juga mereka menerima *pancong alas* pada masa lalu. Tetapi sekarang Sultan telah menyerahkan penghasilan dari Sungei Bangko kepada Haji Math Seh, ayah dari selir Sultan, seorang pria yang sangat terkenal dalam sejarah Siak. Dia adalah Panglima Perang yang membantu Wilson selama ekspedisi terhadap Siak. Setelah diusir dari sana, panglima ini melarikan diri dan selama beberapa saat tinggal di Langkat, di mana salah satu putrinya menikah dengan putra sulung Pangeran Langkat, Tengku Sulung. Setelah beberapa saat, Panglima Perang tersebut diusir oleh Pangeran Langkat dari daerahnya.

Dia berangkat ke Mekkah tetapi setelah perkembangan situasi dia kembali ke Siak sebagai seorang haji dan tinggal di Bangko, setelah Sultan mengambil putrinya sebagai istri. Kini dia menguasai *pancong alas* atas semua hasil hutan yang berasal dari Sungei Bangko, sementara semua produk yang dikumpulkan di sana senilai %25 (jadi kira-kira 40% dari nilai itu) harus diserahkan kepadanya. Sungai Bangko juga tidak bisa dilayari sekarang ini karena banyaknya kayu bakau yang ditemukan di sana. Selanjutnya Sultan telah menyerahkan kepada Daeng Puwarih, seorang Bugis, hampir semua

keuntungan dari kepemilikan tanah atas sebagian lain daerah Bangko.

Daeng tersebut memiliki hak monopoli perdagangan nibung dan atap di Sungei Raja Berjamu, yang dipotong di sana oleh 10-20 orang pengikutnya. Selain itu semua pohon lilin (serta *pancong alas*) di Sungei Senebui (perbatasan dengan Domei) sampai Sungei Suwasa Besar diserahkan kepada Daeng ini, kondisi yang menimbulkan keirian dari penduduk Bangko sendiri. Anak-anak negeri ketika mereka ingin mengangkut atap atau nibung ke Deli, harus membayar 10% sebagai *pancong alas* kepada orang Bugis itu.

Di Bangko orang menduga bahwa hak istimewa ini diberikan kepada Daeng Puwarih untuk membayar hutang darah \$1000 yang dahulu telah dibebankan kepada penduduk Tanah Putih, atas pembunuhan yang dilakukan terhadap Daeng Basok, seorang kerabat jauh Daeng Puwarih, dan tidak pernah dibayarkan. Jika informasi yang diperoleh dari pihak Siak ini benar, maka hal itu tidak tepat mengingat tidak mungkin Bangko membayar hutang Tanah Putih, sementara selain itu Daeng Puwarih tinggal di Bangko ketika Daeng Basok dibunuh.

Yuang ketiga, Sultan menyerahkan hak monopoli sebagian borongan kepada haji Mohamad Nur seharga \$250 atas pengumpulan *pucuk nipah* (daun nipah yang belum dewasa, di mana oleh penduduk pribumi dibuat sebagai pelepah), yang merupakan komoditi paling disukai dan paling mahal terutama di Deli. Haji Mohamad Nur belum lama ini meninggal. Dia menyertorkan muatan *pucuk nipah* ke Deli dan di kuala Sungei Deli terserang kolera, sehingga harus kembali di Bangko tetapi tidak lagi mampu bertahan hidupnya. Penghasilan resmi dari para kepala Bangko selain *pancong alas* yang menjadi hak mereka dan *sialang* yang sebagian telah dirampas dari mereka, adalah hasil denda.

Tongkat bisa menghukum kawulanya sampai \$10 dan Datuk bisa melakukannya sampai \$20. adat di Bangko, bahwa semua denda diterima oleh Datuk, yang menyisihkan sebagian dari jumlah itu, masih berlaku sementara dia harus membagi sebagian lainnya di antara para *tongkat*.

Apakah benar seperti yang dikeluhkan oleh *tongkat* bahwa Datuk tidak menyerahkan denda itu kepada mereka, tidak bisa dikatakan tetapi tampaknya tidak mungkin. Berbagai penghasilan di Bagan Api-API (debet candu dan arak, perjudian dan cukai ekspor atas udang dan *belacan*) dahulu diborongkan oleh Sultan kepada seorang Cina. Kini Bagan Api-API dengan Penipahan (di Kubu) diborongkan seharga \$2800 kepada seorang Cina di Singapura. Dari jumlah \$2800 ini, Sultan berjanji setiap tahun akan membayar \$150 kepada Datuk Bangko. Suatu beban lain yang masih menimpa penduduk Bangko adalah penyetoran *tapak lawang* kepada Sultan, dalam bentuk 10 gantang beras per keluarga. Dahulu mereka yang membuka ladang di Bangko wajib membayar sebagai pajak atas tanaman padi dengan istilah *sumpit*.

Pajak ini sejak dua tahun dipungut oleh putra Sultan, Tengku Ngah. Pada tahun lalu, Tengku Ngah memerintahkan penduduk yang tinggal tersebar di ladang-ladang seluruh daerahnya agar kembali segera ke kampung mereka. Apakah mungkin bagi tindakan ini bertujuan untuk menyatukan penduduk di kampung-kampung ini, tidak perlu diragukan lagi apakah saatnya yang dipilih tidak tepat, karena penduduk baru saja membuka ladangnya untuk menanam padi. Perintah itu sebaliknya tidak bisa ditunda lagi, dengan akibat bahwa hampir seluruh penduduk Bangko pada tahun lalu tidak bisa lagi menanam padi.

Juga pada tahun ini kembali para kepala (sebagian besar penduduk juga mengalaminya) dipanggil untuk datang ke Siak guna merayakan pesta pada perkawinan putra sulung dan dua orang putri Sultan. Sultan, yang pada tahun 1878 telah mengalami kenyataan bahwa pemerintah tidak berkenan bila penduduk tinggal lama di Siak, sangat jelas sebagai tindak lanjutnya harus memperhitungkan keinginan pemerintah, dan menyuruh mereka lebih cepat kembali daripada masa lalu. Ada kebiasaan bahwa beberapa warga yang masih tetap tinggal harus menyetorkan \$5 kepada para kepala adat mereka, untuk menutup biaya yang diakibatkan oleh pengadaan pesta.

Tindakan yang diambil oleh Tengku Ngah di Bangko ini sehubungan dengan *tapak lawang*, penyatuan penduduk di kampung,

juga terjadi di Kubu sementara biasanya penduduk di sana dipanggil bagi acara-acara pesta seperti penduduk Tanah Putih. Mungkin penduduk (apabila kolera selama masa itu tidak melanda tiga daerah ini) telah datang dengan sumbangan uang.

Kubu

Setelah uraian di atas, perlu disampaikan sesuatu tentang Kubu. Penduduk di Kubu pada mulanya terdiri atas tiga suku yaitu:

- suku Hamba Raja yang merupakan keturunan Johor
- suku Rawa, berasal dari Rau
- \suku Haru, yang berasal dari Haru (Haru adalah sebuah kerajaan besar yang telah lama lenyap, dan terletak di sebelah barat Langkat di teluk Besitang dan sungai Sarang Jaya)

Sebagai pimpinan tiga suku ini terdapat Datuk. Datuk dari suku Hamba Raja dan Rawa masing-masing membawahi seorang *tongkat*; dari Haru tidak ada satupun. Selain tiga suku tersebut, sekarang ini masih ada suku keempat yang mendapatkan nama Suku bebas.

Suku ini sebagian terdiri atas warga yang berasal dari Siak danb sebagian dari anggota tiga suku lain, yang dikeluarkan dari suku mereka sebagai akibat sengketa atau karena alasan lain. Mereka tidak memiliki datuk, tetapi empat penghulu sebagai pimpinannya, yang masing-masing memiliki bawahan. Orang bebas dianggap langsung berada di bawah Sultan Siak; ketika tiba di Siak, mereka termasuk *hamba raja dalam*. *Utan tanah* di Kubu termasuk tiga suku pertama; setiap suku atau induk memiliki bagiannya sendiri. Dengan memperhatikan kemunculan *suku bebas* ini, juga disebutkan bahwa mereka tidak memiliki *utan tanah*.

Penghasilan yang diperoleh Datuk Kubu addalah *pancong alas* dari produk hutan yang dikumpulkan di hutan mereka, di samping andilnya dalam denda yang dijatuhkan. *Tongkat* menerima denda yang dijatuhkan oleh mereka. *Tongkat* bisa menghukum denda sampai \$20, Datuk sampai \$40 dan karapatan dari seluruh Datuk di mana juga penghulu bebas ikut hadir (tetapi yang bersama-sama hanya mewakili satu suara) sampai \$60. Perkara besar diharapkan kepada karapatan di Siak. Pemungutan beberapa cukai terhadap pemukiman Cina yang terletak di Kubu di Penipahan, yang dahulu

diborongkan kepada Kapten Cina di Bengkalis senilai \$450, kini bersama Bagan Api-Api di sebuah persil diserahkan kepada sebuah kongsi Singapura senilai \$2800 per tahun.

Datuk menduga bahwa mereka dahulu memiliki hak memungut pajak dari ikan yang ditangkap senilai 1 real (\$ 0,20) per pikul, sementara sekarang ini bukan hanya cukai itu yang dirampas tetapi kawula mereka juga harus menyerahkan 5% dari ikan yang ditangkap kepada pemborongnya. Baik ini maupun yang lain juga dibantah oleh pihak Siak. Tentang *tapak lawang* yang dipungut oleh Tengku Ngah, serta tentang tindakan yang diambil oleh putra raja di Kubu, di atas sesuatu telah disampaikan. Dari situ masih bisa ditambahkan bahwa keturunan raja-raja ini akan menyelesaikan beberapa perkara dalam kunjungan terakhirnya ke Kubu, bagi sejumlah kesalahan kecil menjatuhkan denda sebesar \$60.

Ketika tuduhan disampaikan di karapatan Siak, dendanya berkurang sampai \$20. Kini pengaruh pemerintah semakin terasa di antara masyarakat pribumi di Siak, sehingga tampak bahwa bagi daerah-daerah yang dimaksudkan di sini, suatu masa yang lebih baik telah tiba dan penduduk yang tinggal di sana segera bisa menikmati kesejahteraan ini, di mana mereka bisa mendapatkan sumber bantuan alami dari daerahnya melalui eksploitasi bebas.

BAGIAN KETIGA

PENUTUP

Nota Omtrent Het Rijk van Siak karya H.A. Hijmans van Anrooij (1885) adalah salah satu sumber sejarah Kerajaan Siak yang sangat berharga dalam penyusunan sejarah Kerajaan Siak pada abad ke-19. Tim penyusun *Sejarah Riau* telah menggunakannya sebagai referensi penuh untuk bagian Kerajaan Siak. Namun, tidak semua karya ilmiah telah menggunakan secara langsung *Nota Omtrent Het Rijk van Siak* sebagai sumber penulisan. Umumnya mereka menukil ke *Sejarah Riau*. Dalam penyusunan Notanya, van Anrooij sendiri banyak mengandalkan laporan-laporan dari Residen E. Netscher sambil ia mengeluh tentang keterbatasan sumber dari “luar” Siak. Keterbatasan sumber tersebut membuat van Anrooij mengandalkan laporan E. Netscher dan menyandarkan laporannya kepada sumber tradisional seperti hikayat-hikayat dan legenda. Sumber volklore seperti *rerasan* atau cerita rakyat setempat dan hasil observasi langsung juga dimasukkan sebagai sumber karyanya.

Untuk memudahkan berbagai pihak dalam mendalami karya Hijmans van Anrooij tersebut, kami telah melakukan alihbahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia. Penerjemahnya dipercayakan kepada personal yang kompeten karena Bahasa Belanda yang diterjemahkan adalah bahasa gaya abad ke-19. Hasil terjemahan itu kami susun lagi agar lebih mudah dipahami dalam kondisi sekarang. Beberapa istilah yang digunakan van Anrooij untuk nama daerah misalnya, kami sesuaikan dengan ejaan atau pengucapakan sekarang. Ada juga istilah atau nama yang kami biarkan apa adanya karena nama-nama itu hampir tidak terdengar atau dipakai lagi sekarang. Upaya menyebarluaskan melalui terjemahan ini kami sebut dengan diseminasi. Upaya diseminasi dapat ditingkatkan melalui kegiatan

publikasi yaitu penerbitan alihbahasa *Nota Omtrent Het Rijk van Siak* tersebut sebagaimana yang dilakukan saat ini. Semoga buku ini bermanfaat adanya, amin.***

Tentang Penyunting

Wilaela, Doktor Ilmu Sejarah lulusan Universitas Padjadjaran Bandung ini sehari-hari adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau; aktif menulis tentang sejarah dan studi perempuan dan gender. Sejumlah karyanya dalam bentuk biografi tokoh perempuan Riau. Di antaranya adalah *Prosopografi Dekan Perempuan UIN Suska Riau* (2005), “Encik Hasnah: Menekat Budaya” dan “Chadijah Ali: Menanam tuk Dituai Esok” (dalam *Mutiara yang Terjaring*, 2006); “Linda Agum Gumelar” dan “Lasijah Soetanto” (dalam *Ketika Negara Memberi Amanah*, 2012). Karya lainnya: *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (2010); *Perempuan dalam Budaya Melayu* (2011), *Sejarah Pendidikan Perempuan Riau Era Kemerdekaan* (2014), *Khazanah Riau* (2014); *Haji Eng Inspiring Person dari Babel* (2015). No Telp/HP (08127653754), E-mail: wilaela@yahoo.com.

Nur Aisyah Zulkifli, dosen tetap Bahasa Inggris pada Fakultas Tarbiyah UIN sejak Suska Riau sejak tahun 2007. Selain itu ia mengajar juga di perguruan tinggi lain di Pekanbaru. Aktif menulis buku dan jurnal terutama dalam bidang ilmunya dan rajin mengikuti kegiatan pemberdayaan kompetensi. No Telp/HP (085364929193), E-mail: n.aisyahzulkifli@yahoo.co.id

KhaidirAlimin, sehari-hari bekerja di Perpustakaan Al-Jami’ah UIN Suska Riau. Lulusan Magister Ilmu Administrasi Unpad Bandung ini gemar melakukan kegiatan penelitian, terutama yang terkait dengan pekerjaannya dan kompetensinya sebagai ahli di bidang Ilmu Perpustakaan. Penelitiannya antara lain *Identifikasi dan Transmedia Manuskrip tentang Kesultanan Siak di Belanda* (2013) dan *Kontroversi Aya Sofia* (2014). No Telp/HP (081276878977) dan E-Mail: khaidir55@yahoo.com. ***